



Remah-Remah Bahasa

Perbincangan dari Luar Pagar

Eko Endarmoko



Remah-Remah Bahasa

Perbincangan dari Luar Pagar



Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Eko Endarmoko

Remah-Remah Bahasa

Perbincangan dari Luar Pagar



Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2026 Eko Endarmoko

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Remah-Remah Bahasa: Perbincangan dari Luar Pagar/Eko Endarmoko-Jakarta: Penerbit BRIN, 2026.

xvi + 148 hlm.; 14,8 x 21 cm.,

ISBN 978-634-7933-01-0 (PDF)

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Tata Bahasa | 2. Sociolinguistik |
| 3. Diksi | 4. Ejaan |

499.221

Editor Akuisisi & Pendamping	: Prapti Sasiwi
Copy editor	: Weni Rahayu
Penata Isi	: Vidia Cahyani Ayuningtyas
Desainer Sampul	: Vidia Cahyani Ayuningtyas

Cetakan pertama : September 2026



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, Anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie, Lantai 8
Jln. M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih,
Menteng, Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
e-mail: penerbit@brin.go.id
website: penerbit.brin.go.id
 Penerbit BRIN
 @penerbit_brin
 @penerbit.brin

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Daftar Isi



Pengantar Penerbit	vii
Kata Pengantar	ix
Prakata	xv
Prolog: Aturan yang Perlu Diatur	1
Bagian I Aturan Asyik	5
1. Xenofobia	6
2. Aturan Asyik	8
3. Kata (Kem)Ayu	10
4. Dikontrakkan atau Di kontrakkan	13
5. Mengendali	15
6. Menyinyalir	17
7. Proses	19
8. Sundal Bolong	21
9. Tapi sebagai Awal	24
10. Paradoks	26
11. Polisi Kitab	28
12. Kaidah yang Goyah	30
Bagian II Tata Kata	33
1. Yang Datang dan Pergi	34
2. Rudin	36
3. Bulur	38
4. Gerbong	41
5. Tata Kata	44
6. Memakai "Tesamoko"	47
7. Pesona Bicara Canggih	49
8. Merdeka	52

	9. Dua Tentang.....	55
	10. Heran.....	57
	11. Dari VOC ke Bahenol.....	59
	12. Singkat Kata.....	61
	13. Bahasa Baku, Catatan Ala Kadarnya.....	63
Bagian III	Makna yang Merewang.....	6
	1. Bentuk Bersaing	68
	2. Makna yang Merewang.....	71
	3. Merah Putih.....	74
	4. Mengomunikasikan atau Menyampaikan	76
	5. Tikus yang Tak Mati-mati	78
	6. Kampung Halaman	80
	7. Gado-Gado.....	82
	8. E.....	85
	9. Saling.....	87
	10. Asli.....	89
	11. Pengalaman	92
	12. Tambun	95
	13. Lisan	98
Bagian IV	Bahasamu Kastamu	101
	1. Kisah.....	102
	2. W.J.S. Poerwadarminta, Bapak Kamus Indonesia	104
	3. Bahasa Menunjukkan Bangsa	108
	4. Bahasa Kebangsaan	110
	5. Membakar Buku, Merayakan Kemerdekaan	112
	6. Cemar.....	114
	7. Ingin Kebelet	117
	8. (Bukan) Sesat Bahasa	119
	9. Sengkarut UU Bahasa	121
	10. Genit.....	125
	11. Bahasamu Kastamu	128
	Epilog: Bahasa Menunjukkan Bangsa.....	131
	Daftar Rujukan.....	135
	Sumber Tulisan	139
	Tentang Penulis.....	143
	Indeks.....	145

Kata Pengantar

Oleh: Sudaryanto¹



Membicarakan sesuatu tanpa landasan pengetahuan yang cukup agaknya kurang elok. Adapun pengetahuan yang cukup itu terutama yang bersifat ilmiah alias ilmu pengetahuan khusus. Jika kita membicarakan seluk-beluk jiwa, ya ilmu jiwalah landasannya; kalau seluk-beluk ekonomi, ya ilmu ekonomi. Jadi, kalau yang dibicarakan bahasa, ya ilmu bahasa.

Di Indonesia, ilmu yang dipelajari, terutama di pendidikan formal dari tingkat sekolah lanjutan sampai dengan perguruan tinggi, boleh dikatakan awalnya hampir seratus persen bukan berasal dari nenek moyang yang bermukim di bumi Nusantara, melainkan dari negara-negara Barat yang sudah maju. Hal itu terbukti dari nama ilmunya yang tidak menggunakan kata bahasa Melayu yang berkembang menjadi bahasa Indonesia atau kata bahasa ibu suku bangsa kita, tetapi menggunakan bahasa “sana”, satu kata yang terdiri atas dua bagian, isi dan wadahnya (sosio-logi, astro-nomi, semio-tika, dst.).

Dalam kaitan ini, kecuali generasi milenial, kebanyakan dari kita adalah generasi pertama di keluarga inti kita masing-masing yang mengenyam pendidikan tinggi sampai dapat mempelajari ilmu tertentu secara relatif utuh. Karena generasi pertama penerima ilmu impor itu, tidak mengherankan bila konsep-konsep penting yang ada dalam sesuatu ilmu (pengetahuan) disebut saja langsung sesuai dengan “asli”-nya. Salah satu dari ribuan konsep yang ada, yang mencakupi cabang ilmu apa saja, adalah konsep yang disebut dengan kata *research*, yang jelas-jelas menampakkan diri lewat ejaan

1 Linguis, peneroka hakikat bahasa. Salah seorang pendiri MLI (Masyarakat Linguistik Indonesia).

Latinnya sebagai kata asing (c.q. Inggris). Pada zaman Orde Baru, kata itu secara utuh masuk dalam warga bahasa Indonesia menjadi nama resmi suatu departemen, yaitu Departemen Urusan Research Nasional Republik Indonesia. Departemen itu pada 1965 berhasil menerbitkan empat jilid buku monumental berjudul *Research di Indonesia 1945-1965* yang editor koordinatornya M. Makagiansar; dan editor setiap jilidnya masing-masing Poorwo Soedarmo (bidang kesehatan), R.M. Soemantri (bidang teknologi dan industri), Sadikin Sumintawikarta (bidang pertanian), dan Widjojo Nitisastro (bidang ekonomi, sosial, dan budaya).

Yang menarik, sebagian penyumbang tulisan dalam bidang itu, selain memberi judul tulisannya menggunakan kata *research*², ada juga yang menggunakan kata *penjelidikan*³ dan *penelitian*⁴.

Saat ini, kata *berejaan research* dalam kosakata Indonesia telah menghilang; yang ada adalah kata *riset* hasil naturalisasi ejaan, dengan dua turunannya yaitu kata *meriset* dan *periset* (lihat KBBI, 2011: 1177), sebagaimana digunakan pula oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika mengatakan, “... perlu sinergi bersama untuk mewujudkan riset bersama yang bisa diimplementasikan.” (lihat *Kompas* 5 Desember 2017, hlm. 11 “Sinergi untuk Hilirkan Riset”). Sementara itu, kata *penyelidikan* lebih cenderung digunakan dalam kalangan ahli hukum yang dengan imbangannya pula kata *penyidikan*. Bersama berjalannya waktu, kata *penelitian* terkukuhkan

2 J.A. Katili, “Perkembangan Research Geologi di Indonesia (1945—1965)”; Oetarjo Diran, “Dua Puluh Tahun Perkembangan Research Aero dan Astronautika”; H. Saanin, “Research di Bidang Perikanan dari Tahun 1945”; Kampto Utomo, “Research Sosiologi Pedesaan di Indonesia (1945—1965)”.

3 Nj. W.S. Srimurni Doelhomid, “Perkembangan Penyelidikan Masalah Air Selama 20 Tahun Merdeka”; Han Lioe Hong, dkk., “Penyelidikan Gula di Indonesia (1945—1965)”.

4 Soetarjo Sigit, “Dua Puluh Tahun Penelitian Geologi-Terpakai di Indonesia (1945—1965)”; Soetardjo Soepadi, “Penelitian Fisika-Inti di Indonesia”; Ko Swan Djien, “Tinjauan terhadap Penelitian Fermented Foods Indonesia”; Sadikin Sumintawikarta, “Perkembangan Penelitian Pertanian 1945—1965”; Sadikin Sumintawikarta, “Tjatatatan Tentang Penelitian Tanaman Pangan antara Tahun 1945—1965”; Thung Tjiang Pek, Ong Tian Pa, dan Lauw Ing Koen, “Selajang Pandang Penelitian Karet di Indonesia (1945—1965)”; Karhi Sukartaatmadja, “Beberapa Tjatatatan Mengenai Penelitian Kopi (1945—1965)”; Slamet Muljana, “Perkembangan Penelitian Bahasa Nasional”.

di dunia keilmuan menggantikan kata *riset*. Hal itu tampak antara lain dalam nama lembaga (Lembaga Penelitian) serta salah satu sebutan tridarma pendidikan tinggi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Apakah yang menarik ihwal *research* yang akhirnya menjadi *penelitian* (nomina) dan *meneliti* (verba) ini dalam kaitannya dengan buku Eko Endarmoko yang ada di hadapan anda ini?

Saya melihat ada kandungan makna yang sangat mengena dalam kata *penelitian* dan atau *meneliti* beserta turunannya *peneliti* untuk mencerahkan akal budi siapa pun yang berada dalam perbincangan apa pun, termasuk perbincangan masalah kata dan bahasa, yang memerlukan landasan ilmiah, yang tidak ada—atau walaupun ada samar-samar—dalam kata *riset* (*research*). Ketiga kata itu (*penelitian*, *meneliti*, *peneliti*) berasalkan kata *teliti* yang berjenis adjektiva dan menyiratkan sifat utama yang layak dan perlu dimiliki oleh pelaku penelitian dalam bertindak meneliti. Bagaimanapun, peneliti haruslah teliti. KBBI menyamakannya dengan “cermat”, “saksama”, “hati-hati” (lihat KBBI, 2011: 1427). Dalam kaitan ini, peneliti yang harus memiliki sifat teliti itu tidak lain adalah ilmuwan yang telah mengenyam pendidikan ilmiah formal di perguruan tinggi tertentu; dan sifat telitinya itu pun akan tampak terpancar dari apa yang ditulisnya yang berkadar ilmiah.

Adakah tulisan Eko Endarmoko ini menampakkan juga hal sifat teliti atau ketelitian itu? Dapat langsung saya jawab “ya”. Dalam hal ini, ketelitiannya harus disambungkan dengan sifat “jeli”. Tulisan artikel yang tadinya terserak di dua terbitan *Tempo* dan *Kompas* dalam rentang waktu 12 tahun (dari 2006 sampai dengan 2010 melanjut 2014 sampai dengan 2017), berjumlah tidak kurang dari 40 buah, tak pelak menunjukkan ketelitian dan kejelian itu: jeli dalam melihat masalah, teliti dalam mencermati bagian-bagian inti masalahnya.

Ada empat tema yang dipaparkan dan dinyatakan dengan judul (A) Aturan Berbahasa Aturan Kita, (B) Memaknai Kaidah Bahasa, (C) Kesantunan dalam Berbahasa, dan (D) Bahasa dalam

Komunikasi. Judul (A) 9 artikel, (B) 18 artikel, (C) 5 artikel, dan (D) 10 artikel. Walaupun telah terbagi dalam 4 tema dengan masing-masing tema terdiri atas sekian artikel, tetapi karena buku ini merupakan kumpulan karangan yang terserak lebih dari rentang 10 tahun, pembaca pun bebas memulai pembacaannya. Bukankah 50 cerpen yang bila dibukukan memakan 250-an halaman tidak bisa—dan memang tidak perlu—menggantikan sebuah novel dengan jumlah halaman yang sama?

Asal tulisan Eko Endarmoko dari *Tempo* dan *Kompas* itu tentu saja mengandung aktualitas pada saat munculnya; dan tentu saja terkait dengan hal-hal yang layak dikritik, setidaknya disentil, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, khususnya Pemerintah dengan Pusat Bahasa (yang sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) dengan produk kebahasaannya, baik yang berupa kamus, tesaurus, tata bahasa, maupun undang-undang kebahasaan; juga para penulis pengguna bahasa yang berlindung pada konsep *licentia poetica* pun disentilnya. Penyebutan *perencana bahasa*, *pembela bahasa*, *polisi bahasa*, *para amtenar* yang diterakan pada pihak-pihak yang menimbulkan masalah kebahasaan Indonesia adalah penyebutan khas yang dimunculkan Eko Endarmoko dalam buku kumpulan ini. Demikian juga penyebutan *kamus resmi* dan cap *bergenit-genit* yang kesannya “agak meledek”. Kesemuanya itu dikemukakannya ber lambarkan keyakinan bahwa... bahasa dimutakhirkan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan, diterima atau ditinggalkan bergantung kita penutur bahasa Indonesia, bukan pekamus atau perencana bahasa.; ... kebebasan dalam *licentia poetica* ... lebih merupakan alat bantu bagi penulis guna menerobos kebuntuan—dalam keadaan darurat (hlm. 126). Eko Endarmoko pun lebih percaya “bahasa Indonesia sanggup menjaga diri sendiri dengan melaksanakan aturan main bagi dirinya, sebuah aturan yang cukup berumur, sudah melembaga.” (hlm. 62). Adapun terkait soal makna “... saya pikir kontekslah yang akan mendudukkan makna kata pada tempatnya, dan dengan begitu menghindarkan salah pengertian.”

(hlm. 12) dan “tak ada dua kata atau lebih yang persis sama.” (hlm. 117); dan terkait dengan ihwal singkat-menyingkat dipastikannya, “Berapa pun jumlah singkatan lahir setiap hari mereka pasti tersaring alamiah dari sebuah kancah bernama bahasa Indonesia. Dan, karena sudah dijinakkan, pastilah tak bakal merongrong. Apalagi merusak.” (hlm 62). Dan satu peringatan pun, yang bersumber dari keyakinannya, dilontarkan, “jangan lupa, bahasa bersifat arbitrer, dibangun atas dasar kesepakatan bersama di kalangan pemakainya.” (hlm. 29). Dalam hal itu, mengenai konsep “kesepakatan” itu sendiri dikatakan demikian, “Kesepakatan ini melibatkan proses tawar-menawar tiada henti yang menunjukkan betapa bahasa menyimpan sifat getas, ringkih.” (hlm. 78).

Pembaca tentu saja boleh menyetujui ataupun menolak gagasan-gagasan Eko Endarmoko yang tertuang, tersebar di halaman-halaman buku kumpulan artikelnya ini. Dia telah mengumpulkan gagasannya yang terserak sehingga terinventaris, terdokumentasi dengan harapan tentu saja dapat dimanfaatkan. Ada empat manfaat yang dapat dioptimalkan dalam setiap bertindak membaca: memperkuat, memperbarui, memperkaya, dan atau mengilhami.⁵ Dikatakan “memperkuat” manakala isi yang dibaca itu sudah sesuai benar dengan apa yang sudah dimiliki pembaca; dikatakan “memperbarui” manakala isi bacaan itu menampakkan kebenaran yang penjelasan dan buktinya *lebih saksama* daripada kebenaran yang telah diyakini pembaca. Dikatakan “memperkaya” manakala isi bacaan itu barang baru yang sebelumnya belum dikenal pembacanya. Dalam kaitan ini, isi bacaan yang dimaksud bukan sekadar hal yang faktual, tetapi lebih konseptual, yang merupakan gagasan atau pendapat matang yang telah dirumuskan secara ketat. Akhirnya, dikatakan “mengilhami” atau menginspirasi manakala isi bacaan atau juga cara penyajian isi bacaan itu memantik atau memicu munculnya gagasan matang yang selama ini bahan-bahannya tersimpan dan

5 Sudaryanto, *Cerdas Menulis Karya Ilmiah, Buah Pergulatan Lebih dari 45 Tahun dalam Menghayati Segi Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Keilmuan*. (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2016). (khususnya Wacana 5, “Membaca: Proaktif yang Berfasilitas”).

tertimbun dalam jiwa kreatif pembaca yang bersangkutan. Dalam kaitan dengan pemanfaatan jenis keempat ini, apa yang dibaca tidak bersifat substansial, tetapi bersifat instrumental. Boleh tidak selesai pembacaannya, pun layak segera dilupakan isinya.

Mana yang anda pilih? Silakan pembaca yang menentukan.

Selamat membaca.

Sleman, 7 Desember 2017

Bunga rampai ini berisi 49 tulisan tentang masalah kebahasaan yang pernah dimuat dalam majalah *Tempo* dan harian *Kompas*. Secara umum, buku ini menyajikan panorama soal-soal kebahasaan yang “remeh”, mulai dari lingkup bunyi dan ejaan, aspek-aspek makna dan konteks, hingga ihwal kebijakan pemerintah dalam soal bahasa kebangsaan kita. Tidak sedikit tulisan dengan perspektif yang barangkali belum banyak ditilik orang dengan bersungguh-sungguh. Itulah perspektif yang hendak mengajak para pemerhati bahasa agar tidak tergesa-gesa menyalahkan penutur di tengah perbantahan mengenai siapa atau apa biang keladi kesemrawutan bahasa kita. Sudut pandang ini mencoba memeriksa mengapa banyak penutur agak enggan mengindahkan aturan bahasa Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dari topik-topik sebelumnya. Buku ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi bagi peneliti atau akademisi bidang kebahasaan, para pemerhati bahasa, dan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia pada umumnya.

Kami berharap hadirnya buku ini dapat menjadi referensi bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi seluruh pembaca. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Prakata



Penyematan anak judul *Perbincangan dari Luar Pagar* pada buku ini pertama-tama hendak mengatakan bahwa semua tulisan di dalamnya (versi awal/cetak berjumlah empat puluh dua) dikemas secara populer. Anak judul itu perlu dibaca sebagai semacam pemberitahuan, pembicaraan di sana tidaklah berpretensi ilmiah, sekalipun dari segi substansi, tidak sedikit yang mencoba mengangkat pokok-pokok cukup “serius” dalam bahasa Indonesia—dari soal ejaan sampai kebijakan nasional dalam soal bahasa kebangsaan kita. Bersifat populer, sebab tulisan-tulisan yang berasal dari media massa, bukan dari publikasi ilmiah itu, pada mulanya ditujukan kepada publik pengguna bahasa Indonesia pada umumnya.

Bunga rampai ini terbit pertama dalam bentuk cetak (Yogyakarta: Bentang, 2017). Semua tulisan di dalamnya pernah dimuat dalam majalah *Tempo* dan harian *Kompas* (sepanjang kurun 12 tahun, sejak 2006 hingga 2017). Penerbitlah yang membuat pembagian tematis menjadi empat bagian. Saya berterima kasih kepada Noni Rosliyani, penyunting yang menangani naskah buku itu.

Namun, pada terbitan ulang ini, tidak bisa tidak, saya harus membacanya kembali. Mengingat sifat instansi penerbit barunya, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan segmen pembacanya yang boleh jadi berbeda, menjadi tidak terhindarkan adalah sebuah ikhtiar revisi berupa pembongkaran dalam lingkup agak luas dan mendasar. *Pertama*, edisi digital ini sudah diimbui “Prolog”, “Epilog”, “Daftar Bacaan”, dan “Indeks” sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban naskah.

Kedua, sekalipun himpunan tulisan ini tetap terbagi atas empat bagian, komposisi isi per bagian yang sudah diubah total kini diusahakan lebih proporsional. Judul tiap-tiap kelompok tematik itu diambil dari judul sebuah tulisan dalam bagian bersangkutan yang merepresentasikan tema bagian

tersebut. Lalu juga, ada satu tulisan ditanggalkan dan kemudian ditambahkan ke sini delapan tulisan “baru”—5 dari *Tempo* dan 3 dari *Kompas*—hingga edisi baru ini berisikan total 49 tulisan. *Ketiga*, terhadap segenap tulisan di sini, baik yang berasal dari naskah awal maupun tambahan, saya melakukan sejumlah perubahan. Kebanyakan berkenaan dengan bagian-bagian kecil tertentu saja dengan mempertahankan nada tulisan secara keseluruhan.

Beberapa aspek pembaruan di atas menjadikan versi baru ini banyak berbeda dari edisi awal. Berbeda, bukan saja dari segi format atau bentuk, namun juga dalam struktur isi serta sifatnya yang kini berkurang kadar populernya, tetapi jadi tampak mendekati ciri ilmiah.

Pembaruan isi buku ini pun pada gilirannya meminta sidang pembaca sedikit berhati-hati di dalam mengikuti “Kata Pengantar” yang ditulis cukup panjang lebar dan cermat oleh Dr. Sudaryanto. Berhati-hati dalam arti tidak lupa bahwa pengantar itu dibuat untuk buku versi awal (bentuk cetak). Dengan demikian, ada beberapa bagian, seperti rujukan angka halaman atau deskripsi tentang struktur naskah buku, misalnya, tidak lagi relevan.

Apa yang diharapkan dari ikhtiar menysasar publik umum dengan memetakan banyak perkara kecil dan sederhana yang sering dianggap sepele dalam bahasa Indonesia kita? Buku ini bertujuan menggugah kesadaran akan pertama, segi-segi bahasa yang sangat mungkin kurang atau malah belum banyak diketahui penutur bahasa Indonesia, dan kedua, membangun kesadaran akan perlunya tertib berbahasa. Namun, bagaimana membangun kesadaran itu?

Buku ini memilih cara bukan dengan semangat “mengajarkan” kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebab, bagi saya, jauh lebih penting adalah menumbuhkan kepatuhan pada kaidah bahasa, sebab kepatuhan ini menunjukkan bukan sebuah sikap tunduk, melainkan wujud rasa hormat kepada norma-norma bahasa Indonesia—terutama karena bahasa pada akhirnya adalah cermin sempurna dari tiap-tiap penuturnya.

Selamat membaca.

Bekasi, Desember 2025

Penulis

Prolog: Aturan yang Perlu Diatur



Iseng, saya bertanya kepada Meta AI, “Mana pengejaan yang benar, *pelihatan* atau *penglihatan*?” Dia menjawab, “*penglihatan*”. Merasa aneh dan penasaran, saya bertanya lagi dengan kalimat sedikit berbeda, namun jawabannya tetap sama. Barangkali itu bukan hal aneh, sebab apabila kita menengok ke data, kedua bentuk *pelihatan* dan *penglihatan* itu sama hidupnya di tengah khalayak pengguna bahasa Indonesia. Malah, bentuk *penglihatan* tampaknya lebih populer, dipakai oleh lebih banyak orang daripada *pelihatan*.⁶

Padaahal, konstruksi tersebut berasal dari bentuk dasar *lihat* yang diimbuhi /pe-an/, seperti *pengalihan*, *pengobatan*, atau *pengucapan*. Kita melihat di situ kemunculan bunyi “ng” pada awalan /pe-/. Namun, “ng” ini tidak hadir (antara lain) pada kata yang diawali huruf /l/. Tidak pernah kita jumpai, terutama dalam laras bahasa baku, bentuk-bentuk, seperti *penglaporan*, *penglukisan*, atau *pengliputan*, bukan? Jangankan kaidah atau aturan se-“rumit” itu, aturan yang sangat sederhana dan mendasar seperti pemakaian awalan dan kata depan pun masih gampang sekali kita jumpai bertukar-tukar tempat. Ambillah contoh: *dirumah* (seharusnya di rumah), *di makan* (seharusnya dimakan).

Penerimaan yang cenderung jamak atas penyimpangan aturan bahasa dalam ilustrasi di atas adalah contoh rendahnya kemampuan berbahasa masyarakat kebanyakan atas bahasa sendiri. Malah buruknya kualitas bahasa para penutur bahasa Indonesia ini terlihat juga di lembar-lembar skripsi atau disertasi. Fakta kebahasaan

6 Periksa, misalnya, dalam korpus https://corpora.uni-leipzig.de/en?corpusId=ind_mixed_2013.

tersebut seolah menolak mentah-mentah, atau mengolok-olok, seruan yang sudah lama dan sering kita jumpai: “Gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar”.

Akan tetapi, buku ini menyiratkan, tidak bisa dengan segera disimpulkan, sudah semakin membengkak jumlah penutur bahasa Indonesia yang, *tanpa sebab yang jelas*, kehilangan gairah memperhatikan, mempelajari, dan kemudian menerapkan kaidah bahasa Indonesia.

Himpunan 49 tulisan dalam buku ini terbagi tematis atas empat bagian. Secara umum, ia menyajikan panorama soal-soal kebahasaan yang “remeh”, mulai dari lingkup bunyi dan ejaan, aspek-aspek makna dan konteks, hingga ihwal kebijakan pemerintah dalam soal bahasa kebangsaan kita. Tidak sedikit tulisan dengan perspektif yang barangkali belum banyak ditilik orang dengan bersungguh-sungguh. Itulah perspektif yang hendak mengajak para pemerhati bahasa agar tidak tergesa-gesa menyalahkan penutur di tengah perbantahan mengenai siapa atau apa biang keladi kesemrawutan bahasa kita. Sudut pandang ini mencoba memeriksa mengapa banyak penutur agak enggan mengindahkan aturan bahasa Indonesia.

Bagian I (“Aturan Asyik”, berisi dua belas tulisan) menyoroti pengejawantahan aturan bahasa Indonesia di dalam praktik berbahasa. Di bagian inilah kita mendapati kenyataan bahwa tegangan antara kehendak pemegang otoritas kebahasaan menyelenggarakan pengaturan di satu sisi dan kodrat bahasa yang sangat dinamis di tangan para penutur di sisi lain itu bersifat niscaya. Selama bahasa kita hidup, masih ada penuturnya, penyimpangan terhadap aturan bahasa baku masih akan selalu terjadi. Tegangan seperti itu boleh dikatakan menjadi warna dasar semua tulisan di sini.

Bagian II (“Tata Kata”, terdiri atas tiga belas tulisan) membicarakan aspek-aspek kata, seperti posisi dan perilakunya yang cenderung sulit stabil, baik dalam hal bentuk maupun arti, di tengah persilangan arus komunikasi. Ketidakstabilan itu terbaca jelas di dalam kamus resmi bahasa Indonesia yang menunjukkan adanya

banyak masalah dalam ikhtiar membakukan kata. Ia seperti tidak punya pedoman atau kriteria yang tegas mengenai aturan-aturan kebahasaan—soal pengejaan kata atau kaidah peluluhan, misalnya. Ini membawa dua implikasi berikut. (1) Ada sejumlah pasangan ejaan berbeda atas satu kata, dan keduanya tercatat sebagai lema, tanpa rujuk silang. Contoh: *perai*—*prei*, *reak*—*riak*. (2) Ejaan sejumlah kata tidak konsisten dari satu edisi ke edisi berikut. Misalnya: *memerkosa*—*memperkoska*, *memercayai*—*mempercayai*. Kondisi ini mendorong kita bertanya-tanya, tidakkah berlebihan mendesak penutur agar berbahasa dengan baik dan benar sementara mereka melihat kamus resmi sebagai pedoman tidak meyakinkan mereka?

Bagian III (“Makna yang Merewang”, berisi tiga belas tulisan) masih melanjutkan perbincangan tentang kata, namun tulisan-tulisan di bagian ini kebanyakan bukan melihat kata dari segi bentuk, melainkan aspek maknanya yang mudah goyah, sangat bergantung pada konteks. Apalagi tidak pernah ada aturan formal di dalam soal diksi. Pengguna bahasa punya kuasa atau kontrol penuh atas kata yang hendak mereka pilih dan pakai.

Beberapa tulisan di Bagian IV (“Bahasamu Kastamu”, memuat sebelas tulisan) boleh jadi terlihat repetitif, seperti mengulang, sebenarnya menggemakan seraya memberi sedikit pendalaman dan penajaman, topik tulisan di bagian-bagian terdahulu. Penyimpangan terhadap aturan bahasa bisa terjadi bukan saja karena penutur/penulis tidak atau belum memahami kaidah yang berlaku. Dalam banyak kasus, pelanggaran disebabkan oleh sifat sembrono, masa bodoh, atau tidak peduli. Artinya, penyimpangan itu dilakukan dengan sadar. Betapapun, masih saja sulit diterima akal sehat, bila demi mengatasi soal kebahasaan begitu, pemerintah, c.q. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sampai merasa perlu mempergunakan perangkat hukum setingkat undang-undang. Dari pusaran sengkabut itulah buku ini mengajukan pemikiran “bukan undang-undang kebahasaan yang kita perlukan, melainkan cara dan adab yang lebih elok di dalam memelihara dan menyuburkan, baik bahasa Indonesia maupun bahasa ibu”.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bagian I

Aturan Asyik



Buku ini tidak diperjualbelikan.

1. Xenofobia

Seorang teman menuturkan, sewaktu dia baru pindah ke perumahan Bumi Serpong Damai, nama-nama di sana memakai bahasa Indonesia: Nusa Loka, Kencana Loka, Puspita Loka. Namun, sekian tahun kemudian, setelah berganti pengembang dan berganti nama menjadi BSD City, semua nama dalam bahasa Indonesia tenggelam dan datanglah nama-nama dalam bahasa asing, seperti De Latinos, The Green, Catalonia (blok-blok hunian); Paris Square, Golden Boulevard, Golden Road (kawasan bisnis); Ocean Park, BSD Junction

Ada golongan yang melihat, menyelusupnya kata dan istilah dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, ke dalam bahasa Indonesia, serupa bibit penyakit yang patut diwaspadai. Kini rupanya pemakaian tata kata (bahkan tata kalimat) asing sudah dipandang keterlaluan, dan menjadi pangkal kecemasan sebagian orang. Jadi, awaslah! Di situ nasionalisme si pengguna bahasa patut diragukan. Dia sudah menggerowoti bahasa kebangsaannya sendiri, tidak mematuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia harus dijunjung tinggi-tinggi, dan ini semua bukanlah perkara remeh. Namun, tak perlu anda terlalu cemas, sebab sebentar lagi akan kita saksikan keluarnya obat yang sangat bertuah: Undang-Undang Bahasa.

Sayangnya, mengatur bahasa dengan undang-undang sungguh mustahil, sulit dimengerti. Pertama-tama dan terutama saya kira karena upaya itu mengingkari hakikat bahasa sebagai unsur budaya yang hidup dan berwatak manasuka. Penafian terhadap unsur asing, misalnya, selain mengundang pertanyaan apakah batasan *asing*, juga dapat mengakibatkan tertutupnya pintu bagi sangat banyak kata dan istilah asing dalam berbagai cabang ilmu dan bidang kehidupan yang tidak atau belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Bagaimana pula bila kata atau istilah asing terpaksa dipakai lantaran si pengguna bahasa sungguh tidak tahu padanannya dalam bahasa Indonesia karena lebih akrab dengan bahasa asing?

Pun menjadi tanda tanya adalah batasan “baik dan benar”. Manakah cara menuliskan sebuah kata yang baik dan benar, begini atau begitu? Apa ukurannya dan apakah ukuran ini sudah kita miliki?

Siapa yang punya kuasa memutuskan? Apa kiranya yang menjadi dasar kuasa itu? Mengikatkah, dalam arti absolut, kata putus tersebut? Sekali lembaga yang berwenang menetapkan bahwa yang baik dan benar—dan wajib dipatuhi dengan segala sanksi hukum yang menyertainya—adalah bangun kalimat begini atau kata dengan cara menuliskan begini, ia sudah berlaku sewenang-wenang terhadap bahasa yang justru ingin kita junjung tinggi-tinggi. Di titik inilah kita, pemakai bahasa Indonesia, patut mencemaskan kehadiran tirani di sana.

Bolehlah saya tambahkan, jangan karena buruk muka lantas cermin dibelah. Sampai detik saat saya mengetik tulisan ini, kita sama sekali belum memiliki perangkat andal yang menjadi syarat utama, syarat dasar, di dalam usaha kita bersama mereka-reka bahasa Indonesia yang layak dibanggakan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* edisi terakhir pun masih menyimpan sangat banyak persoalan, apalagi bila dihubungkan dengan perkembangan bahasa Indonesia sampai hari ini. Dengan begitu, bagaimana kita dapat berharap orang berbahasa dengan sepatutnya?

Kita dapat merasakan kerisauan para empu dan pembela bahasa Indonesia manakala melihat perkembangan akhir-akhir ini yang menyajikan pemandangan seolah-olah bahasa Indonesia telah dijajah oleh bahasa asing. Namun, sangat naif jika orang yang memilih memakai kata asing dikatakan tidak percaya diri. Sebab, sekali lagi, mungkin kata asing itu tidak atau belum ada padanannya, atau mungkin juga orang itu betul-betul tidak tahu istilahnya dalam bahasa Indonesia. Pertimbangkan jugalah kenyataan ini: masih ada jutaan penduduk dari Sabang sampai Merauke yang buta bahasa Indonesia.

Lalu, akan datanglah Undang-Undang Bahasa, dengan cita-cita luhur membangun bahasa Indonesia baku yang majelis, tetapi majal. Entah mengapa, mereka rupanya alpa bahwa pangkal soalnya terletak pada bahasa kita sendiri, juga pada cara kita memandang, merawat, dan mengelolanya—bukan pada para pemakai bahasa yang kurang diberi kesempatan memahami apa sebetulnya pengertian bahasa yang baik dan benar itu.

2. Aturan Asyik

Infografik aturan kewajiban berbahasa Indonesia dalam Ivan Lanin, 23 September 2015 pukul 7:28, menggoda saya memberi judul tulisan ini begitu. Frasa yang menjadi sebuah judul yang kocak.

Ada empat kutipan pendek—satu kalimat saja—di sana. Kutipan pertama diambil dari Undang-Undang Kebahasaan, Pasal 33 Ayat 1 "Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta". Inilah tiga kutipan berikutnya, (a) "Bahasa Indonesia adalah sarana komunikasi nasional"—PP No 57/2014, (b) "Tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia"—Pasal 26 Ayat 1 Permenaker No 12/2013, dan (c) "WNA yang akan menjadi WNI harus bisa berbahasa Indonesia"—Pasal 20 Ayat 1 PP No 57/2014.

Kemudian kita tahu, lewat Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2015 yang terbit Juni, pemerintah menghapus syarat penguasaan bahasa Indonesia. Kita baca di sebuah media daring, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri beralih begini, "Kalau bahasa Indonesia ditempatkan sebagai syarat masuk menjadi TKA, ini yang menimbulkan keluhan dari para investor kita dan membuat iklim investasi kita tidak cukup kondusif."

Di bulan peringatan 87 tahun Sumpah Pemuda tahun ini, pesan di dalam infografik tadi saya kira patut kita tengok kembali. Cara penyajiannya saja bagi saya sudah asyik, sebab ukuran huruf dan tata letaknya jelas dikerjakan dengan pertimbangan tertentu. Tampak bukan tanpa alasan kutipan pertama terletak paling atas dan punya ukuran huruf sedikit lebih besar dari lainnya. Lalu, seperti disesuaikan dengan derajat kekuatannya sebagai hukum, tiga kutipan lainnya, berukuran huruf lebih kecil, diambil dari peraturan pemerintah. Ilustrasinya pun asyik. Terlihat menonjol adalah gambar dua bendera, bendera Indonesia dan bendera Kerajaan Inggris. Keduanya terletak agak di sudut kiri atas, Sang Merah Putih di belakang Union Jack apabila kita lihat dari pergerakan mata di dalam kebiasaan kita membaca aksara Latin.

Penataan letak gambar kedua bendera dua negara dengan cara itu menyiratkan mana yang lebih penting, lebih utama. Seperti ingin mengatakan, betapa di bumi bernama Indonesia, lebih berdaulat adalah bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris. Ukuran huruf yang berbeda menyiratkan perbedaan kekuatan sumber kutipan (undang-undang lebih kuat, lebih tinggi, daripada peraturan pemerintah).

Dalih Menteri Tenaga Kerja mendereregulasi aturan kewajiban tenaga kerja asing menguasai bahasa Indonesia bukan saja bertentangan dengan peraturan di atasnya, UU Kebahasaan seperti tertuang dalam UU No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, tetapi juga jelas sekali memandang bahasa Indonesia bukanlah apa-apa dibanding bidang ekonomi. Sangat masuk akal, apalagi di tengah situasi perekonomian kita hari-hari ini yang tidak baik-baik saja.

Terdengar atau tidak, dari kalangan pemerhati bahasa Indonesia berkumandang pertanyaan lama: Apakah bahasa Indonesia bagi kita?

Saya bukan penyokong UU Bahasa, namun ingin kembali saya katakan, "bukan undang-undang kebahasaan yang kita perlukan, melainkan cara dan adab yang lebih elok di dalam memelihara dan menyuburkan baik bahasa Indonesia maupun bahasa ibu" (Endarmoko, 2007).

Mungkin tak kurang asyik apabila menutup tulisan ini, saya mengulang pertanyaan sembilan tahun silam. "... apakah pergeseran cara memandang masalah kebahasaan dari zaman Sumpah Pemuda ke zaman kita sekarang ini dapat kita lihat mencerminkan perubahan semangat zaman serta minat dan isi kepala para pemimpin bangsa" (Endarmoko, 2006).

Yang sudah terang lewat uraian di atas, pemerintah tidak, atau belum, berhasil meyakinkan bahwa ia punya kemauan politik dalam soal bahasa kebangsaan kita.

3. Kata (Kem)Ayu

Tiap kali membaca karya sastra, orang mesti bersiap menghadapi banyak hal tak terduga. Boleh dia kecewa, barangkali karena jalan cerita berputar-putar, atau ia mendapati banyak kata yang tidak ia mengerti atau tidak menuruti kaidah berbahasa yang jamak, atau ia menjumpai sejumlah fakta berbeda dengan kenyataan sebenarnya, atau tokoh idamannya ternyata tidak punya etika. Boleh juga ia kecewa, sebab petualangan sang tokoh yang sudah memikatnya sejak awal, di ujung cerita semua itu cuma lamunan atau fantasi si tokoh itu belaka. Umumnya pangkal kecewa pembaca terletak pada jurang lebar antara harapan dan “kenyataan” yang ia hadapi dalam fiksi yang ia baca.

Itu juga kira-kira yang saya alami sewaktu berhadapan dengan *Cerita Cinta Enrico Ayu Utami* (2012), seterusnya angka dalam tanda kurung merujuk ke angka halaman). Tulisan ini hanya ingin meninjau sekadarnya aspek bahasa—bukan aspek sastra—karya fiksi dari hal paling sederhana: kata, unit terkecil bahasa.

Rasanya saya sudah cukup bersiap menghadapi banyak hal tak terduga di sana, tetapi tetap saja saya agak terkaget-kaget. Misalnya, sewaktu saya mendapati *kepingin* dan *belagu* dalam “..., tubuhku tahu bahwa anak itu sebetulnya *kepingin* ditaklukkan, meski tingkahnya *belagu*” (149). Kita tahu kedua kata itu tidak masuk golongan kelas terhormat dalam kalangan (bahasa) yang baik dan benar, dan sebab itu sangat mungkin bisa mengusik para polisi bahasa. Ayu pun relaks saja memakai kata sejenis: *atret* (84), *mengoretnya* (86), *capek* (121), *termehék-mehék* (126), *horni* (148), bahkan yang berbau Jawa, seperti *geru-geru* (8), *menggusah-gusah* (8), *kesrimpet* (11), *kadung* (11, 71), *bungah* (45), *dilabur* (57), *nelangsa* (68, 165), *ngelangut* (157), dan *menclok* (212).

Tidak ada yang istimewa pada pemakaian kata yang dicomot dari laras bahasa percakapan macam itu di dalam fiksi. Banyak penulis lain juga melakukannya. Misalnya, Leila S. Chudori dalam *9 dari Nadira* (cetakan II, 2010) dengan begitu saja memakai *mengeret* (53), *celemotan* (91), *klepas-klepus* (206), atau *senewen* (289).

Para polisi bahasa, yang cenderung berpandangan preskriptif, saya kira bakal sedikit mengernyitkan kening, apalagi saat menemukan sejumlah kata lain pada *Cerita Ayu* tadi. Ada fonem /k/ di awal kata yang luluh sewaktu mendapat imbuhan /me-/, *mengilap* (69, 73), tetapi huruf /p/ tidak luluh, *mempopulerkan* (111), *mempengaruhi* (129), *mempesona* (176) (Endarmoko, 2014). Atau ini: *frustasi* (6, 222, 232), *berpetualang* (213), *kerapihan* (240), yang bentuk bakunya *frustrasi*, *bertualang*, *kerapian*.

Kaget yang sedikit lain adalah saat saya mendapati kata majemuk ditulis bersambung: *keretaapi* (9). Dan ternyata ia tak sendiri. Ada yang tak berimbuhan, seperti *batuapung* (35), *jerihpayah* (36), *buah tangan* (45), *airmata* (109, 159, 160), *orang tua* (122), *jurumasak* (172), *belaskasih* (205, 208), *jurukamera* (233). Ada juga yang berimbuhan, *bersukacita* (73), *diberitahu* (138), *penanggungjawab* (138), *berumahtangga* (168).

Seperti gampang diterka, segera kita teringat Pramoedya Ananta Toer. Sudah pada beberapa halaman pertama *Bumi Manusia*⁷ kita menemukan *tigabelas* (1), *berterimakasih* (3), *keretaapi* (3), *delapanbelas* (4), *tuantanah* (5), *matakeranjang* (5), *rumahpelesir* (10). Dalam *Nadira Leila*, kita temukan *memberitahu* (103, 117, 160) dan *terimakasih* (29, 103, 121, 122, 133, 206, 208).

Semua contoh bentuk majemuk di atas lazimnya, juga di dalam kamus bahasa Indonesia, dituliskan terpisah. Pernah ada penjelasan, manakala sebagai gabungan kata memberi arti baru yang tak dapat dikembalikan kepada arti satu-satu kata pembentuknya, atau apabila berpotensi menimbulkan salah pengertian, kata majemuk mesti dituliskan bersambung. Argumen ini segera saja rontok oleh (telur) *mata sapi*, sebab bentuk majemuk ini merujuk bukan lagi pada mata milik sapi. Kenapa *matahari* (sambung), tapi *mata sapi* (pisah)? Jangan kita lupa, kamus bahasa Indonesia mengeja *orang tua*, dalam arti baik bapak dan ibu maupun orang yang sudah tua, tidak ditulis bersambung untuk pengertian yang pertama.

7 Yang saya pakai di sini adalah cetakan V, dengan perbaikan teknis dan redaksional, Februari 1981.

Salah pengertian? Kontekslah yang akan mendudukan makna kata pada tempatnya dan menghindarkan salah pengertian. Bila pun argumen tadi mau kita pakai, semestinya kita menulis *lidahbuaya* (tanaman), *lidahkucing* (kue), atau *lidahmertua* (tanaman) yang berbeda dengan lidah (milik) buaya, lidah (milik) kucing, dan lidah (milik) mertua.

Sampai hari ini kita belum mendapatkan penjelasan yang cukup tentang cara menuliskan bentuk majemuk, apakah pisah atau sambung.

Sastrawan seperti Ayu, Leila, atau Pram punya kontrol dan kuasa penuh atas bahasa. Jangan-jangan sikap menolak *kemayu* dalam berbahasa inilah penyebab tersingkirnya unsur “yang indah”, dalam SUsastra menjadi semata sastra.

4. Dikontrakan atau Di kontrakkan

Cukup sering kita bersua dengan kata *dikontrakan* atau *di kontrakkan*. Kedua bentuk ini biasanya mengambil rupa plakat, tulisan di atas secarik kertas atau karton, dan ditempelkan di sisi depan sebuah rumah yang oleh pemiliknya hendak disewakan. Cara ungkap yang sebenarnya bermaksud kelak ditangkap oleh pembacanya sebagai *disewakan* itu, dengan segera kita tahu, keliru atau menyimpangi kaidah tata bahasa Indonesia. Persisnya keliru baik pada tataran gramatika (*di kontrakkan*) maupun pada tataran semantik (*dikontrakan*).

Segera akan ada yang mengatakan, bukan *dikontrakan*, melainkan mestinya ditulis *dikontrakkan*. Konstruksi ini berasal dari kata dasar *kontrak* yang mendapat awalan /di-/ dan akhiran /-kan/. Akhiran /-kan/ inilah penjelasan mengapa huruf /k/ di situ mutlak mesti ditulis doble. Bandingkan dengan kata lain yang huruf di ujung belakangnya /k/, lalu beroleh akhiran /-kan/: *menaikkan*, *mendesakkan*, misalnya. Sudah jelas jugalah, mengapa apabila huruf /k/ di sana cuma satu, *dikontrakan*, gampang kita bilang mencong, salah—manakala kata ini dimaksudkan membawa pengertian kurang lebih seperti arti kata *disewakan*. Sebab, *dikontrakan* otomatis menggiring kita berpikir bahwa konstruksi itu bermula dari bentuk dasar *kontra*, bukan *kontrak*. Berbeda dari *di kontrakkan* yang keliru secara gramatika, *dikontrakan* melenceng lebih karena tidak membawa pengertian sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulisnya. Ia cacat makna, bukan cacat bentuk.

Di sini kita dapat menegaskan, konstruksi *dikontrakan* tak bisa lain berarti *ditentangkan*, *dilawankan*, bukan *disewakan*. Namun, pada saat yang sama dapat juga kita mengatakan bahwa orang yang membaca kata itu pada plakat di sisi depan sebuah rumah tidaklah serta-merta akan mengartikannya *ditentangkan* atau *dilawankan*. Saya kira tidak sedikit dari para pembacanya akan mengartikannya (secara keliru) sebagai *disewakan*—persis seperti maksud penulis, sang pemilik rumah. Dan, inilah aspek kebahasaan yang ganjil bin ajaib, mereka sedikit pun tidak merasa ada masalah(!).

Berbeda adalah kasus penulisan *di kontrakkan*. Salah bentuk ini terletak pada penulisan /di/ yang semestinya menyambung, tidak berdiri sendiri: *dikontrakkan*. Mengapa harus menyambung? Sebab, di situ /di/ adalah awalan, bukan kata depan. Tidak ada dalam bahasa Indonesia kita awalan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya: *memakan, berkumis, pesuruh, perbesar, terangkat, kekasih*. Dan tidak ada kata (depan) yang ditulis menyambung dengan kata yang mengikutinya: *di kamar, dari kemarin, untuk kamu, hingga sekarang, hampir meninggal, demi Tuhan, atas nama*. Pendek kata, /di/ sebagai awalan dan sebagai kata depan, punya perilaku gramatika yang sangat berbeda.

Tadi disinggung bahwa *dikontrakan* otomatis menggiring kita berpikir bahwa konstruksi itu bermula dari bentuk dasar *kontra*, bukan *kontrak*. Bahwa kita otomatis tergiring ke situ, ini bukan hal yang aneh, sebab dalam tempurung kepala tiap orang sudah ada pola-pola bahasa yang meresap sedikit demi sedikit sejak dia sanggup berkomunikasi dengan bahasa. Pola itulah yang menjadi sebab kita berpikir bahwa *dikontrakan* bermula dari bentuk dasar *kontra*, bukan *kontrak*.

Lebih menggugah rasa ingin tahu kita tampaknya adalah, mengapa ada kecenderungan mengingkari pola-pola tersebut? Bagaimana bisa menerima atau menganggap benar sesuatu yang jelas-jelas diketahui keliru?

5. Mengendali

*Pada Hari Minggu kuturut ayah ke kota
Naik delman istimewa kududuk di muka
Kududuk samping pak kusir yang sedang bekerja
Mengendali kuda supaya baik jalannya*
—“Naik Delman”, Pak Kasur

Pada mulanya adalah versi, beda penulisan satu kata di satu larik lagu “Naik Delman” Pak Kasur, antara satu dan lain teks. Ada setidaknya tiga versi sejauh yang saya temukan: (1) *mengendarai*; (2) *mengendalikan*; dan (3) *mengendali* (kuda). Seingat saya, lirik di bagian itu adalah ***mengendali*** *kuda supaya baik jalannya*. Ingatan saya bisa saja salah, tetapi melodi di sana meminta ruang untuk kata, sebelum kata *kuda*, sebanyak empat suku.

Dengan begitu pembunyiannya selaras dalam not dibanding dengan *mengendarai* atau *mengendalikan* yang punya lima suku kata. Ini bukan lalu berarti kata bersuku lima tidak bisa. Tentu bisa saja, namun ini membawa tuntutan atau konsekuensi temponya, kecepatan pembunyian dalam nada atau melodi, jadi harus ditingkatkan. Tiga suku kata terakhir pada kedua kata itu mesti dirampatkan, dibunyikan dua ketukan saja.

Pak Kasur—entah bagaimana mulanya nama panggilan yang akrab di telinga kita itu bisa lahir sebagai jelmaan dari Kak Soer, yaitu sapaan untuk Soerjono semasa aktif di dunia kepramukaan berpuluh tahun silam—barangkali bukan tidak menyadari konsekuensi ini.

Ia tampak sangat mengenal alam anak-anak seperti terpantul pada lagu-lagu ciptaannya. Bukan saja perpaduan lirik dan melodi yang mudah, dalam “Naik Delman” tidak kita temukan satu pun kata yang pelik, rumit. Kuat sekali hasratnya membuat riang anak-anak yang menyanyikan lagu itu. Ia lebih mementingkan melodi, seperti tidak terlampau peduli pada gramatika, pada bahasa, serta berhati-hati di dalam memilih kata. Setelah dua konstruksi yang lengkap, “turut ke kota” dan “duduk di muka”, langsung di larik berikut kita

Buku ini tidak diperjualbelikan.

bertemu *Kududuk sampung pak kusir yang sedang bekerja*, “*duduk [di] sampung*” (tanpa kata depan *di*). Tidak paham gramatika bahasa Indonesiakah Pak Kasur?

Sebagian guru Bahasa Indonesia di sekolah rendah dan menengah boleh jadi akan menambahkan contoh lain yang menguatkan kecurigaan itu. *Mengendali*, menurut mereka, adalah konstruksi kata yang sangat asing dalam bahasa Indonesia. Lazimnya memakai akhiran /-kan/: *mengendalikan*. Inilah yang saya duga amat mungkin mendorong entah siapa menukar kata *mengendali* dengan *mengendarai* atau *mengendalikan*.

Sukar kita mungkiri *mengendali* nyaris tak terpakai dalam kita berbahasa. Seperti halnya *melari*, *membunyi*, *memungkin*, *menduduk*, atau *memuntah*. Yang lebih biasa kita jumpai diikuti akhiran /-kan/. Pada saat yang sama, tak kalah melimpah khazanah bahasa kita menyimpan verba berawalan /me-/ tanpa akhiran /-kan/. *Melatih*, *memberi*, *memvonis*, *menari*, *menyanyi*, *menggendong*, *mentransfer*, *menabuh*.

Maka, malah kita patut berterima kasih kepada Pak Kasur, sebab dari *mengendali* itulah saya kira kita kini mengenal bentuk *mengendara*.

6. Menyinyalir

Pernah, dan masih berlangsung hingga kini saya kira, penutur bahasa Indonesia bingung mengenai dalil atau kaidah k-p-s-t. Padahal, rumusannya cukup jelas. Tiap kata dasar berhuruf awal *k*, *p*, *s*, dan *t* yang mendapat awalan *me-* atau *pe-*, huruf-huruf di awal kata itu hilang atau luluh. Misalnya, *meng(k)ubur*, *peng(k)erat*, *mem(p)enggal*, *pem(p)otong*, *meny(s)uap*, *peny(s)amun*, *men(t)ambah*, *pen(t)olong*.

Namun, ada tambahan bahwa dalil tersebut tidak bekerja pada (1) kata yang huruf awalnya gugus konsonan (misalnya, *mengkritik*, *memprotes*, *menstimulasi*, *mentransfer*); (2) kata serapan dari bahasa asing; dan (3) kata yang punya tiga suku kata. Inilah yang pernah kita kenal sebagai bentuk perkecualian.

Butir atau asumsi pertama cukup jelas dan masuk akal. Lagi pula, peluluhan huruf pertama pada kluster (gugus konsonan) di awal kata bisa memberi peluang huruf /e/ atau swarabakti hadir menyisip, sekalipun bisa juga tidak. Artinya, akan ada soal baru bahwa satu saat nanti kita harus memilih, swarabakti itu wajib ada atau tidak. Pilihan itu, jika dalil k-p-s-t diberlakukan di sini, kira-kira akan seperti ini: *mengritik*–*mengeritik*, *memproduksi*–*memeroduksi*, *memrotes*–*memerotes*, *menraktir*–*meneraktir*, *menyetimulasi*, dan seterusnya. Untunglah semua bentuk yang memaksa alat ucap sedikit berakrobat itu tak pernah langgeng.

Butir kedua dan ketiga, bagi kita sekarang tak lebih dari pandangan lama yang sudah patut kita timbang kembali. Asing atau asli itu apa ukurannya—ukuran yang berlaku bagi penutur bahasa Indonesia pada umumnya? Di sisi itu, kata dengan tiga suku kata pun bermasalah, sebab berdampingan dengan bentuk perkecualian (contoh: *mengkudeta*, *mempesona*, *mempengaruhi*, *mempercayakan*, *mensosialisasikan*), ada banyak sekali kata dengan tiga suku kata lainnya yang lazimnya dieja luluh (contoh: *mengeriput*, *memedulkan*, *menyiasati*, *menerjemahkan*).

Sama-sama bersuku kata tiga, tetapi mengapa mendapat perlakuan berbeda? Kita boleh menduga, tanda tanya inilah yang menggerakkan pikiran atau kehendak menegakkan kaidah k-p-s-t demi mendapatkan bentuk-bentuk yang taat asas. Kata *mempedulikan* pernah terekam dalam KBBI edisi I (1988), tetapi di edisi II (1991), III (2001), dan edisi IV (2008) lenyap dan diganti dengan *memedulikan*. Di sisi lain, bentuk *mengkudeta* berubah menjadi *mengudeta* dalam edisi II, edisi III, dan IV.

Saya ingin menambahkan dua contoh lagi yang, dari segi pembunyian, sedikit pelik. *Menyiasati* ada pada semua edisi KBBI, tetapi *menyosialisasikan* baru ada dalam edisi IV, sedangkan edisi I, II, dan III masih menyebutnya *mensosialisasikan*. Lebih pelik adalah bentukan dari kata dasar *sinyalir*. Barangkali kesulitan mengucapkan tadi menjelaskan mengapa edisi I, II, dan III mencatatnya sebagai *mensinyalir*, dan baru pada edisi IV menjadi *menyinyalir*.

Dari edisi ke edisi KBBI kita menemukan kecenderungan menolak bentuk perkecualian dengan memilih mengikuti kaidah k-p-s-t. Barangkali ada benarnya, secara naluriah lidah orang Indonesia umumnya kurang nyaman saat mengucapkan bentuk-bentuk perkecualian yang "dipaksa" mematuhi kaidah k-p-s-t.

Saya curiga persoalan ini lebih berpaut dengan kebiasaan, kelaziman belaka. Kita ingat perubahan dari *menraktir*–*mentraktir*, atau *mengritik*–*mengkritik*. Penerimaan dulu atas semua bentuk perkecualian (termasuk *mempunyai* dan *mengkaji*) yang tidak taat asas sebab melawan dalil juga mungkin bisa terjadi karena faktor kebiasaan.

7. Proses

Dokumentasi dan *klasifikasi* adalah dua kata serapan berkerabat, yang oleh kamus dirumuskan sebagai berikut:

dokumentasi /dokuméntasi/ *n* 1 pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan; 2 pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (spt gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain)

klasifikasi *n* penyusunan bersistem di kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yg ditetapkan

Di dalam keduanya kita temukan proses, sebuah kerja yang sedang berlangsung. Perbuatan mendokumentasi itu berawal dari mengumpulkan, berakhir dengan menyimpan. Persis di tengah aktivitas itu, ada tahap kerja lain, mengklasifikasi, yaitu menata, menyusun, memilah, menggolong-golongkan berdasarkan kategori tertentu.

Unsur-unsur *pengumpulan*, *pemilihan*, *pengolahan*, *penyimpanan* dalam *dokumentasi*, serta *penyusunan* dalam *klasifikasi* sangat kuat menegaskan kehadiran proses di sana. Dari itu, saya berpikir keberadaan kata turunan keduanya, *pendokumentasian* dan *pengklasifikasian*, patut kita persoalkan. Kita dapat menyebutnya tautologis alias lewah alias tidak perlu ada karena kandungan makna kata turunan itu dan kata dasarnya sama belaka.

Eko Y.A. Fangohoy, teman sesama editor dulu di penerbit Pustaka Utama Grafiti di akhir tahun 1990-an, mengingatkan saya, ada satu contoh lain: *pendistribusian*. Izinkan sekarang saya kutipkan contoh dari data berupa korpus ragam bahasa jurnalistik beberapa media daring (cetak miring dari saya):

Pengklasifikasian itu harus dirumuskan dulu, lalu disimulasikan berapa penghematan subsidiya dengan berbagai skenario. (“Subsidi BBM akan Dibatasi”, *Kompas*, 13 Maret 2010)

Pengklasifikasian upah minimum kab./kota (UMK) bagi usaha skala kecil perlu diusahakan oleh pemerintah. (“Perlu Ada UMK Berdasarkan Jenis Skala Usaha”, *Pikiran Rakyat*, 22 November 2012)

Coba kita gantilah *pengklasifikasian* dalam contoh di atas dengan *klasifikasi*, seperti kita mengganti *pendokumentasian* dalam contoh di bawah dengan *dokumentasi*:

Setiap hari, mereka melakukan kegiatan eksplorasi mulai dari pembersihan lahan, pemetaan, penggalian, penggambaran, dan *pendokumentasian* bentuk candi. (“Candi Kethek di Gunung Lawu Mulai Digali”, *Tempo Interaktif*, 11 September 2005)

Di sisi lain, *pendistribusian* dalam contoh di bawah ini pun sama sekali tak berpengaruh apa-apa manakala kita ganti dengan *distribusi*.

Sementara *pendistribusian* soal UN di Kota Tasikmalaya tetap dijaga ketat oleh kepolisian dan Dinas Pendidikan (“Polisi Jaga Ketat Pendistribusian Soal”, *Pikiran Rakyat*, 3 Mei 2015)

Hingga kini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan masih menunggu pengesahan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pendistribusian gas elpiji 3 kilogram. (“Perda Pendistribusian Elpiji 3 Kg Segera Berlaku”, *Waspada*, 21 April 2015)

Mengapa kata-kata bentukan itu bisa muncul, padahal konsep atau pengertian yang dimaksud sudah cukup terwakili oleh bentuk dasarnya? Menurut seorang teman saya yang lain, Yanwardi Natadipura, itulah yang terjadi pada kata serapan. Pada tataran semantik selalu ada risiko nuansa atau komponen makna tertentu dalam makna kata asal tidak ikut terserap. Atau jadi sedikit bengkok. Dan pada tataran morfologi, dunia penutur bahasa Indonesia pun meresap ke dalamnya.

Bahasa kita menyerap *sex* (*seks*), tetapi kemudian meluaskannya dengan bentukan *ngeseks*. Atau *object* (obyek) yang bisa saja punya turunan *ngobyek* (bukan *ngobjek*).

8. Sundal Bolong

Sudah lumayan lama bahasa Indonesia, rumah bersama bagi segenap bangsa Indonesia, hidup berdampingan dengan beragam bahasa daerah. Namun, bahasa Indonesia—apalagi setelah sekian lama berkembang dan menempuh jalan sendiri—sulit dikatakan merupakan penjumlahan dari bahasa daerah yang mencapai angka ratusan itu. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia tentu saja superior, dan tiap-tiap bahasa daerah menjadi subordinat.

Selain kata-kata dari laras bahasa lisan, terutama bahasa lisan di kota metropolitan, banyak kata serapan dari khazanah bahasa daerah yang masuk ke dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI). Label *cak* (cakapan) pada banyak sekali kata serapan itu bolehlah kita pandang sebagai penegasan atau tanda bahwa mereka bukan bagian dari laras bahasa baku. Namun akan kita lihat betapa tidak sederhana hubungan di antara keduanya, antara bahasa negara dan bahasa daerah—di sini saya mengambil kasus dialek Jakarta.

Marilah terlebih dulu kita tilik dua pasang bentuk bersaing di bawah ini dengan sedikit catatan, sebelah kanan (cetak tebal) adalah bentuk baku menurut KBBI, sedangkan di sebelahnya adalah bentuk yang, menurut saya, lebih alamiah.

cape – ***capai***

kumel – ***kumal*** (seterusnya data dari KBBI saya beri cetak tebal)

Kita bisa saja menduga-duga, pembakuan bentuk *capai* bertolak, atau dicoba dianalogikan, dari *balai*, *gulai*, *salai* (bukan *balé*, *gulé*, *salé*), sementara *kumal* tampaknya bersandar pada *sumpal*, *sundal* (bukan *sumpel*, *sundel*). Yang menarik, sementara *sumpel* dirujuk ke *sumpal*, bentuk *sundel* tidak terekam, sekalipun ia hidup (kita ingat film *Sundel Bolong* Suzanna). Di titik ini kita mengerti, kata-kata bersuku kata dua yang suku keduanya mengandung unsur /e/ atau /é/ agak terpinggirkan dari lingkungan bahasa baku, yang punya

kecenderungan kuat mengganti kedua fonem itu dengan /a/ atau /ai/. Dalam pada itu, sementara *kempes* dirujuk ke *kempis*, bentuk sepola dengan ini, *lembik*, malah dirujuk ke *lembek*.

Sudah kita lihat, hanya *sundal* yang masuk, sedangkan *sundel* sama sekali diabaikan. Namun sebaliknya, bukan *jubal* yang kita dapati, karena ia tak ada di sana, melainkan *jubel*. Ihwal absennya bentuk yang (mestinya) disarankan (karena berpotensi dianggap baku) kita lihat juga pada ketiadaan *kucal*, karena yang dianggap baku (sekalipun boleh jadi malah tidak baku, sebab berasal dari laras bahasa lisan) adalah *kucel*.

Sampai di sini terlihat bahwa asas penetapan bentuk baku tampak mulai bengkok atau malah, mungkin, dapat dikatakan menunjukkan penghargaan yang cukup pada langgam bahasa cakapan (yang hidup, namun tidak baku).

Melawan pola sebagaimana tampak pada beberapa contoh tadi (*kumal*, *sumpal*, *sundal*-dengan fonem /a/), yang baku adalah *jubel*, *kucel* (dengan fonem /e/!). Di sini bolehlah kita tambahkan:

lempang – ***lempeng***

meram – ***merem***

Semakin jelas kita melihat kegamangan kamus resmi bahasa Indonesia di dalam meletakkan dasar penetapan baku-tidaknya suatu kata—apalagi bila mengingat sekaligus *capé* (*Jk*) dan *capai* serta *kondé* dan *kundai* diborong masuk. Ia seperti sedikit bingung, atau malu-malu kucing, dalam menyerap bentuk yang hidup. Yang kita saksikan lewat beberapa contoh terbatas di atas adalah tarik-menarik yang niscaya antara kehendak pemegang otoritas kebahasaan membakukan dan kodrat bahasa yang punya tabiat lincir.

Fakta berikut ini barangkali menggugah barangsiapa yang hendak meneliti lebih lanjut. Dalam edisi revisi *Kamus Dialek Jakarta* (Jakarta: Masup, 2009), Abdul Chaer merujuk kata *timpa* ke *timpé*. Ada dua kata *timpé* dalam dialek Jakarta: (1) *nimpé*

mencuri, mengambil tanpa izin; dan (2) *nimpé* menimpa; sesuatu yg jatuh di atas. Bandingkan dengan pemerian KBBI: *menimpa* v 1 jatuh menindih (mengenai) sesuatu; 2 menjatuhkan atau mengenai (terutama tt sesuatu yg tidak menyenangkan, spt penyakit, bencana, dsb); 3 memukul; mengenakan senjata kpd; 4 mencuri; menyerobot.

Dengan perbandingan itu saya hendak mengatakan bahwa kedua arti dari dua kata *nimpé* dalam dialek Jakarta telah bertemu di satu kata *menimpa* dalam bahasa Indonesia. Tidak terhindarkan adalah pertanyaan ini: Betulkah kata *menimpa* dalam bahasa Indonesia juga punya makna *mencuri*; *menyerobot* seperti pada *nimpé* dalam dialek Jakarta? Intuisi atau rasa bahasa saya hingga kini masih agak sukar menerima makna begitu, sesukar menerima bentuk-bentuk *capai* (*cape*), *kundai* (*konde*), dan *sundal* (*sundel*).

Dari itulah, bila saja judul tulisan ini mengganggu anda, karena di pikiran anda sudah ada *sundel* (*bolong*), saya pun terganggu. Namun, maaf, saya sendiri belum kunjung mengerti mengapa saya tulis juga *sundal*.

Kuasa apakah yang membedakan ragam cakapan (yang hidup) dari ragam “baku” (yang lebih betah bersemayam dalam kamus) hingga yang satu seolah-olah lebih berderajat dari lainnya?

9 Tapi sebagai Awal

Pemerhati bahasa dari masa lalu sering bersikukuh pada tata aturan yang kaku. Ia cenderung bergerak di antara dua kutub betul-salah, seolah-olah bahasa adalah soal pilihan ganda pada ujian anak sekolah yang tak dapat ditawar. Maka, ia kita lihat bersifat tertutup, normatif. Sepadan dengan wataknya, tata bahasa konvensional yang mereka pegang itu kentara sekali mencerminkan cara berpikir deduktif, kurang memperlihatkan keinginan menerima bentuk-bentuk bahasa di luar aturan yang sudah ada. Padahal, seperti nanti akan kita lihat, tidak semua gejala kebahasaan dapat dirumuskan ke dalam kaidah yang disertai ukuran-ukuran betul-salah.

Persis berseberangan dengan mereka, penutur bahasa Indonesia kini tampaknya lebih suka menepikan atau mengebelakangkan atau menjungkirkan aturan kebahasaan yang mereka anggap serupa momok itu. Contoh paling baik: novel remaja. Barangkali bagi mereka aturan bahasa tidak penting benar, malah bisa-bisa mengekang kelancaran proses menulis. Mungkin sekali mereka beranggapan bahwa yang lebih penting adalah apa yang ingin mereka utarakan dan kalangan pembaca kira-kira dapat mengerti. Namun, kita mestinya mengerti bahwa di dalam berbahasa ada batas absolut yang tidak dapat begitu saja diabaikan.

Kita lihat beberapa contoh kaidah dasar dalam soal penulisan kata yang paling kerap dilanggar. Kata *tanda tangan* dan *tanggung jawab* lazimnya ditulis terpisah, juga bila mendapat awalan atau akhiran: *bertanda tangan*, *tanda tanganilah*; *bertanggung jawab*, *tanggung jawabnya*. Namun, jika diapit awalan dan akhiran, kata-kata itu ditulis bersambung: *penandatanganan*; *pertanggungjawaban*. Di sisi lain, kata depan mestilah ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, termasuk apabila disertai akhiran: *di kantor*, *di sakunya*; *ke sana*, *ke luar*, *ke dalamnya*. Namun, awalan, menurut kaidah ejaan bahasa kita, ditulis bersambung: *dimengerti*, *dikontrakkan*.

Mengapa di atas ditulis “ke luar”, bukan “keluar”? Sebab, di situ saya tengah berbicara tentang kata depan /ke/, sedangkan bentuk keluar adalah satu kata berkelas verba. Bandingkan dua kalimat ini:

(1) Ia sedang *ke luar* kota; (2) Marsinah sangat takut sampai *keluar* keringat dinginnya.

Contoh-contoh di atas adalah praktik berbahasa yang terikat pada norma baku, tetapi penyimpangan terhadapnya sering benar kita temukan. Di sinilah kita dapat berbicara tentang benar atau salahnya penggunaan bahasa. Pelanggaran terhadap norma itu sulit ditenggang, dalam laras bahasa formal. Namun, seperti tadi telah saya katakan, tidak semua gejala kebahasaan dapat dibekuk oleh kaidah yang disertai ukuran-ukuran benar-salah.

Beberapa waktu lalu saya mengikuti pertemuan yang membicarakan soal-soal bahasa di kantor sebuah koran nasional. Saya tercenung setelah mendengar salah seorang pembicara menegaskan, dan kemudian dikuatkan oleh seorang pembicara lain, bahwa kata-kata seperti “tapi” atau “tetapi”, “sebab”, dan “namun”, tidak boleh dipakai sebagai awal kalimat. Kata-kata itu tidak bisa menjadi awal kalimat sebab, menurut mereka, tak terpisahkan dari bagian kalimat sebelumnya. Mereka rupanya berpegang pada paham bahwa sebuah kalimat barulah dapat disebut benar dan sempurna bila mengandung satu ide yang utuh.

Paham itu bagi saya cacat setidaknya dalam dua hal. Pertama, sudah sejak lama bahasa Indonesia juga mengenal status “kalimat tak sempurna” yang memungkinkan sebuah kalimat hanya terdiri atas satu kata. Kedua, makna sebuah wacana tidak sama sekali bergantung pada bangun satu demi satu kalimat, tetapi pada kait-mengait antara kata, frasa, klausa, kalimat. Lagi pula, bukankah di dalam laku membaca kita selalu bergerak dalam lingkungan konteks tertentu? Setiap (satuan) teks mengandung bukan hanya makna harfiah atau makna referensial, melainkan juga senantiasa dibayang-bayangi makna konteks—satu hal yang belum banyak ditengok oleh tata bahasa tradisional.

Cobalah kita berandai-andai pemerhati bahasa Indonesia dari kalangan lama berhadapan dengan, dan harus menangani, pasase seperti ini: “Apakah gejala korupsi yang sangat kronis di Indonesia dapat kita temukan di Finlandia? Tidak. Mengapa? Sebab, nilai-nilai moral yang baik sudah mendarah daging dalam diri semua rakyat Finlandia.”

10. Paradoks

Kata *frustrasi* cukup sering ditulis (atau dilafalkan) menjadi *frustasi*, sebagaimana kata *mengubah* ditulis atau dilafalkan menjadi *merubah/merobah*. Padahal, sudah cukup jelas bahwa yang benar adalah *frustrasi*, bukan *frustasi*; dan *mengubah*, bukan *merubah/merobah*. Kata *frustrasi* adalah serapan dari bahasa Inggris *frustration*. Sejak semula bahasa Inggris tidak menuliskannya *frustation*, tetapi *frustration*. Kita juga dapat gampang memastikan, yang benar adalah *mengubah*, bukan *merubah/merobah* sebab bentuk itu bermula dari kata *ubah*, bukan *rubah/robah*, yang memperoleh imbuhan */me-/*.

Jadi, apa masalahnya? Sepintas kelihatannya tidak ada yang sungguh mengganggu, sebab kasus itulah yang disebut salah kaprah—satu soal yang boleh dibilang ”lumrah” belaka dan tidak dengan serta-merta mengganggu komunikasi. Apakah gejala yang dekat dengan anomali ini mengganggu atau tidak dalam sebuah proses komunikasi, saya tidak tahu persis. Namun, inilah yang ingin saya sebut sebagai paradoks dalam berbahasa.

Adakah perbedaan apakah sebuah kata ditulis *frustrasi* atau *frustasi*?; *mengubah* atau *merubah/merobah*? Juga apabila sebuah kata yang seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf awal kapital, tetapi ditulis dengan huruf kecil—atau sebaliknya. Apakah ada beda pemaknaan pada kedua cara ungkap tersebut? Jawabnya pasti amatlah gampang: tak ada beda alias sama belaka, *idem ditto*. Atau dengan lain perkataan, sekalipun di sini kaidah bahasa diabaikan, proses komunikasi tidak jadi terganggu.

Kedua varian pada pasangan-pasangan kata tersebut, dalam tindak berbahasa cukup kerap dipakai berganti-ganti dengan sesuka hati. Boleh jadi tidak banyak pengguna bahasa, dalam hal ini penutur dan lawan bicaranya, yang sungguh-sungguh peduli terhadap soal itu. Tidak penting, rasanya, bagi banyak orang itu, entah ditulis *frustrasi* atau *frustasi*, *mengubah* atau *merubah/merobah*. Atau dalam bahasa anak muda sekarang yang terkesan gagah: ”Kalau saya mau pakai *frustasi* dan *merobah*, lalu kenapa?!” Tampaknya di sini berlaku

asas yang sudah kita maffhumi itu: yang penting bisa dimengerti. Betapapun pesan toh sampai.

Justru di situlah letak paradoks yang saya maksud. Para penulis dan terutama penyunting, termasuk kita dan para pengguna bahasa umumnya, yang sudah "berjerih payah" menyelaras-nyelaraskan bahasa yang dipakai dengan menuruti ketentuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar boleh jadi merasa kecewa dan gemas. Sebab, cakrawala harapan mereka dan kita dalam berbahasa berbeda dari, bahkan sering bertolak belakang dengan, penerimaan dari sudut pembaca atau lawan bicara yang kebanyakan tak peduli tadi. Pada tataran ini jugalah kita bisa berbicara tentang sesuatu yang "mengganggu". Mengganggu dalam arti, satu pihak merasa seperti bertepuk sebelah tangan di mana dalam sebuah proses komunikasi pihak A dan B tidak menempati posisi yang setimbang. Sebagai paradoks, gejala mendua seperti itu tampaknya lebih mudah kita dapati pada ragam bahasa tulis. (Tak terbayangkan, bukan, bila seseorang sesekali mesti menyebut bahwa kata-kata tertentu dalam ujarannya memakai huruf besar?)

Gejala yang tadi saya sebut dekat dengan anomali itu seakan-akan menghadapkan kita pada semacam kesia-siaan tersebut sebab oleh ketiadaan, tepatnya penafian aturan-aturan bahasa. Saya sebut "paradoks", sebab di satu sisi, ada desakan yang cukup kuat terhadap para pemakai bahasa (tulis) agar senantiasa waspada betul terhadap rambu-rambu kebahasaan. Namun, pada saat yang sama kewaspadaan dia itu tidak ditanggapi secara sepadan, tidak punya daya yang cukup untuk meyakinkan bahwa inilah bentuk yang patut dibangun, dan kemudian diteladani.

Maka untuk apa sebetulnya kita bersikukuh, mengotot, mendesak-desakkan sikap normatif? Buat apa pula berpayah-payah menata tata kata, tata kalimat, dan tata bahasa yang tertib?

11. Polisi Kitab

Salah satu ciri menonjol pada polisi bahasa adalah kesukaan mereka mempersoalkan tata cara penulisan kata. Mereka punya semacam kegetolan yang berlebihan pada apa yang menurut mereka merupakan bentuk baku. Pengetahuan, yang kemudian menjadi kepercayaan, mereka tentang baku atau tidak bakunya satu bentuk kata sering disandarkan pada kitab *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI).

Sering dilupakan adalah fakta bahwa kita terkadang berhadapan dengan pilihan yang tak bisa dibilang gampang, *justru* karena ikut-ikutan membuka kitab itu. Coba, anda pilih mana: *reak* atau *riak*? Kedua-dua bentuk ini dapat kita lihat tercatat (dengan rumusan sedikit berbeda) di dalam KBBI.

reak *n* lendir yang keluar dari kerongkongan atau dari saluran pernapasan

riak² *n* lendir yang keluar dari tenggorok pada saat terserang batuk; dahak

Juga, mana yang jadi pilihan anda: *perai* atau *prei*? Keduanya pun kita dapati di dalam kitab pegangan polisi bahasa tadi.

perai² *v cak* 1 tidak masuk bekerja, sekolah, dan sebagainya; libur: *pada hari besar nasional karyawan --*; 2 tidak usah membayar; gratis: *makan dan tempat tinggal –*

prei /*préi*/ *n cak* libur, bebas, tidak melakukan sesuatu

Kemenduaan KBBI seperti tecermin pada pencantuman sekaligus dua cara penulisan untuk satu kata di atas, *tanpa* rujuk silang yang menunjuk ke bentuk baku, tidak saja sedikit menggoyahkan kepercayaan kita, tetapi barangkali juga boleh dibaca sebagai tanda yang sangat jelas: sifat arbitrer bahasa menyiratkan bahwa bahasa dalam banyak hal tidak bersangkut paut dengan soal benar atau salah. Jadi, semacam pilihan bebas.

Dalam hal demikian, polisi bahasa sama sekali tidak punya kewenangan memaksa, atas nama hukum (bahasa) sekalipun. Benar begitu? Ya. Pasti. Sebab, hukum dalam bahasa bukanlah hukum positif yang punya watak memaksa dan punya implikasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam hukum positif dikenal apa yang disebut fiksi hukum. Ini adalah asas yang menganggap semua orang, tak terkecuali orang kebanyakan, paham akan hukum (*presumptio iures de iure*). Selain itu, dikenal pula asas buta hukum tidak bisa dimaafkan (*ignorantia jurist non excusat*).

Jangan lupa, bahasa bersifat arbitrer, dibangun atas dasar kesepakatan bersama di kalangan pemakainya. Karena itu, “hukum” di sana lebih dekat ke etiket, lebih banyak berurusan dengan soal kepatutan daripada perkara benar salah.

Dari situlah saya kira kita kemudian mengenal ungkapan “Bahasa Menunjukkan Bangsa”. Melalui pembacaan sebuah tulisan, kita bisa menduga dari golongan masyarakat mana penulisnya berasal. Lagi pula, tak pernah ada penulis yang bahasanya berantakan, serampangan, masuk bui. Paling jauh ia mendapat sanksi sosial berupa penilaian orang bahwa bahasa dalam ucapan atau tulisannya buruk.

Dan buruk tidaklah sama sebangun dengan salah.

12. Kaidah yang Goyah

Sejak duduk di bangku sekolah menengah, kita sudah mengenal “kaidah kpst” dalam pelajaran bahasa Indonesia, tetapi kini konsep sederhana itu rasanya menyisakan jauh lebih banyak kebingungan daripada pengertian yang memadai.

Kaidah ini mengatur kata dasar berhuruf awal *k*, *p*, *s*, dan *t*, manakala mendapat awalan *me-* atau *pe-*, huruf di awal itu akan hilang atau luluh. Namun, ada beberapa bentuk yang menyimpangi kaidah itu, yang sumbang, tetapi mendapat sebutan lebih sopan: perkecualian. Anehnya, dalam beberapa kasus, penutur bahasa Indonesia umumnya justru pernah lebih akrab dengan perkecualian atau anomali itu. Contoh: *mengkilat(p)*, *mempesona*, *mempengaruhi*, *mempercayai*, dan *mempopulerkan*.

Belum jelas benar, apakah karena menyandang predikat perkecualian atau karena sudah lama telanjur dipakai, tatkala kaidah kpst absen, yang terjadi malah tidak terasa menyimpang. Alah bisa karena biasa? Bandingkan contoh-contoh tadi dengan bentuk yang mematuhi kaidah, tetapi malah terkesan ganjil: *mengilat(p)*, *memesona*, *memengaruhi*, *memercayai*, dan *memopulerkan*.

Segolongan orang berpandangan, itu karena belum terbiasa saja.

Belakangan yang kita lihat adalah hal sebaliknya: semakin kuat kecenderungan nenuruti kaidah kpst. Sejak edisi I (1988), II (1991), III (2001), hingga edisi IV (2008) KBBI mencatat *mengilat*, *mengilap*, dan *memesona*. Ada pula yang tidak konsisten. Misalnya, dalam edisi I tercatat *memopulerkan* dan *memengaruhi*, dalam edisi II berubah jadi *mempopulerkan* dan *mempengaruhi*, lalu dalam edisi III dan IV kembali seperti edisi I, alias berbalik patuh. Yang berikut ini agak unik: edisi I mencatat sekaligus *memerkosa* dan *memperkosanya* serta *memercayai* dan *mempercayainya*. Bentuk patuh *memerkosa* dipertegas dalam edisi II, III, dan IV. Namun, *mempercayai* dipilih edisi II sebelum berubah jadi *memercayai* dalam edisi III dan IV.

Kecenderungan KBBI mengingkari anomali juga tampak pada sikap edisi III dan IV yang memilih *mengondisikan* dan

mengampanyekan. Edisi I dan II belum merekamnya. Bentuk *mensinyalir* dalam edisi I, II, dan III berubah menjadi *menyinyalir* dalam edisi IV. Pun *mensosialisasikan* dalam edisi I, II, dan III berubah jadi *menyosialisasikan* dalam edisi IV.

Hanya ada dua anomali di semua edisi: *mengkaji* dan *mempunyai*.

Seperti melupakan bentuk yang berubah-ubah dalam KBBI tadi, ada saja yang menuding media massa berperan banyak dalam “merusak” bahasa Indonesia, atau setidaknya mengguncang apa yang sudah lazim—sebuah tudingan serius yang saya kira perlu punya cukup dasar. Maka, saya pun membuat riset kecil-kecilan guna memeriksa pelaksanaan kaidah kpst atas beberapa kata dalam *Kompas.com* dan *Tempo.co*, dua media massa nasional versi dalam jaringan.

Dalam kadar berbeda, tetapi konsisten, *Kompas.com* dan *Tempo.co* mendua, patuh sekaligus ingkar terhadap kaidah kpst. *Mengkilat-mengilat*, *mempesona-memesona*, *mempengaruhi-memengaruhi*, *mempercayai-memercayai*, *mempopulerkan-memopulerkan*, dan *mensosialisasikan-menyosialisasikan* digunakan secara berganti-ganti.

Apakah “mengilat”, “memesona”, “memengaruhi”, “memercayai”, “memopulerkan”, dan “menyosialisasikan” di satu sisi patuh pada kaidah kpst, tetapi di sisi lain tidak mengindahkan bentuk perkecualian sesuai dengan hukum fonotaktik bahasa Indonesia atau tidak, itu adalah soal lain.

Kecenderungan KBBI menolak bentuk perkecualian kita lihat terekam juga dalam *Kompas.com* dan *Tempo.co*. Kapan kedua media ini pertama kali memilih patuh? Ini kata data: “Mengilat” (*Kompas.com*, 29/1/2008; *Tempo.co*, nihil), “memesona” (*Kompas.com*, 7/1/2008; *Tempo.co*, 27/4/2012), “memengaruhi” (*Kompas.com*, 8/1/2008; *Tempo.co*, 13/3/2012), “memercayai” (*Kompas.com*, 7/2/2008; *Tempo.co*, 10/4/2013), “memopulerkan” (*Kompas.com*, 10/1/2008; *Tempo.co*, 14/3/2012).

Dalam arti terbatas, dibanding *Tempo.co*, *Kompas.com* lebih dulu menafikan bentuk perkecualian. Penting kita sadari, jauh sebelum kedua media itu, sudah sejak 2001 KBBI menolak perkecualian, tetapi tidak *mengkaji* dan *mempunyai*. Yang menarik, *Kompas.com* malah berkali-kali memakai kata *memunyai*, bukan *mempunyai*, selama periode 11/6/2008—17/5/2014.

Bagi saya, justru karena terlihat gamang itulah media massa bukan bermaksud mengguncang asas perkecualian. Kegamangan ini lebih baik kita baca sebagai tegangan yang niscaya antara kaidah yang paradigmatis dan kebiasaan dalam bahasa yang hidup.

Saya sependapat dengan Jos Daniel Parera (*Tempo*, 18 November 2007) yang menulis, bahasa sebagai seperangkat kebiasaan bersifat anomali dan sebagai perangkat kaidah bersifat analogi. Kerangka berpikir paradigmatis menurut saya perlu demi mendapatkan bahasa yang bersistem. Namun, bila ia menyebut gerakan kembali ke kaidah kpst ini sebagai reformasi, saya pikir ia sudah rada berlebihan, mirip aktor politik pro-Orde Baru yang meneriakkan jargon reformasi itu keras-keras ketika rezim Orba roboh.

Bagian II

Tata Kata



Buku ini tidak diperjualbelikan.

1. Yang Datang dan Pergi

Banyak kata berseliweran, datang dan pergi begitu saja sering tanpa kita sadari. Berbarengan dengan hadirnya sejumlah kata baru lewat berbagai cara, sekian banyak kata lain mulai jarang dipakai, pudar, dan kemudian lambat laun lenyap. Bukan punah, kecuali apabila masyarakat pendukung atau penuturnya sudah tak ada lagi sehingga bahasa itu tidak berkembang lagi, seperti bahasa Latin atau bahasa Jawa Kuno.

Saya katakan *lenyap*, bukan *punah*. Sesuatu yang dikatakan lenyap, dalam kenyataan sering bukan punah (seperti beberapa spesies makhluk hidup purba), melainkan hanya luput dari pengindraan. Berpindah tempat (seperti ponsel atau dompet yang disambar copet).

Menjelang usia masuk sekolah dasar di Jakarta, sebelum 1965, saya sekali dua ikut Ibu atau Bibi dalam barisan, mengantre pada pembagian bulgur. Hari-hari ini *bulgur* sebagai kata (Turki: *bulgur*; Arab: *burghul*) boleh dibilang sudah amat jarang atau malah tak lagi pernah dipakai, kecuali jadi penghias kelengkapan kamus. Di sini saya kira menarik apabila kita punya data tentang berapa banyak kata dalam bahasa kita yang sudah terekam dalam kamus, namun tak pernah dipakai lagi alias sudah lenyap.

Sebaliknya, pada sekitar masa saya ikut mengantre tadi, bahasa Indonesia belum lagi mengenal sekian kata "baru" yang populer sekarang, seperti *spageti*, *piza*, *hamburger*, *gawai*, *daring*, *luring*, *pratayang*, *narahubung*. Sekian kata "baru" ini tentu saja hadir tidak dengan tiba-tiba dan tidak dengan begitu saja. Zaman baru datang sambil membawa banyak sekali barang atau konsep yang juga baru. Dan semuanya, barang atau konsep-konsep baru itu, memerlukan wadah berupa kata demi memudahkan manusia saling berhubungan dan bekerja sama.

Dalam kenyataan, riwayat pertautan kata dan makna sebenarnya melibatkan sebuah proses yang sedikit lebih subtil, bukan serupa panggung tempat sembarang kata bulat-bulat datang dan pergi.

Ada kata yang bertahan, tidak lenyap, tetapi sebagian komponen maknanya saja yang tanggal. Dan berbarengan dengan itu, salah satu nuansa makna beroleh pengerasan, menjadi lebih menonjol. Contoh yang baik saya kira adalah kata *seronok*. Tengok saja transformasi maknanya sejak dulu di sana hingga kini di sini. Begini kamus kita mendeskripsikannya: "menyenangkan hati; sedap dilihat (didengar dan sebagainya)", atau dalam rumusan lebih ringkas, "mengasyikkan, menyenangkan". Kini, dalam banyak data, *seronok* dipakai lebih dalam pengertian erotis, bahkan tak jarang jorok.

Begitulah, kata baru datang ke tengah pergaulan kita dengan tujuan tertentu, yaitu menjadi wakil benda-benda atau konsep yang baru. Bahasa di situ ikut dimutakhirkan sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan. Apakah nanti sebuah kata baru diterima, atau sebuah kata lama ditinggalkan—kata berikut maknanya yang labil—nasib mereka sepenuhnya berada di tangan kita, para penutur bahasa (Indonesia), bukan di tangan para pekamus atau perencana bahasa.

2. Rudin

Belum lama ini saya sadari satu tulisan saya, yang diminta untuk menyambut 65 tahun Program Studi Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, sedikit diubah oleh penyuntingnya. Sedikit, karena hanya berupa penggantian beberapa kata, tetapi ini barangkali dapat kita jadikan pintu masuk untuk melihat persoalan di sebaliknya yang boleh jadi lebih menarik.

Kita ambil beberapa contoh. “Bidikan kameranya *menjuju* (diganti jadi *menuju*) ke banyak hal,”. Contoh lain, “Masih dengan penjelasan yang *rudin* (diganti jadi *rumit*) buat kita”. Terakhir, “... dan saya mulai *gamam* (diganti jadi *gamang*):”.

Saya menaruh syak si penyunting tidak tahu arti *menjuju*, *rudin*, dan *gamam*. Dia mungkin mengira telah terjadi salah tik. Untung saja kata-kata tercetak miring dalam contoh pertama dan ketiga memiliki kedekatan makna alias bersinonim, meski tetap ada perbedaan makna yang tipis. *Menjuju* punya pengertian ‘terarah atau menghadapkan sesuatu ke’, sedangkan *menuju* berarti ‘mengarah atau bergerak ke’. *Gamam* mengandung pengertian ‘harap-harap cemas’, sedangkan *gamang* lebih dekat dengan ‘takut’, seperti rasa ngeri yang menyergap bila kita melongok ke bawah dari suatu ketinggian.

Akan tetapi, *rudin* dan *rumit*, alangkah beda! Dalam bagian tulisan itu saya tengah menyajikan contoh betapa kamus besar kita pekat diwarnai oleh keterangan yang sangat miskin, juga pada edisi perbaikannya. Kata *Belibas* oleh kamus besar diartikan begini: ‘ikan laut, *Siganus oramin*’ (edisi II). Lalu, pada edisi berikut dirumuskan seperti ini: ‘ikan laut, *Teuthis oramin*’. Kalau perbaikan hanya berupa penggantian istilah Latin, apa yang bisa kita peroleh dari penjelasan yang tetap *rudin*, sangat miskin—bukan *rumit*—macam itu?

Andaikata syak wasangka saya benar, bahwa si penyunting tidak memahami arti *menjuju*, *rudin*, dan *gamam*, sekurang-kurangnya dia tidak sendiri dalam ketidaktahuan akan arti kata dari bahasa sendiri. Beberapa waktu lalu seorang teman menanyakan arti kata *meromok*. Dia temukan kata itu dalam kumpulan cerpen Asrul Sani, *Dari*

Suatu Masa dari Suatu Tempat, dan orang yang dia tanyai banyak yang tidak tahu. Kata *meromok* itu bersaudara dengan *mendekam*, *mengeram*, *menggerumuk*, *mengokol*, *meringkuk*, dan *terperonyok*.

Jangan-jangan, semakin hari semakin banyak di antara kita yang semakin tidak dekat dengan bahasa sendiri. Dan, itu diperburuk oleh semakin banyaknya kata dan istilah asing yang menyelip ke dalam bahasa kita. Kemalasan berpikir sebentar demi menemukan sebuah kata dalam bahasa sendiri tak pelak mengakibatkan wacana di sekeliling kita disesaki kata dan istilah yang semakin tidak lagi terasa asing: *artikulasi*, *ekspektasi*, *formulasi*, *identifikasi*, *interpretasi*, *kapasitas*, *karakter*, *opsi*, *signifikan*, Kata serapan memang mengayakan kosakata kita. Namun, dimaui atau tidak, pemakaiannya yang terlampau kerap lambat laun berpotensi mengakibatkan sejumlah kata dalam khazanah bahasa Indonesia terlupakan.

Itukah yang memberi ide penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bahasa? Inilah lakon lain yang sebentar lagi disuguhkan kepada kita setelah RUU Antipornografi dan Pornoaksi. Ini negeri sudah sangat brengsek rupanya di mata para amtenar sampai-sampai cara berbahasa, berbusana, dan bergoyang penting ditata dalam sebuah undang-undang. Mereka tak percaya masyarakat sudah pintar dan masih punya susila. Mereka tak percaya masyarakat punya lembaga sendiri yang memungkinkan mereka saling menjaga, saling mengingatkan, dan, bila perlu, menjatuhkan sanksi.

Tujuh puluh delapan tahun silam, para pemuda se-Nusantara yang berkumpul di sebuah gedung Jalan Kramat Raya, Jakarta, elok sekali merumuskan pernyataan “menjunjung”—bukan “mengakui”—bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dan, kearifan mereka itu membuat saya tak pernah habis pikir, sampai detik ini.

3. Bulur

Kata adalah perangkat paling penting dalam komunikasi. Ia semacam kendaraan pembawa bongkah-bongkah gagasan. Ia menjadi wadah, atau wakil, segala macam hal dari benda-benda di alam sekitar hingga konsep yang sangat pelik. Bisa saja orang berkomunikasi tanpa sepatah kata pun, yaitu dengan bahasa isyarat. Namun, kualitas komunikasi di sana pastilah sangat terbatas. Seorang dosen filsafat dapat kita bayangkan akan mengalami kesulitan menjelaskan pikiran-pikiran Ki Ageng Suryomentaram atau Heidegger di depan kelas dengan ragam bahasa itu. Sebaliknya, seorang tukang parkir bisa dengan mudah menjalankan kerjanya walau tanpa berkata-kata.

Kata-kata berguna bukan saja untuk meyakinkan orang lain, seperti pada iklan penawar sakit kepala atau propaganda dan kampanye pemilihan anggota badan legislatif atau presiden. Lewat kata juga orang dapat menghidupkan pengetahuan, antara lain dengan memberi nama pada tiap gejala, baik yang kasatmata maupun tidak. Penamaan atau leksikalisasi ini adalah strategi manusia mencandra kenyataan.

Kata adalah tanda, tetapi sekaligus bisa menjelma jadi simbol. Tanda bersifat metonimis, sedangkan simbol metaforis. Meski tak pernah berhasil seratus persen meringkaskan kenyataan, sebuah kata hadir bukan tanpa alasan. Orang memerlukan kata sebagai wakil dari apa yang ada dalam pikirannya untuk disampaikan kepada orang lain. Kata *lapar* dalam bahasa Indonesia kita mengerti sebagai ingin makan. Tanda ada yang kurang dan minta isi. Seperti haus, ingin minum. Yang menarik, jarang kita dengar ungkapan *lapar akan pengetahuan*, melainkan *haus*, atau *dahaga*, *akan pengetahuan*. Kata (*lapar* dan) *haus* yang disebut terakhir itu bukan lagi tanda, melainkan simbol. Ia merujuk pada sesuatu di luar dirinya yang punya kemiripan makna. Dan faktor kemiripan di sini bukan kebetulan, tetapi terbangun dari mufakat yang menjadi syarat bagi keberhasilan sebuah komunikasi.

Bukalah *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kita dapati di sana lema *bulur*, sebuah kata dari khazanah klasik yang mengandung

arti “sangat lapar”. *Kebuluran* berarti kelaparan. Menurut Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, sang peletak dasar kamus babon bahasa Indonesia, anotasi *klasik* (*kl*) pada sebuah lema menerangkan bahwa lema yang bersangkutan diambil dari karya (Melayu) klasik. Barangkali fakta itu sebagian menjelaskan mengapa kata *bulur* amat jarang atau malah tidak pernah kita jumpai dalam pengalaman kita berbahasa sehari-hari.

Keadaan lapar pada derajat sangat itu rupanya pernah menjadi pengalaman (sebagian) penutur bahasa Indonesia sampai-sampai ada keperluan mengekalkan kata tersebut ke dalam kamus. Kelaparan telah menjadi bagian yang sukar diceraikan dari pengalaman bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda hingga hari ini. Dulu orang mengenal istilah HO alias *busung lapar*—singkatan dari satu kata bahasa Belanda, *hongerodeem*, yang rupanya berkerabat dekat dengan *honger oedema*. Sebutan untuk fenomena yang oleh penyelenggara negara dianggap bisa menyudutkan mereka itu sejak zaman Orde Baru lebih kita kenal dalam bentuk eufemisme: *gizi buruk*.

Dalam novelnya *Lapar*, Knut Hamsun menulis betapa lapar bisa membuat tokoh “aku” hampa pikiran, hampa perasaan. Dalam sebuah tulisannya, Samsudin Adlawi (2013) antara lain menyiratkan kepada kita soal pengaruh kedekatan penutur suatu bahasa dengan kenyataan pada penciptaan kata atau istilah: penutur bahasa Indonesia merasa perlu membedakan *padi*, *gabah*, *beras*, *nasi*, dan *menir*. Di sisi itu, tidak banyak kata dalam bahasa Indonesia untuk menggambarkan lapar.

Di dalam korpus <http://mcp.anu.edu.au>, kata *bulur* tidak kita temukan. Yang ada adalah bentuk turunannya, *kebulur* (“Pasa [sic!] masa itulah ikhtiar membeli beras dengan tiket itu dijalankan, itupun bahana kebulur itu masih terpak di dalam tiap-tiap hati, iaitu tiap-tiap hati yang di...”; “...takdirnya pada sesuatu masa kelak bangsa-bangsa asing itu merajuk tak malu berkedai atau berhaji lagi di kampung-kampung kita, tidakkah kita kebulur?”) atau *kebuluran* (“Nasib Pahang semasa ini sedang menanggung kebuluran, tetapi

kita tak boleh agak tinggal selama-lamanya begitu, kerana tanahnya masih luas dan hasil...”; “...kerja mengambil upahan atau gaji menolong rakyat-rakyat lapar kebuluran dalam masa kesusahan wang ini. Mudah-mudahan terpeliharalah daripada kacau...”).

Semua bentuk *bulur* kita lihat menyelip dalam teks-teks Melayu/Malaysia. Dan belum pernah kita temukan dalam pertuturan bahasa Indonesia sampai sekarang, kecuali dalam tulisan ini. Sekalipun demikian, saya pikir kita tidak perlu menaruh keberatan menyerap kata itu mengingat fenomena yang ia lukiskan dekat dengan pengalaman bangsa kita. Bila pun ada yang menampik, karena tidak pernah lagi kita pakai, tidak otomatis berarti bangsa kita tak pernah mengalami apa yang dilukiskan olehnya.

4. Gerbong

Semenjak pelayanan jasa angkutan kereta api listrik di seputaran Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi jauh membaik, kontan saya ikut dalam barisan penggemar angkutan umum murah nyaman itu. Selalu ada saja aspek penyelenggaraannya yang mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu. Hingga dewasa ini dapat kita saksikan banyak sekali perubahan ke arah yang lebih positif, menggembirakan. Bukan saja di dalam rangkaian gerbong kereta api yang sejuk, melainkan juga di lingkungan sekitar tiap stasiun yang dilewati atau dituju. Dengan satu dua perkecualian yang amat jarang, semua langkah penyempurnaan itu seperti menuju satu agenda: mengajak khalayak membiasakan diri bersikap tertib dan santun sambil bersama-sama berupaya menciptakan lingkungan yang aman bersih nyaman.

Berada dalam gerbong kereta yang tengah melaju, para penumpang terus-menerus disuguhi tayangan pandang dengar berisi beragam informasi remeh, tetapi dianggap perlu digemakan, misalnya tentang faedah aneka buah dan sayuran, guna gerak badan untuk manula lengkap dengan petunjuknya. Disajikan dalam kemasan menarik dengan durasi pendek-pendek lewat layar kaca yang menggantung di atap bagian dalam gerbong (tak semua gerbong punya layar kaca ini). Secara berkala tampak satu atau beberapa petugas lalu-lalang demi menjamin kenyamanan para penumpang, serta dua orang lagi petugas, seorang menyapu dan lainnya mengepel. Semua petugas kita lihat dalam seragam serta punya sikap dan bahasa tubuh yang patut. Tidak terlihat lagi pedagang asongan, pengemis, dan pengamen yang berseliweran bising seperti pada beberapa waktu lalu.

Di sisi semua itu, cukup sering berulang kedengaran siaran maklumat lewat pengeras suara yang rupanya berasal dari rekaman, mengumumkan bermacam-macam informasi. Tak jarang dalam volume yang cukup membuat telinga peka. Namun, tahukah anda bahwa kata *gerbong* tak pernah terdengar dari sana? Cukup bikin heran sebab hampir tak mungkin jawatan ini tidak mengenalnya.

Lingkungan ini mestinya akrab dengan senarai kata yang berhubungan dengan perkeretaapian (selain *gerbong*), seperti *bumel*, *lori*, *rel*, *masinis*, ataupun *lokomotif*.

Kata yang disebut terakhir, *lokomotif*, pun boleh dibilang tak pernah kita dengar di gerbong kereta listrik. Sebabnya tak lain, lokomotif pada jenis kereta listrik, bukan diesel, tidak berupa gerbong tersendiri, tetapi menempel pada, atau menyatu dengan, gerbong (yang terletak paling depan). Menurut kamus, lokomotif adalah kepala kereta api (yang menarik gerbong kereta). Pada zaman Soeharto, kita ingat, *lokomotif* kadang dipakai sebagai metafor untuk aktivis, penggerak. Dewasa ini, dengan pengertian sedikit berbeda, kata yang lebih sering dipakai adalah *motor* (penggerak). Yang pertama selalu mengambil tempat di muka (pemimpin, gembong, otak), sedangkan yang kedua bisa di belakang, tetapi tak jarang malah berada di tengah (aktivis, pegiat).

Tentang gerbong, tanpa melihat sendiri barangnya, yaitu apa yang diacu kata itu, orang boleh jadi akan menemui sedikit kesulitan dalam memahami artinya. Sebab, yang utama saya kira, kamus bahasa Indonesia memberi definisi melingkar. Kita baca di sana, *gerbong* adalah wagon kereta api (untuk orang atau barang). Lalu, apa itu wagon? Terbaca oleh kita, *wagon* adalah gerobak kereta api; gerbong. Namun, dari informasi yang cekak dan berputar-putar ini, kita bisa mendapat bayangan yang lumayan bahwa gerbong dan wagon punya kesamaan arti. Keduanya lebih kurang serupa gerobak, kendaraan angkut—untuk barang, hewan, tetapi bisa juga untuk orang—yang rupanya kotak kubus dan punya roda empat.

Kesamaan arti kedua kata itu tentu tak sempurna. Cukup sering kita menemukan konstruksi *gerbong makan* atau *restorasi*, tetapi tak pernah kita dapati wagon makan, bukan? KBBI edisi daring (dalam jaringan, *online*) tidak mencatat gerbong makan, tetapi bentuk itu ada dalam KBBI edisi IV (cetak, 2008). Di situ lagi-lagi kita menjumpai definisi melingkar: *gerbong makan* adalah restorasi, dan *restorasi* adalah gerbong kereta api yang dipakai sebagai tempat

makan (restoran). Redaksi KBBI daring rupanya sedikit berbeda: gerbong kereta api yang dijadikan restoran.

Dalam tangkapan awam, *gerbong* adalah bagian dari kereta api. Baca saja pemerianya oleh kamus, *kereta api* adalah kereta yang terdiri atas rangkaian gerbong (kereta) yang ditarik oleh lokomotif, dijalankan dengan tenaga uap (atau listrik), berjalan di atas rel (rentangan baja dan sebagainya).

Jadi, mengapatah gerbong seperti asing bagi jawatan kereta api (listrik) kita? Pastilah bukan karena kata itu bisa membangkitkan ingatan kolektif bangsa Indonesia tentang Gerbong Maut yang mengangkut pejuang Republik tawanan Belanda untuk dipindahkan dari penjara Bondowoso ke penjara Koblen, Bubutan, di Surabaya pada November 1947. Dan, kiranya juga ini bukan ekses dari peningkatan kualitas pelayan jasa angkutan umum murah nyaman itu.

5. Tata Kata

Di pengujung 2006 terbitlah *Tesaurus Bahasa Indonesia* (seterusnya disingkat TBI) yang menghadirkan sebanyak mungkin kata yang bertalian makna dalam bahasa Indonesia. Kamus ini mengandaikan pemakainya tidak sedang mencari penjelasan arti sebuah kata. Ia ingin membantu pemakainya mendapatkan *pertama*, ungkapan yang tepat untuk suatu konsep. Atau *kedua*, kata dengan nuansa makna yang paling cocok dalam konteks tertentu. Saya membayangkan pengguna TBI adalah mereka yang sudah selesai dengan urusan makna, tetapi terdorong oleh keperluan mencari tahu kata apa sajakah yang bersinonim atau memiliki pertalian makna dengan kata yang sudah di tangan.

Pernah saya agak khawatir kamus *Tesaurus Bahasa Indonesia* ini kurang diapresiasi, sebab rupa-rupanya ada juga yang tidak dapat menerima sesuatu yang berbeda dari sebatas yang mereka kenal. Ada pengkritik yang terganggu oleh pemakaian kata “tesaurus”, sebab—ia mengambil model tesaurus Peter Mark Roget—pengelompokan kata dalam TBI tidak didasarkan pada hubungan ide dan konsep. Hubungan ide dan konsep ini menyebabkan cara penyajian semua anggota yang bertalian makna dengan sebuah lema tidak dijabarkan secara alfabetis seperti TBI, tetapi berdasarkan kedekatan makna. Dari situ disimpulkan, TBI tidak dapat disebut tesaurus.

Bagi saya, cara berpikir deduktif seperti itu menunjukkan logika yang rada bengkok. Yang menjadi jelas dengan sendirinya dari situ, pertanggungjawaban yang saya sisipkan dalam “Tentang Tesaurus Ini” tidaklah dibaca dengan baik. Sekadar catatan, setelah memutuskan akan menerbitkan TBI, hal pertama yang saya kerjakan adalah membaca kembali, selain buku-buku teks semantik leksikal dan leksikografi, juga belasan kamus dan tesaurus dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, serta membandingkannya satu sama lain. Soal yang ingin saya ketahui adalah batas cakupan isi serta bagaimana isi tersebut disajikan.

Yang menarik, cara penyajian TBI yang dipandang “menyimpang” itu malah ditiru begitu saja oleh sebuah tesaurus

dalam bahasa Indonesia lain yang terbit kemudian, hanya berdasarkan pertimbangan “kini banyak tesaurus yang dikemas berdasarkan abjad”. Bahkan “alfabetis” sebagai model penyajian pun dijadikan bagian dari judulnya! (lihat *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*, susunan Pusat Bahasa, 2009.)

Tujuan TBI sederhana saja, yaitu mempertontonkan seberapa kaya khazanah kosakata bahasa Indonesia—inilah makna tesaurus sebenarnya—sembari memberi kemudahan bagi para penggunaanya di dalam mendapatkan kata yang mereka perlukan. Hampir 16 ribu lema, beserta sublemanya, tidak saya jumpat begitu saja dari belantara konsep dalam ingatan yang serba terbatas, kendati kadang ada juga tuntutan untuk itu, tuntutan menemukan sendiri kata(-kata) yang bertalian makna dengan sebuah lema. Dengan kata lain, TBI mendayagunakan sekaligus belasan kamus, dua di antaranya yang paling penting adalah *Collins English Thesaurus in A-Z Form* (1993) dan *Merriam-Webster's Collegiate Thesaurus* (1993), sebagai upaya menghimpun sebanyak mungkin sinonim dan hiponim sebuah lema.

Pada akhirnya saya mengambil sikap praktis yang dibimbing oleh tujuan semula (memudahkan pengguna), yaitu dengan cara meneladani Collins dan Webster: pengelompokan kata pada keduanya tidak didasarkan atas hubungan ide dan konsep, lalu juga, gugus sinonim sebuah lema disusun alfabetis, bukan berdasar kadar kedekatan makna dengan lema. Dan mereka dengan enteng menyebut bukunya tesaurus! TBI belum menyertakan antonim semata karena persoalan teknis, tetapi kelak saya sertakan dalam edisi revisi sedang saya kerjakan.⁸ Yang ingin saya katakan, pengertian tesaurus tidaklah melulu merujuk pada model Roget.

Dari pengalaman, entah berapa puluh ribu jam menyelusupnyelusup di dunia kata yang tercetak dalam belasan kamus, yang merampas porsi waktu, pikiran, dan tenaga paling banyak adalah pekerjaan membuat pengelompokan kata berdasarkan kedekatan makna. Saya memerlukan ketelitian ekstra—suatu kemampuan yang

8 Sudah terbit di bawah judul *Tesamoko: Tesaurus Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.

saya sadari sangat rentan terhadap pelbagai pengaruh dari luar—dalam menyoroti dan secara konsisten menimang-nimang anasir makna apakah yang membedakan tiap-tiap kelompok atau gugus sinonim sebuah kata. Pertanyaan paling mengganggu: sampai di mana batas kedekatan makna antara satu kata dan lainnya.

Berikut adalah sebuah ilustrasi. Kata *ideal* tidak kita temukan baik dalam *Kamus Sinonim Bahasa Indonesia* Harimurti Kridalaksana (1988) maupun *Kamus Sinonim Antonim Bahasa Indonesia* Nur Arifin Chaniago dkk. (2000). Penjelasan atas kata ini oleh kamus lain kurang terang. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*—sejak 1988 hingga 2002 sudah dicetak 16 kali dan diperbaiki dua kali—hanya memerikannya sebagai adjektiva dengan keterangan: “sangat sesuai dng yang dicita-citakan atau diangan-angankan”. Ini agak mirip dengan penjelasan kamus Badudu-Zain (1994): “memuaskan karena cocok dengan keinginan”. Sementara kamus Poerwadarminta (1976) merumuskan kata itu sebagai “yg dicita-citakan atau diangan-angankan, sesuai dng yg dikehendaki atau diinginkan”.

Tidak berkecil hati karena penjelasan yang cekak pada kelima kamus di atas, saya kemudian melanglang ke kamus-kamus lain dalam bahasa Inggris, bahasa asal kata itu. Mulailah saya memburu dan mengumpulkan kata-kata yang bersinonim atau memiliki pertalian makna dengan *ideal* dalam satu wadah, dan kemudian memilah-milahnya berdasarkan lingkungan atau medan makna tertentu dengan menggunakan perangkat analisis komponen makna.

Harus buru-buru saya akui betapa *Tesamoko* masih sangat jauh dari sempurna sebagai sebuah buku rujukan primer. Rumpang di sana-sini sangat mungkin bukan dibuat oleh beberapa teman yang membantu, sebab mereka banyak menggarap hal-hal teknis yang tidak selalu berhubungan dengan isi kamus ini. Sejak hari pertama menerima nomor contoh, sudah saya rasakan bahwa saya membutuhkan mata, telinga, dan kepekaan yang jauh lebih besar.

6. Memakai "Tesamoko"

Lewat pembacaan acak atas respons pembaca edisi pertama, saya bisa menduga ada sebagian dari mereka, pemakai kamus dan tesaurus, yang menurut saya kurang telaten, yaitu tidak membaca teks-teks pengantar. Padahal, di sanalah penyusun mempertanggungjawabkan apa-apa yang ia pikir dan kerjakan dengan kamus atau tesaurusnya. Izinkanlah saya di sini sedikit menerangkan soal itu, dalam hubungannya dengan *Tesamoko, Tesaurus Bahasa Indonesia Edisi Kedua*.

Sudah sejak edisi pertama saya bekerja bukan dengan terutama bersandar pada teori (leksikografi), melainkan pada kebutuhan pengguna yang saya bayangkan. Dalam bayangan saya, pengguna itu adalah mereka yang, seperti saya, berkecimpung di dunia tulis-menulis dalam bahasa Indonesia. Sering menjadi persoalan buat penulis adalah mendapatkan kata atau ungkapan yang tepat untuk melukiskan konsep atau pengertian tertentu. Kita melihat di situ, kata adalah jantung tulisan, wakil yang membopong ide-ide penulis.

Sebanyak 29.866 lema dan sublema dalam *Tesamoko*, 4.106 di antaranya tambahan/baru, adalah senarai kata yang saya himpun dan susun berdasarkan hubungan makna antara satu dan lainnya. Dalam *Tesamoko* hubungan makna itu tampak dalam wujud sinonim (padanan makna, *bisa-dapat*), antonim (lawan makna, *dingin-panas*), hipernim (kata umum, *orang tua*), dan hiponim (kata khusus, *bapak, ibu*). Dengan penyajian seperti ini, saya berharap dapat memberi peluang seluas-luasnya kepada pemakai mendapatkan kata paling cocok yang ia perlukan. Bukan saja lewat senarai sinonim-antonim serta hipernim-hiponim, melainkan terutama berkat nuansa makna sehalus-halusnya yang coba saya rekam. Contoh:

usang a sin

1 a arkais, kedaluwarsa, lawas (*Jw*), obsolet, tua, uzur **b** kolot, konservatif, konvensional, kuna, lama, tradisional

2 a aus, bapet, bejat, buruk, busuk, butut, lapuk, lotak, lusuh, puih, rebeh (*Jk*), reput, reyot, rombeng, rongso**k b** rusak

Lihatlah. Ada dua arti *usang*, dan masing-masing masih dapat diperbedakan antara gugus (a) dan (b). Di titik inilah saya kira perlu kamus dipakai sebagai pendamping, sebab *Tesamoko*, seperti tesaurus lain pada umumnya, tidak memberi takrif, definisi, sebagaimana kamus.

Saya membayangkan, para penulis atau pemakai *Tesamoko* sedari mula bukan ingin tahu, dan tidak terlampau peduli, kata apakah yang paling dekat pertalian maknanya dengan suatu lema. Ia lebih berhasrat mendapat satu kata paling cocok dan sesuai dengan keperluannya, entah berdasar pertimbangan makna entah dari segi bentuk atau pembunyian. Dan pilihannya itu tidak bisa tidak sangatlah subyektif.

Dalam hal demikian, *Tesamoko* tidak mendesak-desakkan sebuah kata tertentu supaya dipilih. Ia hanya menyajikan serenceng kata yang saling bertalian makna di bawah satu kata yang menjadi lema serta menyerahkan kebebasan kepada pemakai memilih kata yang ia perlukan. Tepat atau tidaknya pilihan si pemakai bukan lagi menjadi urusan *Tesamoko*, sebab perbuatan memilih itu mestilah dibarengi dengan mengerti.

Di luar soal-soal yang berpaut dengan dunia semantik dan leksikologi, perbaikan terhadap tesaurus ini pun menjangkau sekian persoalan lain, pada tataran morfologi, misalnya. *Tesamoko* tetap memilih cara menulis *subyek* dan *obyek*, bukan *subjek* dan *objek*, sebab kedua bentuk ini menuruti pola yang sudah sangat kita kenal: *proyek* dan *trayek*, bukan *projek* dan *trajek*. Dua bentuk yang pertama saya kira lebih kuat menunjukkan sifat sebagai bentuk beku. Edisi revisi ini juga memilih cara menulis "*pelihatan*", bukan "*penglihatan*", sebab kaidah morfofonemik bahasa Indonesia tidak mengenal penambahan nasal /ng/ dalam pengimbuhan *pe-an* pada kata dasar berhuruf awal /l/. Ini sepola dengan *pelarian*, *peluluhan*, atau *pelipatan*, bukan *penglarian*, *pengluluhan*, atau *penglipatan*.

Begitulah. Dengan sedikit hal sederhana yang saya perkatakan di atas, judul *Tesamoko* yang saya pilih boleh dikata merupakan penegasan akan dua hal: pertama, keunikan: *Tesamoko* adalah tesaurus ala Moko—bukan tesaurus ini atau itu; dan kedua, menyatakan sebuah sikap atau pendirian.

7. Pesona Bicara Canggih

Kata *memesona*, kita sama tahu, bersaudara kandung dengan *memukau*. Keduanya punya daya yang sanggup membuat orang senang, jatuh cinta, kagum, takjub, tergilagila pada sesuatu. Bagi saya, dan bagi penutur bahasa Indonesia zaman sekarang umumnya saya kira, dua kata ini pertama-tama mengantarkan pengertian “mencuri hati”. Namun, siapa nyana bahwa pada satu saat dalam satu kurun di masa lampau, pengertian seperti itu adalah makna yang ditambahkan kemudian. Artinya, “mencuri hati” bukan arti yang pertama, mengingat kedua kata tadi punya lebih dari satu arti. Penjejeran arti seperti inilah yang masih kita lihat pada pemerian oleh *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hingga edisi IV (2008, seterusnya disebut KBBI)—jika kita periksa dalam hubungannya dengan kata dasar keduanya.

Baca saja takrif *pesona* dan *pukau* dalam KBBI:

pesona n 1 guna-guna; jampi; mantra (sihir); 2 daya tarik; daya pikat

pukau n 1 ki tepung (dr biji kecubung dsb) yg dipakai untuk memabukkan atau menyebabkan orang tidur nyenyak (dipakai oleh pencuri); 2 daya tarik; pesona.

Perlu segera saya susulkan sedikit catatan. Poerwadarminta tidak menyatakan arti pertama *pukau* sebagai “ki (kiasan)”, tetapi “sb (sebangsa) tepung dst” dan Bapak Kamus Bahasa Indonesia itu pun belum menyertakan arti kedua baik *pesona* maupun *pukau* (periksa *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet IV, 1966). Menurut KBBI, *memesona* sangat menarik perhatian; mengagumkan, dan *memesonakan* 1 mengenakan pesona (kpd); menjampi; 2 mengagumkan; memukau. Lalu, *memukau* 1 menggunakan pukau (untuk memabukkan atau membius orang); 2 ki mengakali; menipu; 3 menarik hati; memesona; 4 mengagumkan.

Kata *memesona* dan *memukau* pada dewasa ini pertama-tama mengantarkan pengertian “mencuri hati”, bukan lagi “menjampi-jampi” atau “membius dengan niat jahat”. Oleh sebab itu, tidaklah jadi terasa ganjil bagi kita urutan makna *pesona*, *pukau*, dan *memukau* dalam KBBI?

Akal sehat membimbing kita sampai pada pengertian bahwa dari sekian arti kata dalam kamus, tidak bisa tidak pengguna punya anggapan bahwa arti kata paling umum atau sah adalah pemerian yang tersaji dalam arti pertama. Mengapa tata urutan itu tidak dibalik, diselaraskan dengan makna yang sudah bergeser?

Kita lihat sebuah contoh lain. Pemerian atau definisi kata *bicara* oleh KBBI (masih) seperti ini.

1 *n* akal budi; pikiran: *dl menghadapi segala hal selalu dipergunakan budi — nya*; 2 *n* cak perundingan: *rasanya tidak perlu diadakan — lagi*; 3 *v* beperkara; berurusan: *orang yg membawa barang larangan itu akan dibawanya — kpd hakim*; 4 *n* kl pertimbangan pikiran; pendapat: *spt — Tuan, hamba pun demikian*; *pd — patik*; 5 *v* cak berbahasa; berkata: *sedikit — banyak bekerja*; 6 *a* sedang dipakai untuk bercakap (*dl telepon*): *sudah tiga kali saya menelepon, tetapi selalu dijawab ” — ”*; 7 *a* cak *Jk* tanggung, tentu (*pasti*): *kata penjual durian itu, ” — ” tebal dan manis*.

Bukankah kini *bicara* pertama-tama berarti “berbahasa, berkata”, sebuah kata kerja yang menjadi arti kelima di sana, dan bukan sebuah kata benda? Mungkin juga nomina, tetapi saya kira bukan “akal budi”; “pikiran” melainkan “perkataan”, atau bisa juga “pembicaraan/perundingan”.

Tampaknya tidak sedikit kasus yang menunjukkan rasa enggan atau alpa kamus resmi bahasa Indonesia di dalam mengikuti, dan kemudian merekam, pergeseran makna sebagaimana tecermin dalam tata urutan polisemi.

Setidaknya sepanjang beberapa tahun terakhir, ini contoh lain lagi, kata *canggih* amat populer. Namun, pastilah bukan pertama-tama dalam arti “bawel” seperti KBBI menyajikannya.

1 banyak cakap; bawel; cerewet; **2** suka mengganggu (ribut); **3** tidak dl keadaan yg wajar, murni, atau asli; **4** *Tek* kehilangan kesederhanaan yg asli (spt sangat rumit, ruwet, atau terkembang); **5** banyak mengetahui atau berpengalaman (dl hal-hal duniawi); **6** bergaya intelektual.

Dengan sedikit bawel sebab menyertakan sekian kutipan di sana-sini, tetap saya mesti akui, ada jejak Sutardji Calzoum Bachri dalam “Pesona Bicara Canggih”, judul tulisan ini. Marilah di menit ini kita menengok pemerian kata *jejak* di kamus, sebab jangan-jangan

8. Merdeka

Kujalani apa adanya

Aku bahagia

Bebas lepas tanpa beban

Aku merdeka

(Steven & Coconuttreez, “Bebas Merdeka”)

Sembari mengetik, saya cukup sering membuka sekaligus beberapa layar lain di komputer jinjing untuk menjelajahi situs-situs penyedia bacaan referensi, musik, dan kadang film—semua gratis—serta tentu saja media sosial.

Beberapa waktu lalu aktivitas mengetik mendadak mesti saya hentikan karena sebuah lagu lama. Dulu itu, sekarang masih, saya tertarik karena yang saya dengar adalah langgam *reggae* ala Bob Marley dalam sebuah lagu berbahasa Indonesia (Steven & Coconuttreez, 2005). Namun, kali ini saya lebih tertarik pada judulnya, “Bebas Merdeka”.

Mungkin anda bertanya, bukankah dua kata itu bersinonim? Kenapa tidak dipakai satu saja, tetapi ini malah ditaruh bersandingan? Agak sukar kita membedakan makna dua kata yang sangat serupa itu. Apa perbedaan di antara keduanya? Atau apakah keduanya identik sempurna—sebuah gejala kebahasaan yang langka? Langka, juga dalam bahasa Indonesia, apalagi menimbang ada rupa-rupa pengimbuhan dalam bahasa kita yang mengubah arti.

Penjajaran dua kata bersinonim seperti itu tentu bukan hal baru. Bahasa Indonesia kita sudah lama mengenal bentuk majemuk *duka lara* atau *hancur lebur*, misalnya. Tidak bersinonim mutlak, tetapi cukup jelas kata kedua mempertegas, mengeraskan arti kata yang pertama, atau sebaliknya.

Barangkali malah menguntungkan bahwa bahasa (Indonesia) tidak punya sinonim absolut. Bahasa jadi terhindar dari ancaman kehilangan pesonanya yang penting. Sebaliknya, yang kita dapati adalah khazanah rumpun kata yang sekadar punya kedekatan

maknawi, tidak sama mutlak. Ini beberapa contoh: tolong-bantu, kejadian-peristiwa, atau itu tadi, bebas-merdeka.

Ada hal lain yang perlu kita garis bawahi pada kwatrin lagu Steven & Coconuttreez di atas. Selalu larik “Aku merdeka” didului baris “Bebas lepas tanpa beban”. Ada paralelisme *bebas lepas* dengan frasa yang dijadikan judul lagu, *bebas merdeka*. Lihat jugalah, *merdeka* di sana punya kesejajaran makna sekaligus dengan tiga bentuk lain: *bebas*, *lepas*, serta *tanpa beban*.

Konstruksi *bebas merdeka* mengantarkan kepada kita pengertian bahwa ada sesuatu yang tidak terikat oleh atau tergantung pada apa pun di luar dirinya. Boleh juga dirumuskan dalam bentuk lain: *otonom*. Bung Karno menyatakannya dalam akronim *berdikari*.

Merdeka atau *bebas* oleh Steven & Coconuttreez diartikan sebagai lepas atau bebas dari sesuatu yang entah memberatkan entah mengekang—persis seperti Indonesia merdeka, yang bebas dari penjajahan Belanda pada 17 Agustus 1945.

Kita tengoklah, kebebasan dalam “kebebasan berbicara” atau “kebebasan berserikat” sama belaka dengan kemerdekaan. Namun kemerdekaan Indonesia terasa oleh kita agak berbeda dengan kebebasan Indonesia. Ini menimbulkan pertanyaan, apa persisnya perbedaan *bebas* dari *merdeka*?

Setidaknya ada dua aspek pembeda yang dapat kita kenali. Pertama, kehadiran (atau ketiadaan) unsur penghambat/pembatas. Dalam data kebahasaan mudah kita temukan bentuk-bentuk seperti pasar bebas, terjun bebas, alam bebas, pergaulan/seks bebas. Beberapa contoh terbatas ini mengantarkan pengertian bahwa *bebas* berkait dengan keadaan sangat longgar, leluasa, malah cenderung bebas sebeb-as-basnya, liar. Semua kecenderungan itu tidak kita temukan dalam *merdeka*, yang lebih dekat ke keleluasaan tanpa menjadi liar. Barangkali pemahaman seperti inilah yang menjadi pertimbangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memilih istilah kurikulum merdeka, bukan kurikulum bebas.

Kedua, *bebas* punya komponen makna “sudah tidak ada lagi”. Ini kita dapati dalam bentuk-bentuk seperti bebas bea, bebas alkohol, atau bebas racun, misalnya. Tentang kebebasan, Isaiah Berlin membedakan *bebas dari* dan *bebas untuk*.

Sampai di sini bolehlah kita bertanya, apakah kemerdekaan Indonesia searti dengan pesan lagu reggae tadi, yakni bebas dari dan bukan bebas untuk. Bisa begitu, tetapi tampaknya ini berlaku hanya untuk menit-menit ketika teks proklamasi dibacakan Sukarno di halaman rumahnya (sekarang Gedung Proklamasi, Jakarta) dan beberapa saat sesudahnya.

Dalam konteks (bahasa) Indonesia, *merdeka* pernah sama sebangun dengan *bebas dari*. Kini saya kira pengertian begitu perlu dirumuskan kembali. Di alam merdeka sekarang kita sedang menyaksikan sebuah perubahan penting.

Segelintir pembenci (baca: warga Indonesia yang merdeka) pemerintah yang sah di era lalu terus-menerus dihantui kemungkinan bernasib sama dengan pendahulunya (diculik, disekap, dianiaya, dihabisi karier atau bahkan hidupnya). Kini, kelompok serupa itu bebas untuk berbuat apa saja, tanpa momok rasa ngeri sedikit pun.

Dulu, kita mengenal bukan merdeka melainkan bebas becak atau bebas buta huruf. Kini, yang lebih patut kita idamkan adalah bebas buta adab. Merdeka!

9. Dua Tentang

Perbincangan berikut bermaksud kembali membicarakan tentang kata *tentang*, setelah Masmimar Mangiang, pemerhati bahasa Indonesia yang telaten dan jernih, menulis soal yang sama dalam catatannya (berjudul “Tentang ‘Tentang’”) di media sosial fesbuk, 26 Juli 2015. Perlulah saya utarakan di sini, barangsiapa tidak melihat masalah dalam kalimat pertama tulisan ini, saya kira ia belum, dan karenanya sangat perlu, membaca tulisan Masmimar tadi. Tampaknya baik saya ringkaskan lebih dulu pandangan Masmimar tersebut dan baru kemudian merentangkannya sedikit lebih lebar.

Masalah kebahasaan di kalimat awal—yang bersinggungan dengan tulisan Masmimar—itu terletak pada frasa “membicarakan tentang”. Boleh kita menduga, orang yang rasa atau kepekaan bahasanya tipis kurang menyadari ada persoalan di sana. Seperti dia yang kurang menyadari adanya jarak yang sangat jauh antara *tentang* yang punya arti (1) *perihal, mengenai* dan yang bermakna (2) *lawan, tolak*. Dan karena itu, mestinya ada dua kata *tentang*. Soal ini nanti kita bincangkan lagi. Atau kurang peka menangkap beda *miskin, melarat, kere* dari *duafa, fakir*. Terasakah oleh anda nada rada kasar dan merendahkan kelompok kata bersinonim yang pertama? Kelompok yang kedua, kita rasakan, lebih sejuk sebab memberi perhatian, simpati.

Kembali ke perbincangan kita, saya setuju dengan pendapat jitu Masmimar: “Membicarakan’ adalah kata kerja transitif, kata kerja yang selalu diikuti objek, dan di antara kata kerja transitif dengan objek itu tidak diperlukan preposisi (seperti ‘tentang’).” Senada dengan ini adalah konstruksi “membahas tentang”.

Bagaimana bisa *tentang* menyerobot masuk ke wilayah “terlarang” itu? Saya pikir di situ ada pengaruh atau interferensi dari cara ungkap berbeda untuk maksud yang sama. Lihatlah dua pasang konstruksi ini:

membicarakan (tentang) kata *tentang* – pembicaraan tentang kata *tentang*

membahas (tentang) kata *tentang* – pembahasan tentang kata *tentang*

Hadirnya *tentang* yang mubazir di antara kata kerja transitif dan obyek tadi saya kira akibat terjadinya semacam korsleting di otak. Asosiasi, pikiran, atau ingatan si penutur tanpa sadar menaut pada bentuk “pembicaraan tentang” dan “pembahasan tentang”. Di tengah proses merumuskan ide, antara lain memilih kata yang tepat dan mereka-reka kalimat dengan awal “membicarakan” yang pas, secara mendadak pikiran membelok, tergiring ke semacam pola pengalimatan yang sudah tercetak di dalam kepala. Prosesnya kira-kira serupa roda kereta api yang berjalan di atas simpangan rel, berkelok mendadak menyimpangi arah semula.

Melihat kata *tentang* lebih dekat lagi, bakal kita jumpai satu soal yang lain. Dalam banyak konteks, tadi sudah saya singgung sambil lalu, *tentang* punya dua kelas kata dengan dua arti. Sebagai partikel ia punya arti *perihal*, *mengenai*, dan sebagai verba *tentang* berarti *lawan*, *tolak*. Yang menarik, bila mendapat imbuhan, keretakan makna menjadi tampak kentara. *Menentang*, yang semakna dengan *melawan*, *membandel*, *membangkang*, *memberontak*, *memerangi*, *memprotes*, *mendurhaka*, sama sekali tak lagi punya pertalian makna dengan *tentang* dalam arti *perihal*, *mengenai*. Di sini *tentang* dan *menentang* sudah saling menjauhi, sama-sama minta cerai. Juga menarik adalah, kata *mengenai* sebagai partikel searti dengan *tentang*, sementara sebagai verba ia punya makna *kena*, *mengantuk*, *menyenggol*, *menyentuh*, *menyinggung*, *menyerempet*.

Berbeda secara mendasar dengan *tentang* (partikel) dan derivatnya, *menentang* (verba), yang artinya jadi sangat berjauhan, *mengenai* (partikel) dan *kena* (verba) masih punya hubungan yang rapat, berada di medan makna yang sama. Maka berbeda dari *Tesaurus Bahasa Indonesia* edisi I dan kamus bahasa Indonesia, dalam *Tesamoko*, *Tesaurus Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, saya tak lagi menempatkan beberapa gugus kata yang berkerabat dengan *tentang* sebagai polisemi, melainkan memilahnya ke dua kata *tentang* sebagai homonimi.

10. Heran

Jangan anda heran bila kata *heran* bikin heran seperti yang saya alami tatkala berjumpa lagi dengannya sewaktu membaca ulang TBI selagi mengerjakan perbaikan untuk edisi revisi. Heran, sebab di sana kata ini tercatat berkerabat dengan *ajaib* dan *aneh*. Sambil memanggul heran, saya memeriksa kembali beberapa kamus bahasa Indonesia, rujukan saya dalam menyusun TBI edisi pertama. Hasilnya? Tentu mudah ditebak. Semua kamus bahasa Indonesia pada saya menyuratkan, *heran* punya arti serupa atau bersinonim dengan *ajaib* dan *aneh*.

Yang tidak begitu membingungkan, pada menit perjumpaan kembali tadi serta-merta saya menganggap penyandingan *heran* dengan *ajaib* dan *aneh* itu sungguh ganjil. Apalagi kemudian saya mendapati fakta agak berbeda, setelah memeriksa lebih jauh ke data, korpus dari laras bahasa jurnalistik, yaitu empat media dalam jaringan (daring, *online*)—*Kompas*, *Pikiran Rakyat*, *Tempo*, dan *Waspada*—dan satu dari laras bahasa sastra (goenawanmohamad.com), secara sekilas. Pada kata *heran* dalam semua korpus itu tidak saya jumpai pengertian-pengertian *ajaib* dan *aneh*. Sejauh yang saya tangkap, *heran* yang tercatat di sana lebih dekat ke *bingung* atau *takjub*. Itulah maka kini saya berani berkata, *ajaib* dan *aneh* tak lain dan tak bukan adalah pangkal atau sebab yang memunculkan rasa *heran*, tetapi bukan heran itu sendiri. Heran saya yang sesungguhnya adalah mengapa kedua kata itu bisa dengan gampang menyelundup ke dalam “rumah” *heran* di edisi pertama TBI.

Baru saja kita melihat, makna sebuah kata dalam kamus tidak selalu akurat atau sama sebangun dengan makna sebagaimana ia memancar dari sebuah konteks dalam pemakaiannya oleh pengguna bahasa. Bolehlah kita mengatakan, perselisihan keduanya langgeng, sebab bahasa selalu berkembang. Makna selalu bergeser, padahal kesanggupan kamus merekam dinamika bahasa berhenti pada menit saat ia mesti terbit sementara manusia terus-menerus mengeksplorasi bahasa demi banyak sekali keperluan.

Saya pikir senjang atau selisih itu tidak mesti berhubungan dengan soal perbedaan watak antara kamus yang statis dan bahasa yang dinamis.⁹ Semacam pengakuan kamus kita bahwa *ajaib* dan *aneh* bersaudara dengan *heran*, dan diingkari oleh bahasa yang hidup, sama sekali tidak ada hubungannya dengan pergeseran makna (yang belum sempat terekam kamus). Jadi, apa sebab kata *ajaib* dan *aneh* bisa tercatat di dalam rumah *heran* di edisi pertama *TBI*?

Izinkan di sini saya mengajak anda menengok ke belakang barang sebentar. Saya kira, saya sudah agak terkecoh oleh contoh dalam kamus. Poerwadarminta (*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan keempat, 1965): "Tidak heran kalau dia marah". Atau ini: "Heran, dng gaji sekecil itu, orang itu masih bisa hidup di kota besar" (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, 2008). Kita baca dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Badudu dan Zain, 1994): "Heran bahwa dia tidak mati dl kecelakaan yang hebat itu". Dua dari beberapa teman yang saya mintai bantuan dalam kerja merevisi punya pendapat menarik setelah saya sodori contoh serupa tapi tak sama, "Heran, jelek tapi sombong."

Yanwardi Natadipura, penulis masalah kebahasaan yang luas dan tajam wawasan linguistiknya, malah balik mengirim tanda tanya retorik kepada saya. "Yang heran 'kan penutur, ya, bukan obyek yang jelek." Pikiran senada yang sedikit lebih terurai saya dapat dari Uu Suhardi, koordinator redaktur bahasa di majalah *Tempo* dan redaktur bahasa *Koran Tempo*, majalah *Matra*, *U-Mag*. "Gampangnya begini: saya heran 'kan beda dg saya aneh." Lalu ia menambahkan, "Itu (contoh dari saya di atas) 'kan ada yg lesap (bahasa lisan). Lengkapnya: Saya heran, dia jelek tapi sombong." Demikian korespondensi mereka dengan saya lewat *sandek* (pesan pendek, SMS)—salah satu media kami bertukar pikiran dalam bekerja.

Jadi, jangan anda heran bila *ajaib* dan *aneh* tersisih dari lema *heran* dalam *TBI* edisi revisi nanti.

9 Tentang soal ini, tengok tulisan saya, "Pesona Bicara Canggih", *Kompas* edisi 10 Januari 2015

11. Dari VOC ke Bahenol

Penduduk Nusantara sudah mengenal bentuk singkat kata setidaknya sejak 1602 ketika VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie, Kongsi Perdagangan Hindia Timur) membuka jalan bagi masuknya imperialisme Belanda di zamrud khatulistiwa. Singkatan memuat satu unit pengertian utuh, maka ia punya perilaku persis kata. Seperti kata, kemunculan singkatan didorong oleh keperluan pengguna bahasa mendapatkan tanda atau lambang yang bisa mewakili idenya guna mengungkapkan sesuatu. Isi tanda atau lambang itu berpaut erat dengan zamannya.

Dalam hasil kajiannya yang luar biasa, *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*, Harimurti Kridalaksana (2009) antara lain memerikan ada 45 pola kependekan kata (abreviasi) dalam bahasa Indonesia, dengan rincian: singkatan punya 16 pola, akronim dan kontraksi 16, penggalan 6, dan lambang huruf 7 pola. Sampai hari ini kesukaan memakai singkatan semakin marak di tengah khalayak, terlebih di kalangan anak muda, dalam lisan dan tulis, lewat berbagai rupa media.

Ditilik dari bentuknya, penciptaan beraneka singkatan dan akronim itu semakin tidak menuruti pola yang mudah kita petakan, menjadi semacam isyarat enggan patuh pada keteraturan. Sejak pemolaan oleh Harimurti, hingga kini, siapatah lagi yang masih terus mengikuti dan kemudian mencatat perkembangannya? Saya kira mungkin saja muncul sejumlah pola baru yang belum terperikan oleh upaya Harimurti Kridalaksana.

Dilihat dari kandungan maknanya, singkatan yang hidup di kalangan anak muda sangat kaya, dari pengalaman yang dekat dengan dunia mereka (GALAU: 1. gelisah antara lanjut atau udahan; 2. gue akan lakukan apapun untukmu) sampai dunia politik (parpol: persatuan artis dan politikus; PKB: paman keponakan berseteru). Semangat berseloroh, main-main, amat menonjol (selingkuh: selingan indah keluarga utuh; ARDATH: aku rela ditiduri asal tidak hamil; ATM BII: asal tidak mengandung berselingkuh itu indah; bahenol: badan hebat otak nol). Mungkin menggelikan, tetapi

jelas sekali mereka mempertontonkan hasrat memberontaki segala tata aturan (asusila: asal suka silakan) sambil pada saat yang sama mengolok-olok segala apa yang menurut mereka menyalahi norma umum.

Pertumbuhan kependekan kata yang cenderung "liar" tersebut tak heran mengakibatkan para pembela bahasa yang tertib dan majelis mencibir, mengkritik dengan keras. Di barisan terdepan, ada kelompok yang mengeras, cenderung alergi, menolak tanpa ampun kehadiran segala bentuk kependekan kata.

Sebagai artefak bahasa, tadi sudah saya singgung, kependekan kata dapat menjadi semacam dokumentasi sejarah. Pada era Sukarno, misalnya, Rocky Gerung (2014) menulis, "Sukarno mengeksploitasi akronim untuk tujuan politik menggerakkan massa. Melalui akronim, psikologi massa dikendalikan. Ada perintah di dalamnya. Misalnya Trikora (Tri Komando Rakyat) dan Kogam (Komando Ganyang Malaysia). Atau, dalam upaya memberi sugesti pada politik massa, Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat) dan Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunis)". Sementara itu Hendri F. Isaeni (2010) punya pandangan, "Akronim . . . tumbuh subur di masa Orde Baru (baca: masa Soeharto) karena rezim represif ini membatasi hak untuk memiliki pandangan berbeda atau kebebasan berekspresi. Maurer menyebutnya 'ejekan bawah tanah'."

Sudah kita lihat, kajian Harimurti Kridalaksana yang berharga tentang bangun kependekan kata belum lagi selesai. Juga aspek semantik (pragmatik) yang meninjaunya sebagai respons penutur bahasa Indonesia terhadap situasi tempat mereka hidup. Tak berhingga banyaknya kasus baru yang muncul dalam perkembangan mutakhir.

Kedua soal ini saya pikir melayangkan undangan terbuka kepada para ahli dan pemerhati bahasa, yang berkeras memberangus, untuk menyingkap masih banyak soal di sana.

12. Singkat Kata

Kependekan kata atau lebih lazim disebut singkatan pernah membuat gundah sekelompok pemerhati bahasa Indonesia karena pemakaiannya, terutama di media cetak dan media sosial, dianggap sudah sangat keterlaluan sampai-sampai mengancam bakal merusak bahasa Indonesia. Bagaimana bisa bahasa Indonesia—rumah bersama segenap penduduk Indonesia—menjadi rusak oleh pemakaian singkatan? Apakah yang mendorong orang memendekkan kata?

Bagi sebagian orang, ketika pikiran berjalan lebih cepat dari perbuatan menulis, atau bicara seorang narasumber lebih laju dari pencatatan oleh penanya, dorongan menyingkat kata sukar dihindari. Maka meluncurlah bentuk-bentuk singkat *yg* (yang), *th* (tahun), *sbg* (sebagai), *sdg* (sedang), *dst* (dan seterusnya). Namun, singkatan mungkin juga hadir karena ada keperluan menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan, atau unsur kimia. Sudah lama kita mengenal lambang huruf, seperti *gr* (gram), *l* (liter), *m* (meter), *kg* (kilogram), atau *Fe* (ferum). Singkatan dapat pula terbentuk karena ada keperluan menyimbolkan sesuatu, memadatkan nama diri. Misalnya, akronim *ABRI* (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), *Ikapi* (Ikatan Penerbit Indonesia), dan *FISIP* (fakultas ilmu sosial dan ilmu politik).

Di negeri yang kebanyakan kalangan melek hurufnya lebih menghargai "singkat" dalam pengertian segera, jalan pintas daripada hemat, padu, praktis, kita melihat produksi singkatan cenderung bertumbuh pesat. Sampai sekitar sepuluh tahun lalu saja—tercatat dalam sebuah kamus yang mengambil data dari sumber-sumber tercetak (Parsidi, 1994)—kependekan kata dalam bahasa Indonesia sudah mencapai jumlah lebih dari 33.000 (belum termasuk dari ragam bahasa slang yang berbau porno dan kurang sopan). Saya mendapat kabar baru-baru ini, pada 2009 jumlah itu sudah membiak jadi 57.000!

Malah judul *Akronim*, *Inisialisme*, dan *Singkatan* tadi dapat menjelma akronim *Aids*. Akronim judul itu seperti hendak mengatakan bahwa singkatan dapat dipadankan dengan sejenis virus maut. Barangkali ada benarnya bahwa kegemaran menciptakan

akronim dan singkatan kini sudah terlampau berlebihan, malah kadang mencerminkan kemalasan tanpa nalar.

Singkatan dan akronim mudah sekali kita temukan berserak di media massa dan media sosial. Pemakaiannya, apalagi sampai merajalela, di media massa tak pelak punya dampak hebat menularkan dengan cepat kegandrungan menyingkat-nyingkat kepada khalayak luas. Media sosial punya dampak lebih hebat lagi. Fakta bahwa lewat media sosial seseorang dapat menyampaikan isi kepala dan isi hatinya serentak kepada banyak orang lain dengan seketika jelas menyediakan jalan bebas hambatan buat singkatan menyebar sampai sejauh-jauhnya. Belum lagi bila kita perhitungkan efek gema, bagaimana satu bentuk yang diterima seseorang diteruskan olehnya kepada sekian banyak orang lain, dan begitulah seterusnya proses penyebaran berlangsung dalam efek ganda.

Apakah lalu kita dapat menyimpulkan bahasa Indonesia terganggu, atau malah rusak, karenanya? Saya tidak begitu saja percaya. Munculnya sekian banyak singkatan bagi saya justru memberi satu bukti bahwa bahasa itu hidup, dinamis—ada kreativitas di sana.

Saya lebih percaya bahasa Indonesia sanggup menjaga diri sendiri dengan melaksanakan aturan main bagi dirinya, sebuah aturan yang sudah cukup berumur, sudah melembaga. Saya tidak percaya, sebab tidak pernah ada kaidah yang mengatur pembuatan singkatan. Tiap orang bebas membuat singkatan sesuka hati, satu hal yang agak mirip dengan neologisme dalam laras bahasa gaul yang umumnya fana. Ini membawa argumen berikut, semua bentuk singkatan tunduk pada hukum dasar bahasa, yaitu kesepakatan atau konvensi, syarat mutlak bagi keberterimaan dan kelangsungan hidup mereka.

Singkat kata, berapa pun jumlah singkatan lahir setiap hari, mereka pasti tersaring alamiah dari sebuah kancah bernama bahasa Indonesia. Dan, karena sudah dijinakkan, pastilah tak bakal merongrong. Apalagi merusak.

13. Bahasa Baku, Catatan Ala Kadarnya

Dari mana asal kata-kata yang berdiam dalam kamus? Sebagian besar darinya adalah hasil kerja mencari dan menimbang kata dari sejumlah teks terpilih, selain dari khazanah lisan. Tentang lika-liku kerja besar itu kita baca dalam buku Simon Winchester yang memukau, *The Professor and the Madman*, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan Serambi beberapa tahun silam.

Penggarapan kamus yang monumental itu dimulai dengan pidato Richard Chenevix Trench di London Library pada 1857, kira-kira setahun setelah ia dilantik menjadi dekan Westminster. Dalam pidatonya, seperti ingin “mengoreksi” Samuel Johnson dan kecenderungan utama kamus yang terbit sekitar masa itu di tanah Anglo Sakson, Trench berpandangan, “Kamus hanyalah ‘sebuah inventaris bahasa’ dan sama sekali bukan panduan untuk menggunakan bahasa itu dengan baik. Tugas para penyusunnya bukanlah memilah-milah kata yang akan dimasukkan berdasarkan apakah kata itu bagus atau jelek.”

Kita jumpai pokok pikiran Trench seperti dicatat Winchester begini: “... setiap kamus besar yang baru harus merupakan produk demokrasi, buku yang memperlihatkan unggulnya kebebasan individu, pengertian bahwa seseorang dapat memakai kata-kata secara merdeka, sesuka hati, tanpa ditundukkan oleh aturan-aturan leksikal yang kaku.” Jelas bahwa kamus seperti itu “tidak boleh menjadi produk absolutisme serta otokrasi”. Winchester pun melukiskan betapa proses penyusunan dan buah kerja gila-gilaan beberapa orang genius eksentrik berupa *Oxford English Dictionary* tak jauh melenceng dari angan-angan Trench.

Semangat seperti itu boleh dibilang berseberangan dengan orientasi para perencana bahasa, yang tak jarang lebih banyak memikirkan soal pemurnian dan pembakuan bahasa. Awam suka memandang ragam baku itu kaku oleh sifat formalnya, kurang nyaman dipakai, bahasa kolot untuk guru bahasa Indonesia. Pembelanya akan berkilah, ragam tidak baku adalah bahasa pasar

yang banal, kasar, mencerminkan watak penggunanya yang kurang terdidik, sebab tampak tak kenal aturan.

“Murni” dan “baku” dalam bahasa rupanya punya kecenderungan menjauhi, atau sedikit banyak alergi terhadap, ragam bahasa lisan (dan bahasa daerah). Gerak menjauhi itu, dalam kasus bahasa Indonesia direpresentasikan oleh kamusnya yang besar. Itu dapat kita lihat setidaknya pada dua manifestasi: (1) semacam rasa enggan mencatat bentuk bahasa dari laras bahasa lisan dan/atau (2) menuliskannya secara berbeda dari pelafalan dalam kenyataan yang hidup. Pernah ada seorang dosen mencoret dan mengganti secara konsisten semua kata “tak” dan “bisa” dalam makalah tugas mata kuliah yang ia ampu dengan “tidak” dan “dapat”. Bisa juga kita bertanya, mengapa “ciamik”—sebuah kata yang cukup produktif—tidak terdaftar dalam KBBI. Atau, mengapa kamus yang besar itu memilih bentuk “sundal” bukan “sundel”, mencatat “capai” bukan “capek”. Dan daftar seperti ini dapat anda tambahkan sendiri sebanyak anda mau.

Dorongan, barangkali lebih baik kita sebut pretensi mencapai bentuk-bentuk baku dalam bahasa di sepanjang sejarahnya hampir niscaya harus berhadapan dengan pengingkaran oleh sebagian kalangan awam yang ingin terbebas dari “aturan-aturan leksikal yang kaku”, yang menolak absolutisme dan otokrasi. Penolakan itu sering tidak ada hubungannya dengan masalah cukup atau tidak cukupnya pengetahuan mengenai soal-soal linguistik. Sebab, ketika sedang berbahasa—yaitu cara manusia paling jamak dalam berkomunikasi—kita lihat, orang pertama-tama memakai intuisi dan akal sehat, bukan linguistik, ilmu bahasa, dan soal ejaan, misalnya. Dalam kalimat pendek, intuisi mendahului pengetahuan.

Para perencana bahasa, yang antara lain mengemban misi membakukan di lain pihak, kerap bekerja dengan nalar deduktif. Itulah mengapa bahasa baku banyak kali tak bersambung dengan bahasa yang hidup. Pertanyaan yang agak mengusik: baku itu apa ukurannya? Apakah baku identik dengan benar, dan tak baku dengan sendirinya keliru?

Nikolaos van Dam (2009) pernah menulis:

Kamus Besar Bahasa Indonesia ... mencerminkan opini dan interpretasi tim penyusunnya tentang bagaimana bahasa Indonesia semestinya menurut tata bahasa yang resmi. Bahasa Indonesia seolah-olah merupakan bahasa yang dibuat berdasarkan keputusan (yang pada tingkatan tertentu bisa dikatakan benar sejak 1928) ketimbang bahasa yang diserap dari kenyataan linguistik sehari-hari.

Fakta kebahasaan yang kita saksikan sampai hari ini: kedua laras bahasa, baku dan tak baku, hidup berdampingan layaknya sepasang suami-istri, sekalipun terkadang keduanya saling mengingkari, bahkan saling menistakan. Dan dari titik inilah kita bersua dengan fakta tidak terbantahkan: bahasa adalah penanda identitas pemakainya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bagian III

Makna yang Merewang



Buku ini tidak diperjualbelikan.

1. Bentuk Bersaing

Bentuk bersaing. Arti istilah ini kita lihat pada kemunculan dua kata atau lebih yang bersaing dalam praktik berbahasa sehari-hari. Namun, seperti mengingkari tabiat bahasa sebagai dilukis oleh istilah itu, kamus bahasa Indonesia dalam banyak kasus malah mematahkan semangat bersaing lewat penetapan (1) bentuk “yang ejaannya dianggap baku”, dan berseberangan dengan itu (2) bentuk “yang tidak disarankan pemakaiannya”.

Tidak jarang kita diharuskan menetapkan pilihan manakala mesti menulis satu kata di antara sejumlah variannya. Pilihan yang sungguh tidak bisa dibilang gampang, *justru* karena membuka kamus bahasa Indonesia. Bukan saja karena kamus itu mencantumkan sekaligus dua versi penulisan satu kata dengan makna yang sama, tetapi tidak menyertakan rujuk silang untuk menyarankan bentuk yang dipakai, seperti *reak* dan *riak* atau *perai* dan *prei*, melainkan juga karena mencatat bentuk bersaing dengan pretensi mendapatkan bentuk baku (biasanya diisyaratkan dengan rujuk silang). Namun, banyak yang tampaknya memerlukan penjelasan lebih lanjut. *Praktik-praktek*, *zaman-jaman*, *hakikat-hakekat*, *frustrasi-frustasi*, *napas-nafas*, *subjek-subyek*, *objek-obyek*, dan seterusnya.

Fenomena kebahasaan seperti itulah yang biasa disebut “bentuk bersaing”. Pada contoh senarai pasangan bentuk bersaing di atas, yang dianggap baku terletak di kiri, sedangkan yang tidak disarankan pemakaiannya alias dianggap tidak baku terletak di sebelah kanan. Jadi, apa yang susah pada penetapan pilihan tadi? Tinggal buka kamus, selesai.

Tidak begitu ternyata. Persoalannya tak berhenti sampai situ. Penetapan satu bentuk yang tampaknya diarahkan menjadi bentuk baku barangkali bukan tanpa alasan dan bukan bermaksud mematahkan semangat bersaing. Ada alasan dan dengan kehendak atau semangat “meluruskan”. Mengapa dipilih *praktik*, misalnya, padahal yang terasa lebih akrab, dan lebih hidup, adalah *praktek*? Hasan Alwi, dalam “Prakata Edisi Ketiga” KBBI menulis, “Pilihan

atas praktik itu didasarkan pada adanya deret *praktik, praktis, praktikum, dan praktisi*.”

Sekarang, kenapa *zaman*, bukan *jaman*? Kenapa *hakikat*, bukan *hakekat*? Kita lihatlah, *zaman* diserap dari bahasa Arab, sedangkan *hakikat* bermula dari *hakiki* (bukan *hakeki*), satu bentuk yang juga diserap dari bahasa Arab. Akan halnya *frustrasi*, kata ini diserap dari bahasa Inggris *frustration*. Maka, cukup alasan mengapa *frustasi* sebaiknya kita pinggirkan, sebab bentuk itu tidak bersesuaian dengan bentuk asalnya.

Agak membuat sangsi, atau bingung, adalah pilihan atas *napas*, bukan *nafas*. Padahal, di sisi itu, dipilih nafsu, bukan napsu. Dahulu, kita ingat, pernah hidup bentuk *faham* dan *fikir*, tetapi kemudian diganti menjadi *paham* dan *pikir*. Dua bentuk *paham* dan *pikir* ini cukup lama diterima dibandingkan dengan masing-masing variannya, sampai hari ini. Apalagi keduanya lebih ramah dan nyaman bagi penutur bahasa Indonesia manakala mendapat imbuhan. Mudah ditebak, orang banyak akan memilih *memahami*, *pemahaman*, *memikirkan*, *pemikiran* daripada *memfahami*, *pemfahaman*, *memfikirkan*, *pemfikiran*, bukan?

Dua pasangan bentuk bersaing lain yang juga masih terus bertarung cukup liat adalah *subjek-subyek*, *objek-obyek*. Sekadar catatan kaki, saya pilih *subyek* dan *obyek*, bukan *subjek* dan *objek*, sebab sudah ada beberapa pendahulunya: *proyek* dan *trayek*, yang tidak dieja *projek* dan *trajek*. Sejauh ini, kita belum mendapat penjelasan masuk akal kenapa yang dianggap baku adalah *subjek* dan *objek*.

Tadi saya katakan, bentuk baku adalah *frustrasi*, bukan *frustasi*. Pertimbangannya: kata ini diserap dari bahasa Inggris *frustration*. Boleh dipersoalkan apakah “berbeda dari aslinya” mesti dinyatakan “salah”. Kasus serupa, umpamanya, kita lihat pada bentuk *seronok*. Di rumah asalnya, bumi Melayu, dan di tanah Sumatera, kata ini bermuatan nilai positif, membawa pengertian “menyenangkan, mengasyikkan”. Namun, tengoklah penggunaannya yang luas di media massa. Boleh dibilang semua merujuk pada arti ‘erotis,

merangsang, jorok'. Siapa gerakan yang punya kuasa memutuskan mana arti yang paling “benar”—sepanjang tidak dilupakan bahwa hukum bahasa itu tak lain dari abstraksi yang ditarik dari gejala kebahasaan yang hidup di tengah para penuturnya?

Memilih kata, tadi sudah disinggung, tidak bisa dibilang gampang kadang *justru* karena membuka kamus bahasa Indonesia. Penting buat kita saya kira adalah menyadari bahwa persaingan antara bentuk yang berkeras jadi baku dan bentuk (varian) yang dipilih pengguna bersifat abadi. Tarik-menarik itu adalah sebuah keniscayaan. Biarlah penyelidikan tentang argumen di balik penetapan baku tidaknya sebuah kata menjadi porsi para linguis, ahli bahasa (Indonesia).

Ini bukanlah semacam ajakan berbahasa semau-maunya. Paling kurang, tersirat sudah saya nyatakan, memilih kata tanpa memahami alasannya adalah sikap yang agak naif.

2. Makna yang Merewang

Tidak pernah ada dalam sejarah, sebuah kamus dapat selesai paripurna dalam sekali pengerjaan. Kamus selamanya berkejaran dengan bahasa yang dinamis. Kata sebagai bahan bakunya hampir niscaya bukan saja terus bertambah, tetapi juga berpotensi berubah, baik dari segi bentuk maupun isi atau makna. Begitulah yang selalu kita saksikan. Sementara kata terus bergerak, terkadang dengan ringan dan gesit dalam konteks berbeda-beda, kamus yang berpretensi merekam semua itu mesti berhenti pada menit ia siap terbit.

Asumsi-asumsi itulah yang ada di balik penyusunan *Tesaurus Bahasa Indonesia* (TBI, 2006) yang dengan itu berusaha tetap berpegang pada asas ramah pengguna. Kata yang menjadi lema di sana tak jarang adalah kata sebagaimana ia hidup, lisan maupun tertulis, bukan melulu sebagaimana ia mesti diperlakukan sebagaimana yang lazim. Tepat di titik ini TBI sadar berada persis di tengah tegangan atau tarik-menarik yang niscaya antara kaidah dan praktik berbahasa, antara hukum dan kenyataan hidup. Ini menjelaskan mengapa TBI memilih *kucel*, bukan *kucal*, *lempeng*, bukan *lempang*. Dan nalar ini jugalah yang mendorong *Tesamoko*, TBI *edisi revisi*, membalikkan *kumal* ke *kumel* dan dari *sundal* ke *sundel*. Lain dari itu, *Tesamoko* menambahkan sejumlah kata lain, baru, yang cukup kental watak lisannya, seperti *ciamik*, *gaul*, *ngedumel*, dan *ngelunjak*.

Bersama TBI, *Tesamoko*—sembari memperbaiki banyak hal pada TBI, seperti menambahkan antonim, menertibkan korespondensi, yaitu memenuhi prinsip resiprokal (bila *memprediksi* tercatat bersinonim antara lain dengan *membaca*, maka di sublema *membaca*, *memprediksi* mestilah tercatat pula sebagai bagian dari sinonimnya), atau mengoreksi salah tik—sedapatnya berusaha memotret evolusi makna kata dalam bahasa Indonesia.

Barangkali kasus salah tik adalah soal kecil, remeh. Contoh. *Ranah* tercetak dalam TBI sebagai salah satu sinonim dari kata *senyap* dan *sepi*. Ini tentu saja sumbang yang fatal, sebab sama sekali tidak ada hubungan apa-apa antara kata itu dan dua lema *senyap* dan *sepi*. Itu

adalah salah tik, mestinya *ranap*. Ini adalah sekadar ilustrasi betapa edisi pertama rada sembrono, tetapi toh dicomot begitu saja secara brutal oleh tesaurus lain dalam bahasa Indonesia yang pernah ada.

Anton M. Moeliono sewaktu mengenalkan kembali kata *canggih* sekian tahun silam, saya pikir punya maksud memadankannya dengan, atau menjadikannya sebagai pengganti, satu kata dari bahasa Inggris, *sophisticated*. Sayangnya, kata yang sangat populer hingga kini itu tidak mendapat perlakuan semestinya dari kamus resmi bahasa Indonesia. KBBI edisi terakhir (IV, 2008) masih menyalin utuh pemerian edisi sebelumnya (III, 2001), yaitu dengan menaruh pengertian-pengertian *sophisticated* tidak di urutan pertama. Sementara dalam *Tesamoko*, sedikit memperbaiki TBI, saya menawarkan urutan-polisemi berbeda, kira-kira lebih mendekati pemikiran sekaligus lebih meladeni apa yang (saya kira) dimau Anton Moeliono tadi seperti ini.

canggih a *sin*

- 1 **a** berbelit-belit, elusif, kompleks, pelik, rumit, terik (*ki*)
 b *Tek* tinggi
- 2 banyak/ringan mulut, bawel, beleter, belu-belai, calak, celomes, celopar (*ark*), cerewet, ceriwis, gelatak, menyenyeh, nyinyir, rewel
- 3 iseng, jail (*cak*), panjang lidah, resek (*cak*), usil

ant a biasa **b** *Tek* sederhana

Selain itu, *Tesamoko* pun memutus pertalian makna *ajaib* dan *aneh* dengan kata *heran*, serta menanggalkan *ambisi*, *aspirasi*, *dorongan*, *hasrat*, *keinginan*, *kemauan* dari gugus sinonim *pretensi*.¹⁰ Dengan uraian sederhana ini mudah-mudahan menjadi lebih terang

10 Lebih jauh lihat "Pesona Bicara Canggih", *Kompas*, 10 Januari 2015, dan "Heran", *Kompas*, 6 Juni 2015.

maksud klausa "menangkap dan memerikan evolusi makna kata dalam bahasa Indonesia" tadi.

Akhirnya, tidak ada maksud *Tesamoko* menafikan kaidah. Kata bentukan *penglihatan*, misalnya, diperbaiki menjadi *pelihatan* demi sesuai dengan aturan ejaan bahasa Indonesia. Dalam kalimat pendek, *Tesamoko* membarui dirinya bukan semata-mata dengan ambisi menjadi lengkap, menjejalkan sebanyak mungkin kata "baru" (tiada yang baru di bawah matahari). Itu sebabnya, tak pernah ada dalam sejarah sebuah kamus dapat selesai paripurna dalam sekali pengerjaan.

3. Merah Putih

Upacara bendera, seingat saya, rutin kami jalani saban Senin pagi. Itu masa ketika saya duduk di kelas V dan VI di sekolah dasar partikelir di Matraman Raya, Jakarta Timur, akhir 1970-an. Pada masa itu, selalu menjadi bagian dari upacara adalah ”pembacaan” teks Sumpah Pemuda—sekarang rupanya sudah berganti dengan teks lain, Pembukaan UUD ’45 atau janji setia siswa. Ingatan berikut adalah kabar yang kita dapat beberapa waktu silam lewat media massa tentang sekelompok kecil warga negara Republik Indonesia yang berkukuh menolak menggelar upacara bendera di sekolah-sekolah. Namun, ingatan lainlah yang paling mengesan buat saya. Sampai hari ini.

Kelas VI. Bersiap mulai mengikuti pelajaran di dalam kelas sesuai upacara bendera pada satu Senin pagi, tiba-tiba Pak Guru bertanya, adakah di antara kami yang tahu arti merah dan putih pada bendera kebangsaan kita. Tidak perlu berlama-lama menunggu jawaban, Pak Guru menuturkan narasi mengenai soal tersebut. Itulah kali pertama saya mengerti, merah punya pengertian lain, yaitu berani, dan putih membawa serta arti suci—arti merah dan putih dalam konteks bendera kebangsaan kita.

Sangat mengesan, sebab penyematan makna-makna tambahan tersebut bagi saya begitu mengena. Juga, barangkali penjelasan Pak Guru waktu itu telah menowel sentimen nasionalisme saya, menyuburkan rasa bangga pada Sang Saka sambil mengingatkan perjuangan heroik segenap rakyat pada zaman revolusi kemerdekaan yang meminta sangat banyak darah demi kedaulatan bangsa dan negara sendiri.

Siapa yang menyematkan makna lain ke dalam merah dan putih (mula-mula) pada Sang Saka? Siapa yang telah memberi sayap pada kata?

Saya selipkan dalam tanda kurung ”mula-mula”, sebab hingga kini pun merah dan putih, baik sebagai kata maupun benda-benda, masih diimbuhi makna lain, bukan hanya soal warna. Matador

membawa selembar kain merah ketika bertarung dengan seekor banteng, demonstran umumnya menandai identitas mereka dengan pita merah, orang kalap sering digambarkan bermata merah. Merah yang punya konotasi tegas, jantan pun lalu menjadi ikon keberanian, perlawanan, pemberontakan. Putih, yang berpaut dengan khalis, bersih, terang, adalah warna yang lekat pada golongan rohaniwan, kalangan medis, atau perawan, malaikat, dan bidadari.

Arti kiasan atau arti konotatif umumnya tidaklah jauh dari arti "sebenarnya", yang disebut juga arti lugas, arti denotatif, atau arti leksikal, yaitu arti sebagaimana dirumuskan oleh kamus. Tidak jauh, sebab ia hampir selalu menautkan dirinya pada arti asali dengan mengambil satu dari sekian sulur atau percabangan arti.

Putih secara gampang kadang ditentang dengan hitam. Dan segi gelap, pekat pada hitam membiarkan asosiasi mengelana jauh sampai ke lembah, dunia, yang bukan saja gelap, suram, misterius—yang menyertakan rasa takut, jijik, dan sedih—bahkan lancung, buruk, jahat. Putih dan hitam sudah mewakili hero, protagonis dan durjana, antagonis.

Di tengah rentang antara hitam dan putih terletak warna abu-abu: daerah perbatasan yang tidak hitam tidak putih. Itu sebabnya abu-abu dengan mudah menampung sejumlah arti lain: tidak tegas alias gamang, ragu-ragu macam Hamlet, atau oportunis seperti tokoh Sengkuni. Aspek tajam sebuah benda yang menunjuk kesanggupan memenggal, mengiris lambat-laun meresap ke lidah, mulut, ucapan (yang jahat, melukai), pun ke otak, pikiran, ingatan (yang sanggup menganalisis, menguraikan) atau telaah, kritik, wacana (yang rinci, runtun, mengena).

Kata dengan arti kiasan yang diimbuhkan itulah "kata bersayap", sebuah ungkapan yang menegaskan, kata sewaktu-waktu bisa terbang meninggalkan makna asalnya, dan menjumpai makna(-makna) lain, sering sampai tersesap habis-habisan.

Jangan lalu menyergap dengan pertanyaan siapa suka selingkuh, kata atukah makna. Sebab, pertanyaan tadi pun belum sempat dijawab: Siapa, dan untuk apa, memberi sayap pada kata?

4. Mengomunikasikan atau Menyampaikan

Ada bolong, atau obyek yang absen, dalam takriflema *mengomunikasikan* (lebih banyak orang menuliskannya *mengkomunikasikan*) dalam kamus bahasa Indonesia. Begini kata kamus kita itu: “mengirim lewat saluran komunikasi; menyebarkan melalui saluran komunikasi”. Mengirim atau menyebarkan apa? Untungnya, benak kita sebagai penutur bahasa Indonesia menyimpan, dan kemudian menyodorkan, “informasi” untuk diisikan ke dalam bolong itu. Tanpa “informasi” sebagai obyek kalimat, rumusan arti lema *mengomunikasikan* tadi kurang lengkap.

Pertanyaan yang cukup mengusik adalah mengapa dewasa ini kata *mengomunikasikan* itu relatif cepat sekali populer dan dengan segera menepikan *menyampaikan*, sebuah kata yang sudah lebih lama kita kenal. Sebelum datang anggapan keliru, di sini saya menomorduakan atau menepikan kata *mengomunikasikan* bukan karena ia penghuni agak baru dalam khazanah bahasa kita.

Communicate oleh *Oxford American Dictionaries* dirumuskan kurang lebih begini: “berbagi atau bertukar kabar atau ide”. Dalam bahasa Indonesia, *mengomunikasikan* diserap bukan dari kata kerja *communicate*, melainkan dari kata benda *communication* yang diserap menjadi *komunikasi*. Dari sinilah ia kemudian mendapat imbuhan pembentuk kata kerja. Pola serupa kita lihat pada *mengonsumsi* yang bukan berasal dari kata kerja *consume*, melainkan dari kata benda *consumption*.

Sebenarnya semacam stigma penghuni “baru”, atau kata berbau “asing” itu tadi, pada dirinya bukan tidak bermasalah. Khususnya dalam bahasa, sulit sekali kita menetapkan batas persis antara asing dan asli (Lihat Moeliono, 2009 dan Berlian, 2014).

Bukan karena itu saya tidak memilih *mengomunikasikan*, tetapi *menyampaikan*. Juga bukan karena soal pengucapan, mengingat lidah penutur bahasa Indonesia umumnya mengalami sedikit kesulitan, atau katakanlah, kurang nyaman melafalkan kata itu. Bukan kebetulan bila rasa kurang nyaman pada alat ucap kita bisa

terjadi pada banyak kata yang datang belakangan: *mengampanyekan*, *mengonsolidasikan*, *mengoordinasikan*, *menstimulir*, *menyinyalir*.

Bagi saya kata *menyampaikan* lebih memadai karena dua alasan.

Pertama, dari bentuk dasar *sampai*, kata *menyampaikan* memberi tekanan pada hasil. Ia melukiskan proses pengalihan suatu obyek—bukan hanya informasi, tetapi bisa juga amanah, titipan atau benda-benda dari hibah, sumbangan sampai upeti—dari satu pihak kepada pihak lain hingga sampai. Pada kata *mengomunikasikan*, sebagaimana ia mendapat arti dalam kamus bahasa Indonesia, proses dan medium menjadi unsur makna yang menonjol. Kedua, sebagai jenis kata umum atau generik, spektrum makna *menyampaikan* sangat kaya. Corak kaya makna ini justru menguntungkan, sebab memberi sekian pilihan kepada kita demi mendapatkan satu kata paling cocok dengan keperluan di dalam menyampaikan, bukan mengomunikasikan, sesuatu kepada pihak lain.

Kita tilik kembali lebih dekat, *menyampaikan* punya pengertian ‘membawakan, membingkis, mengantar, mengirimkan, meneruskan, menyalurkan’—yang menyertakan asumsi “hingga sampai” itu tadi. Maka bila obyek kata ini tak sampai, boleh diduga ada yang salah, ada penyimpangan atau penyelewengan di sana.

Dalam kenyataan makna kata *menyampaikan* kita lihat berpotensi meresap ke kata lain. *Mendakwahkan* dan *mengkhotbahkan*, misalnya, tak lain adalah bentuk lebih ringkas dari “menyampaikan dakwah”, “menyampaikan khotbah”. Di dalam *mendakwahkan* dan *mengkhotbahkan*, kata *menyampaikan* hadir secara implisit, tetapi, tidak bisa kita ungkapkan dalam frase *mengomunikasikan dakwah* atau *mengomunikasikan khotbah*. Kita juga belum pernah menemukan bentuk *mengomunikasikan kritik* atau *mengomunikasikan tuduhan*.

Tidakkah kata *menyampaikan* itu luwes? Lebih kaya makna daripada *mengomunikasikan* dan, ini yang lebih penting, seperti punya mekanisme swakontrol, semacam pengawasan melekat, di dalam pengejawantahannya.

5. Tikus yang Tak Mati-mati

Ajakan "Yuk, kita tidur" yang diucapkan orang tua, bapak atau ibu, kepada anaknya yang masih kecil hampir pasti akan ditafsir lain jika orang tua itu mengatakannya kepada pasangan dia. Kata *tidur* dalam konteks kedua telah menyerobot porsi arti kata *berhubungan intim* atau *bersebadan*. Inilah aksi pembajakan yang dilegalkan dalam bahasa, antara lain karena perlu demi menyelamatkan muka dari malu. Sangat jarang orang menyatakan hasrat seksualnya secara telanjang—kepada pasangan hidup resminya sekalipun, apalagi bila hadir pihak ketiga, di tengah percakapan. Bahasa untuk mengungkapkan hasrat seksual lebih sering terselubung, dengan kata bersayap, seakan-akan bila lugas tanpa tedeng aling-aling, sebuah truk barang bakal tiba-tiba menumbuk si penutur dari muka tanpa ampun.

Orang boleh berspekulasi tentang apakah yang menumbuhkan kesantunan atau kepura-puraan atau kemunafikan itu. Bahasa yang telanjang, polos, untuk hajat yang satu ini dipandang vulgar. Berbeda adalah bahasa kiasan, yaitu cara lain menyatakan sesuatu (*tidur*, dan bukan *bersebadan*), seperti pemakaian metafor atau alusi yang mudah didapatkan dalam karya sastra.

Seperti indungunya, bahasa, kiasan terbentuk dari kesepakatan di kalangan penuturnya. Kesepakatan ini melibatkan proses tawar-menawar tiada henti yang menunjukkan betapa bahasa menyimpan sifat getas, ringkih. Persis seperti disuratkan oleh sebutannya: *kata bersayap*. Sayap di situ adalah atribut belaka, sesuatu yang ditambahkan. Ia mudah patah.

Pernah ada satu masa ketika banyak orang gemar memakai kata *bulan* untuk melukis cantik perempuan. Namun, kini tak perlulah linguistik statistik untuk mengatakan bahwa *bunga* diam-diam telah menyerobot peran kata *bulan* untuk keperluan yang sama, barangkali sejak Neil Armstrong membawa oleh-oleh gambar permukaan bulan sepulang dari sana pada 1969.

Akan tetapi, ada pula sayap kata yang relatif tak mudah patah. Tikus, yang dimaksud di sini tentu saja tikus got (*Rattus norvegicus*), untuk menyebut koruptor barangkali kurang jitu ditilik dari skala yang mereka ambil, dengan cara mengerikiti (tikus) atau menggerogoti (koruptor): seujung kuku cuwilan keju berbanding uang pecahan besar berkarung-karung.

Bahwa sampai hari ini orang banyak masih saja menggandrungi metafor tikus, tentulah itu bukan tanpa penjelasan. Perumpamaan selalu menyandingkan dua hal berdasar asas kesamaan, tetapi tak mesti sama seratus persen. Tikus tidak saja menyebalkan karena suka mencuri, tetapi juga menjijikkan, bikin mual, karena amat mesum, jorok, dan berbau busuk—sebuah metafor yang legit.

Kata *tidur* yang menyelubungi kata *bersetubuh* di awal tulisan tadi relatif awet, lebih lekap memeluk makna kiasannya. *Tidur* dan *bersetubuh* sama-sama berangkat dari asumsi bahwa kedua kata kerja ini menunjuk pada posisi tubuh berbaring. Selebihnya, bagaimana kata yang merujuk pada perginya kesadaran ke alam mimpi bisa mengantarkan asosiasi ke aktivitas penuh keringat dan berahi ialah perkara imajinasi yang doyan dolan ke mana-mana. Manipulasi pemaknaan ini saya kira lebih dari sekadar taktik menyelamatkan muka dari malu. Bukan melulu berurusan dengan kesantunan atau kepura-puraan atau kemunafikan.

Tadi saya singgung, bahwa bahasa yang telanjang, polos, apa adanya, untuk hajat yang satu itu dipandang vulgar, tak senonoh. Di sini, sesuatu yang dianggap kasar atau tidak patut telah disembunyikan, dijinakkan, dengan kata bersayap. Yang menarik, kata bersayap pada saat yang sama sanggup membuat lebih galak kata yang polos, bukan menyembunyikan atau menjinakkannya. Bukan menyelamatkan muka dari malu, tetapi malah mencelelotinya kuat-kuat.

Contoh? Ya, tikus got itu tadi. Tikus yang tak mati-mati.

6. Kampung Halaman

Banyak dari kita, saya kira, pernah punya “kampung halaman”, kampung yang penduduknya rata-rata memiliki rumah dengan halaman yang lapang. Inilah kata yang rujukannya diam-diam melindap, kata benda yang lambat-laun berubah menjadi konsep. Sesuatu yang kini mungkin sudah jadi kenangan--atau terdesak masuk ke dalam film, karya sastra, atau dalam potret berwarna sefia sedikit suram. Sesuatu yang menyiratkan kepemilikan dalam bentuk kata majemuk itu lama-kelamaan menjelma satu kata tunggal *kampung*, tanpa lagi embel-embel *halaman*. Ada ungkapan yang sangat populer pada musim liburan: “pulang kampung”.

Ke mana itu *halaman*? Kecuali di bilangan golongan berpunya atau kawasan milik negara, di bagian terbesar wilayah Jakarta, apa yang pernah kita kenali dengan sebutan halaman (rumah) umumnya sudah kikis oleh proyek MHT, yaitu proyek perbaikan kampung secara besar-besaran di Jakarta zaman Bang Ali pada dasawarsa 1970-an dan yang sampai sekarang masih berlanjut dengan menyandang nama lain yang nadanya menyatakan simpati kepada rakyat: penggusuran. Di banyak daerah lain, tanah pekarangan yang relatif cukup luas umumnya sudah terlepas dari rumah, dijual, entah untuk ongkos naik haji atau untuk menutup biaya kebutuhan hidup yang kian meningkat. Segera setelah halaman—tanah terbuka itu—beralih pemilik, ia pun beralih fungsi. Seorang teman, Marco Kusumawijaya, cukup sering mengungkapkan rasa masygul dalam sejumlah tulisannya betapa perubahan ekologi ini memberi sumbangan besar pada skala banjir yang meluas.

Kalau pun masih ada, masih menjadi bagian yang menyatu dengan sebuah rumah di satu kampung, halaman itu biasanya kecil saja, satu atau dua meter kali lebar rumah. Itu pun lebih sering dimanfaatkan buat tempat menaruh segala rupa rongsokan. Dulu para orang tua menyuruh anak mereka bermain “di halaman”, tetapi kini lebih sering kita dengar “di luar”. Dan luar, yang membawa konotasi, atau bertaut dengan kata usir, jarang memberi rasa aman nyaman. Halaman memberi ruang lebih lebar untuk privasi dan

keintiman. Luar membawa serta pengertian dingin”, memisahkan, mengecualikan, tetapi halaman itu hangat, merangkul, mendekatkan.

Secara gramatika, kata depan /ke/ rupanya dapat memanggil pulang kata *halaman*, dari “pulang kampung” menjadi “pulang ke kampung halaman”.

Jarang sekali kita temukan bentuk “pulang kampung halaman”. Di sini sekali lagi dapat kita tangkap nuansa makna *kampung*, dengan atau tanpa halaman. Kampung halaman itu bukanlah kampung dalam artinya yang jamak. Kerinduan, rasa kangen yang dibawa kata *pulang* pada “pulang ke kampung halaman” lebih berat mengaduk-aduk perasaan, lebih bermakna ketimbang pada “pulang kampung”—yang kini kita rasakan begitu cair, cemplang, tidak memberi kesan cukup berarti.

Kampung halaman saya kira lebih lazim dipandang sebagai ungkapan yang dimuati makna konotatif “tanah air”, “tanah kelahiran”, sekalipun tak salah juga bila ada yang menganggapnya sebagai kata, yang punya arti denotatif kampung dengan rerumah yang memiliki pekarangan luas. Konstruksi sebagai kata inilah yang tadi saya katakan “rujukannya diam-diam melindap”. Konstruksi dengan arti denotatif ini, baru saja kita lihat, tak lagi “bunyi” terutama karena apa yang ia rujuk kian surut dan kemudian hilang.

Halaman yang menghilang. Barangkali justru karena itulah “kampung halaman” kemudian mendapat tugas lebih sering menyandang makna konotatif itu tadi (tanah air, tanah kelahiran). Coba kita ambil bentuk lain sebagai pembanding yang bernasib lebih baik. *Kereta api* mulanya merujuk pada kereta yang lokomotifnya bekerja dengan api, yaitu dari batu bara atau kayu yang dibakar. Kini, rujukan itu telah berganti dengan kereta bermesin listrik atau diesel. Namun, bentuk kereta api masih hidup, masih terus dipakai berdampingan dengan bentuk kereta listrik atau kereta diesel. Dengan kereta inilah waktu liburan kita, rakyat yang aslinya dari udik, pulang kampung.

Atau pulang ke kampung halaman?

7. Gado-Gado¹¹

H.O.S. Tjokroaminoto. Singkatan berupa tiga huruf ini biasa kita lafalkan “hos” dengan huruf o di tengah. Ketiga huruf itu adalah singkatan dari Haji Umar Said.

Saya bertanya-tanya mengapa wakil bunyi u, potongan dari kata Umar, ditulis dengan huruf o? Ada penjelasan yang masuk akal. Penulisan begitu berasal dari Oemar dalam ejaan Van Ophuijsen (1901—1947). Akan tetapi, itu masih menyisakan tanda tanya. Kalau begitu, mengapa huruf yang diambil o dan bukan oe. Namun, ada soal lain yang lebih mengganggu dalam penulisan nama tadi, yakni inkonsistensi.

Ketika tj dibarui menjadi c, huruf vokal o pada singkatan—yang menurut kacamata awam, dengan mengingat ejaan Van Ophuijsen, “seharusnya” oe—tidak diubah menjadi huruf u menjadi H.U.S., sesuai dengan pelafalannya dan sesuai pula dengan ejaan yang berlaku kemudian, baik ejaan Suwandi (1947—1972) maupun Ejaan yang Disempurnakan (1972—sekarang).

Persoalan tadi timbul antara lain karena ejaan, ikhtiar manusia melambangkan bunyi bahasa ke bentuk tulisan berupa huruf, tidak pernah sepenuhnya berhasil. Sebab, alat ucap manusia normal sanggup memproduksi beraneka bunyi bahasa yang jauh lebih banyak daripada jumlah huruf dalam daftar alfabet. Apalagi bila ditambah dengan nada naik-turun, tekanan keras-lemah, atau tempo panjang-pendek yang tidak tercakup dalam sistem ejaan kita. Hal-hal ini dalam linguistik lazim dikenal sebagai unsur suprasegmental.

Kyoko Funada, seorang teman yang mengajar di Kanda University of International Studies, Jepang, memberi tahu saya bahwa, dalam bahasa Jepang, kata *hashi*, bila nada suku kata keduanya naik berarti “jembatan” dan bila turun berarti “sumpit”. Namun, bila nadanya rata saja atau datar, ia mengandung arti lain lagi, yaitu “pinggir”.

Di sisi itu, kata serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia malah cukup sering menimbulkan perbantahan—yang sebenarnya

11 Oleh *Tempo*, judul ini diubah menjadi “Campur Baur Melafalkan Ejaan dalam Bahasa Indonesia”.

tidak perlu, menurut saya. Kata *amin*, menurut sebagian penutur bahasa Indonesia, mestilah ditulis “aamiin”. Kedua huruf vokal /a/ dan /i/ harus ditulis dobel sebagai isyarat dibunyikan agak panjang. Dalam bahasa Arab, tempo dapat mengubah arti. Kata *aamiin* berarti “ya Allah, kabulkanlah doa kami” dan *amin* punya arti lain, yaitu “kedamaian” atau “ketenteraman”. Adapun *aamin* bermakna “meminta perlindungan” dan *amiin* berarti “jujur”. Sekali lagi, ini (pembunyian) kata dalam bahasa Arab.

Barangkali tidak ada yang salah dengan penulisan unsur serapan ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda begitu. Amin atau aamiin, maghrib atau magrib, atau kosakata dari bahasa daerah, seperti mendem atau mendhem dan gelis atau geulis. Bukankah bahasa Indonesia sudah lama mengenal sebutan dengan nada sedikit mengolok-olok, “bahasa gado-gado”?

Yang tampaknya kurang disadari, bahasa Indonesia kita tidak mengenal unsur suprasegmental, dalam arti fonemis (membedakan arti). Dilafalkan dengan cara bagaimana pun, arti sebuah kata tidak akan berubah. Kata *roti* atau *sayur* yang diucapkan sangat keras dan ada bagian yang lebih panjang oleh penjaja keliling di gang-gang kampung tidak punya arti berbeda dari *roti* dan *sayur* yang sangat kita kenal itu.

Lagi pula “kaidah” bahwa huruf vokal ditulis dobel berarti dibunyikan lebih panjang sepatutnya berlaku juga untuk kata-kata lain. Namun, segera kita tahu, hukum itu tidak bekerja pada beberapa kata, seperti *manfaat*, *taat*, *saat*, atau *fiil* misalnya. Bukannya dibunyikan lebih panjang, huruf vokal dobel di situ dalam bahasa Indonesia punya jeda di antaranya.

Semua hal yang sedikit-banyak membuat kita cukup bingung itu sebagian menjelaskan apa yang sudah disinggung di atas, yaitu tentang betapa sulit menangkap bunyi bahasa dan kemudian melukiskannya ke bentuk huruf, juga dalam alfabet bahasa Indonesia.

Di sini boleh kita berpegang pada pandangan bahwa huruf, yaitu konvensi tulis yang melambangkan bunyi bahasa, bersifat lokal. Tiap bahasa punya alfabet sendiri. Karena itulah, sesuai dengan sistem

ejaan kita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menulis kata serapan dari bahasa Arab tadi cukup amin. Perkara bagaimana melafalkannya, itu soal lain. Tidak pernah ada aturan tentang pelafalannya dalam bahasa Indonesia. Juga tidak pernah orang Batak dan orang Jawa bertengkar sengit tentang mana yang valid pengucapannya: /benar/ (e taling) atau /bener/ (kedua e pepet).

8. E

Hotman Paris, sang pengacara, belum lama membuka usaha baru berupa tempat makan. Bisnisnya ini laris dalam tempo relatif singkat. Entah apa yang membuatnya memikat dan menarik banyak konsumen di hari-hari pertama pembukaan—gejala yang kita lihat, misalnya, pada salah satu gerai ramennya di daerah Kuningan, Jakarta, sekitar awal Maret lalu.

Yang lebih menarik adalah pilihan nama tempat makan itu: *Hotmen*. Nama ini bisa dibaca dengan beberapa cara. Mungkin ada yang membacanya sebagai pelesetan dari nama depan si pemilik, atau barangkali anda menduga ada semacam muslihat di situ agar terbaca /hot mèn/ (hot, Bung).

Tidak salah juga jika ada yang menganggapnya singkatan dari Hotman ramen. Di sini rupanya perlu segera disusulkan sedikit catatan. Konstruksi "Hotman ramen" (mungkin secara sengaja) membalikkan hukum DM. Kita tahu, pada frasa bahasa kita, lazimnya kata utama (yang diterangkan) terletak di depan penjelas (yaitu yang menerangkan).

Dalam bahasa Inggris, kebalikannyalah yang banyak kita lihat. Beberapa contoh: anak kecil (*small child*), orang berumur (*old people*), lari pagi (*morning run*), pakaian daerah (*regional clothing*), dan jembatan bambu (*bamboo bridge*).

Penamaan gerai makan bersuasana Jepang tadi boleh dikata cukup kreatif dan provokatif. Ia sekaligus seperti memanggil kembali kaidah pembentukan frasa dalam bahasa kita (hukum DM) "temuan" Sutan Takdir Alisjahbana.

Betapa pun, menyebut "ramen" (atau segala apa yang bewarna atau beraroma atau berbau Jepang), mengingatkan saya pada sahabat Jepang saya, Kyoko Funada.

Dalam sebuah kesempatan, telinga saya menangkap jelas ia membunyikan /ramèn/ (e taling), bukan /ramên/ (e pepet)—sekalipun tidak sedikit penutur bahasa Indonesia melafalkannya dengan e pepet.

Malah juga *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI, edisi VI/daring, 2023) mencatatnya begitu disertai definisi ”mi kuah khas Jepang, ...”. Edisi IV (2008) belum lagi merekamnya.

Dalam bahasa kita yang punya banyak laras dan varian bahasa, pelisanaan huruf e—entah pepet atau taling—tentu saja bisa sama ”kacau”-nya dengan laras bahasa tulis. Keduanya sering dengan gampang bertukar tempat. Ajaibnya, para penutur yang kacau itu tampak tidak terlampau sadar, atau tidak peduli.

Sikap begitu antara lain adalah akibat dari fakta bahwa dalam bahasa kita /è/ dan /ê/ tidak banyak membedakan arti, kecuali pada beberapa kata yang tidak banyak jumlahnya.

Peneraan diakritik dalam dua edisi terakhir KBBI amat berbeda. Edisi IV secara konsisten mencantumkan /è/, tetapi tidak ada /ê/. Contoh: ada *bêcak* (bercak), ada juga *bècak*. Namun, dalam edisi daring dua kata itu dieja *bêcak* (bercak) dan *becak*.

Saya pernah menulis, ”... rupanya fonem /e/ taling kadang tampak seperti orang linglung yang membuat kita keder. Kêdêr terhadap keperluan memberi tanda fonemis /e/ pepet atau taling pada sistem ejaan kita, dan kèdêr, mengingat pelafalan sungguh teramat sukar dibuat baku.”¹²

12 Lebih jauh lihat, ”Keder”, dalam *Polisi Bahasa, tentang Peran Penutur yang Absen* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2019), hal. 206.

9. Saling

Saling fitnah, saling ledek, saling serang, saling menjatuhkan menjadi pertunjukan yang mengesakan bagi rakyat kebanyakan. Pemandangan begini kita lihat tidak hanya dalam acara debat terbuka calon presiden dan calon wakil presiden di panggung nasional, tetapi juga di kalangan pendukung yang berseberangan.

Perbalahan mereka yang disebut terakhir, sampai jauh hari setelah acara debat usai, menyedasi ruang-ruang percakapan publik, terutama media sosial dan media massa. Mereka telah mempertontonkan pertunjukan saling hujat, yang sebagian besar berisikan kata-kata dan ungkapan vulgar, brutal, bengis.

Namun juga, segera kita sadari, begitu unsur sentimen—terutama sentimen agama—dikemukakan, fanatisme pun secara tak terelakkan mengeras. Hal ini pernah kita saksikan dan alami sendiri pada kemelut Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Dan kita merasakan banyak sekali akibat jeleknya. Sampai hari ini.

Ungkapan yang merepresentasikan laku berbalasan dipakai lebih sering terutama pada sekitar masa ketika sebuah kontestasi politik di Tanah Air tengah berlangsung.

Saling. Adverbia ini menerangkan berlangsungnya sebuah perbuatan berbalasan di antara dua subyek. Kalimat *A dan B saling menyenggol*, artinya A menyenggol B lalu B balas menyenggol A. Kita tahu, ada beberapa cara lain untuk menyatakan hal yang kurang lebih sama, seperti *senggol-menyenggol*, *senggol-senggolan*, atau *bersenggolan*.

Bentuk *bersenggolan* dapat, tetapi tidak mesti, searti dengan *saling senggol*. Ia menyatakan bukan saja perbuatan yang berbalasan atau berlangsung timbal balik, melainkan juga menyatakan keberlangsungan yang berulang-ulang (contoh lain: *berpukulan*) atau pelakunya lebih dari satu (seperti *berlarian*, *berjatuhan*).

Bahasa Indonesia punya kata lain yang kira-kira searti dengan *saling*, yaitu *baku*. Leksikal, benar keduanya punya arti serupa, tetapi tidak dalam hal perilaku gramatikal.

Baku lazimnya diikuti verba berbentuk kata dasar. Jarang sekali ia diikuti verba berimbuhan, seperti *baku menyenggol*, *baku menghantam*, atau *baku menembak*. Sebaliknya, bentuk verba yang mengikuti *saling* lebih luwes: *saling senggol*, boleh juga *saling menyenggol*. Namun, tentu berlebihan bentuk *saling senggol-menyenggol*.

Yang tak kurang menarik, *baku* tampaknya cukup sering hadir sebagai bagian dari kata majemuk yang bermuatan pengertian negatif. Banyak dari kita barangkali lebih mengingat bentuk-bentuk *baku hantam*, *baku pukul*, atau *baku tembak* daripada *baku cinta* atau *baku sayang*.

Tulisan ini bukan hendak mengatakan bahwa pada hari-hari ini *saling* cenderung mendekati *baku* dalam arti punya kecenderungan kuat membentuk ungkapan yang melulu berkonotasi negatif. Kecenderungan itu tentu tak lain karena ia dipergunakan di bawah iklim politik yang sedang kian memanas.

Uraian di atas mengantar kesimpulan kepada kita bahwa konotasi negatif (atau positif) sebuah kata adalah tambahan atau pengaruh dari sebuah konteks tertentu. Sebab, sesungguhnya tiap kata itu netral, bebas nilai.

10. Asli

Kompleks niaga di dekat rumah saya—pengembang menamainya Marrakash Square—setiap hari terutama di akhir pekan, pagi dan sore, menjadi gelanggang tempat warga perumahan sederhana di sekitarnya, termasuk saya tentu saja, mencari keringat. Entah berjalan kaki, jogging, entah bersepeda di jalur jalan yang memutar. Sementara itu, alun-alun di tengah biasanya diisi beberapa gerombol manusia. Ada anak-anak bermain bola, remaja berlatih pencak silat atau baris-berbaris, atau ibu-ibu yang bersemangat senam aerobik diiringi suara musik berisik.

Hampir setiap pagi saya jalan santai mengitar di sana sampai tiga-empat putaran. Aktivitas ini memakan waktu kurang-lebih 15 menit, cukup membuat tubuh kuyup berkeringat.

Sering, sembari berjalan beriringan dengan beberapa kenalan separtar di bawah sorot matahari pagi, ada saja yang iseng bertanya kepada saya, “Bapak aslinya mana?”

Karena sudah sering mendapat pertanyaan serupa, jawaban saya nyaris klise. Selalu dimulai juga dengan pertanyaan, “Asli itu maksudnya apa, ya?” Mudah diterka dari bahasa tubuhnya, si penanya tampak kelimpungan.

Belum hilang bingungnya, segera saya susulkan beruntun pernyataan demi pernyataan. Saya katakan, ibu saya dari Yogya, bapak saya dari Pematang. Namun, saya, yang lahir di Tarempa, Riau kepulauan, dan besar di Jakarta, tidak dapat berbahasa Jawa. Setelah menikah, saya tinggal di wilayah Bekasi, sampai sekarang. “Nah,” saya tutup dengan pertanyaan lagi, “saya asli mana kalau begitu?”

Lawan bicara saya tertegun sebentar, sebelum menjawab pendek, “O, artinya Bapak asli Jawa.” Sorot matahari pagi seketika terasa lebih tajam menggigiti kulit. Dan, saya mendadak kehilangan selera melanjutkan percakapan.

Begitulah. Makna kata *asli* terkadang kabur, tidak tegas benar. Ini tentu tidak hanya kita lihat pada kata yang kebetulan punya arti lebih dari satu ini. Sebenarnya ada banyak kata tampak seperti

sengaja mengelak dari usaha kita merumuskannya agar menjadi lebih bening, terang-benderang. Terkadang kabur, sebab bisa terjadi, justru pada saat artinya mulai agak jelas, menyembul dari sana pertanyaan (-pertanyaan) baru.

Apabila yang dimaksud *asli* oleh teman jalan pagi saya tadi adalah daerah atau tempat asal, jelas saya berasal tidak dari Jawa. Ia saya kira bukan tidak paham akan fakta sebenarnya itu, bahwa kedua orang tua sayalah yang *asli* Jawa, lahir di atau berasal dari Jawa. Ia hanya sudah dikecoh, dikelirukan oleh kebingungannya sendiri. Pertanyaan yang kemudian muncul, apakah benar ibu dan/atau bapak saya *asli* Jawa (baca: pribumi)? Bagaimana jika generasi kesekian moyang kami adalah pendatang di bumi Nusantara, kakek buyut saya dari tanah Madagaskar dan nenek canggah saya dari dataran Mongolia, misalnya?

Asli di situ cenderung menempel pada *murni*, *tulen*. Kita ingat ada madu *asli* di samping ada pula susu *murni* atau lelaki *tulen*. Yang kita lihat di sini, *asli* menegaskan identitas diri sendiri sambil menolak unsur luar dirinya. Tak ada campuran. Namun, pada saat yang sama, ini paradoks, peneraan semacam stempel *asli* pada sesuatu malah kerap menerbitkan sangsi.

Maka apabila *asli* yang dimaksud adalah pribumi, bukan peranakan, ini pastilah lebih bermasalah.

Sebelum pindah ke kediaman sendiri di daerah dekat Marrakash Square, saya tinggal di rumah kontrakan di perumahan yang letaknya bersebelahan. Pada hari-hari rusuh 1998, suatu siang ketika kekacauan mulai menjalar di daerah kami—deretan rumah toko dan kompleks perumahan kami hanya berjarak tak sampai sekilometer—beberapa tetangga meminjam sajadah kepada kami untuk disampirkan di pintu pagar depan rumah. Sementara itu, dinding depan rumah ditulis “ASLI/PRIBUMI” dengan cat semprot. Kedua benda itu, sajadah dan grafiti, mereka perlakukan sebagai semacam jimat dan larik doa. Seolah-olah dengan itu mereka luput dari amuk massa yang bengis.

Kerusuhan keji itu, kemudian kita tahu, meledak di banyak daerah dengan derajat berbeda-beda. Berlangsung sampai sehari-hari, aparat keamanan seperti lumpuh tak bergerak. Skala eskalasinya yang seperti menuruti sebuah skenario sangat rapi telah berhasil mendesak Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Ini bagian yang sangat ganjil dari kisah itu. Kelompok penyerbu atau penyerang adalah mereka yang dengan congkak berkeras mengaku asli/pribumi, sedangkan sasaran atau korban mereka adalah golongan bukan asli, nonpribumi/peranakan.

Lihatlah, *asli* tidak hanya menerbitkan sangsi, tetapi juga biadab, dalam penghadap-hadapannya dengan yang bukan asli.

11. Pengalaman

Ada senarai kata bersinonim yang, sekalipun semua punya acuan sama, tiap kata di dalamnya dapat ditafsir atau dirasa berbeda oleh tiap-tiap orang. Beda penangkapan ini karena ada hubungan emosional antara referen dan pemakainya. Maka penulis bisa jadi sangat subyektif dan terkadang sedikit bimbang saat menetapkan pilihan. Kita ambil satu contoh agak klise, kata *meninggal*.

Bayangkan ketika menjelang jam tenggat habis, seorang wartawan, si Polan, sedang menyelesaikan laporan dan ia sampai pada kata *meninggal* yang perlu dia ketik. Istri mendiang adalah teman dekat Polan, sedangkan suami temannya itu pejabat teras pelat merah yang baru kemarin siang ditetapkan sebagai tersangka megakorupsi. Ia mengembuskan nafas penghabisannya semalam karena serangan jantung.

Bentuk *mengembuskan nafas penghabisan* secara naluriah Polan hindari. Terlalu panjang, mengkhianati asas kehematan di dunia jurnalistik. Namun, kata *meninggal* juga bagi Polan terlalu biasa, kurang menggugah. Maka, dia pun giat mencari padanannya.

Rupa-rupanya ia enggan menggunakan kata *mangkat* dan pada saat yang sama, bawah sadar Polan menampik kata-kata yang menurutnya bernada kasar atau kurang pas, seperti *mati*, *tewas*—apalagi *modar* atau *mampus*.

Memilih satu di antara senarai kata bersinonim tentu bukan pengalaman Polan seorang. Kita bisa sependapat bahwa kata *meninggal* sudah amat jamak, atau bahwa kata *mangkat* tidak patut untuk suami sahabatnya yang sudah menggasak uang rakyat itu. Namun, bisa juga anda malah memilih bentuk *meninggal*, tidak seperti pilihan Polan, *tutup usia*.

Penetapan pilihan di antara sejumlah kata bersinonim dalam contoh di atas kita lihat sedikit banyak melibatkan perasaan si pengguna. Ada contoh lain, *teman*, yang merentang dari *sahabat* (*karib*) sampai sekadar *kenalan* atau *relasi*. A dan B mengenal Z.

Sementara A menyebut Z karibnya, bagi B si Z itu tak lebih dari kenalannya belaka.

Di sisi lain, ada sinonimi yang tidak banyak melibatkan perasaan, tidak menaut pada kedekatan emosional referen sebuah kata dengan pemakainya. Yang kita dapati di sini adalah soal apakah pemakaiannya lazim, sejalan dengan konvensi penutur bahasa yang bersangkutan. Dan, tentu saja, apakah kata itu cukup persis mewakili maksud penutur.

Kata *jatuh* (sebuah kata umum, generik, yang punya relasi makna dengan banyak sekali kata lain) misalnya, bersinonim antara lain dengan *gugur* dan *ambruk*. Daun atau kelopak bunga kering kita katakan *gugur*, sedangkan *ambruk* lazim untuk menyebut bangunan tinggi, misalnya. Mungkin sekali lucu, dan ganjil, bila dibalik.

Jeanne Martinet (2010) menegaskan bahwa linguistik tidak berurusan dengan makna. Artinya, kita tidak bisa banyak berharap pada ilmu bahasa yang tidak mengajarkan apa definisi, atau di mana persisnya batas-batas arti, sebuah kata. Saya sependapat, sebab semantik mengeksplorasi bukan makna *an sich*, melainkan pengertian, berbagai jenis dan aspek makna, serta rupa-rupa relasi makna antara satu kata dan lainnya. Makna sepenuhnya menjadi urusan para pengguna bahasa (yang bukan linguist). Dalam sebuah sajaknya, “Senja di Pelabuhan Kecil”, Chairil Anwar memakai sebuah kata yang bagi kita sekarang pun barangkali terasa agak asing: “desir hari lari berenang / menemu bujuk pangkal *akanan*”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi keempat (2012) mendefinisikan kata *akanan* sebagai nomina dari laras manajemen, artinya “yang masih akan diselesaikan”. Di sisi itu, bagi saya kata ini hampir otomatis menghadirkan lawan maknanya, yaitu *sudahan*. Dengan begini, *akanan* bisa diartikan sebagai awal atau permulaan. Frasa “pangkal *akanan*” tidak keliru bila kita tafsirkan sebagai sebuah titik akhir *sekaligus* titik awal baru bagi tahap berikut. Dalam sebuah obrolan (saya sudah lupa kapan dan di mana), Mas Goen (Goenawan Mohamad) menyatakan bahwa kata *akanan* Chairil Anwar itu artinya “ufuk, horizon”. Pengguna bahasa berurusan dengan makna lebih

intens dari linguis. Mereka dari kalangan linguistik ini lebih berurusan dengan struktur/bentuk, wujud bahasa, entah dalam bentuk kata atau rangkaian kata (frasa, klausa, kalimat, dan seterusnya), bukan dengan isi atau makna.

Ringkasnya, bukan linguistik, melainkan pengguna bahasalah yang berurusan dengan makna. Pertanyaan yang segera menyusul, bagaimana kita dapat memahami makna kata sebelum menaruhnya dalam konteks kalimat dengan sepatutnya. Persis di sinilah kita teringat sebuah petuah lama. Pengalaman adalah sebaik-sebaiknya guru.

12. Tambun

Adik saya di mobil depan menelepon, “Mas, tampaknya jarak kita kelewat berjauhan. Nanti kami tunggu di depan, di pintu kereta, ya?” Bagaimana bisa ia, bersama rombongan kecil di mobilnya, menunggu di pintu itu. Sebab, pintu kereta pastilah menempel jadi satu dengan tiap-tiap gerbong kereta api.

Seperti mendengar gumam saya, keponakan yang duduk di sebelah mengatakan pintu kereta yang dimaksud itu bukanlah pintu untuk masuk ke atau keluar dari gerbong kereta, melainkan “pintu pelintasan kereta”. Dan benar saja. Di tepi jalan raya di muka “pintu kereta” di Jalan Pramuka, terlihat adik saya di samping mobilnya melambai-lambaikan tangan.

Pintu kereta. Jangan tergesa-gesa menuduh *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* alpa mencantumkannya manakala anda agak payah menemukannya. Letaknya agak tersembunyi, maka perlu sedikit lebih ulet mencarinya.

Sudah sejak edisi I (1988), II (1991), III (2001), IV (2008), hingga edisi terakhir (V, 2017, termasuk versi daring yang terakhir dimutakhirkan pada Oktober 2022) *KBBI* menyajikannya bukan sebagai sublema “pintu”—sebuah cara yang lazim dalam penataan isi kamus demi memudahkan pengguna mencari sebuah kata atau ungkapan. Letaknya di semua edisi *KBBI* tadi agak tersamar. Ia tidak berdiri sendiri, melainkan dalam contoh kalimat dari arti keempat lema “pintu”.

Di semua edisi *KBBI* kita baca rumusan yang sama belaka: palang (pada) jalan: *rumah kira-kira persis 50 m dari—kereta api*. Kita bandingkan dengan penyajian oleh *Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI)* W.J.S. Poerwadarminta (dalam arti kelima lema “pintu”) seperti ini: palang pd jalan yg melintasi jalan kereta api: mis. *rumahnya tak jauh dari — kereta api Cikini (Kamus Umum Bahasa Indonesia, cetakan keempat, 1966)*.

Status “pintu kereta” yang bukan unit makna sendiri saya kira bermula dari khilaf *KUBI*, tetapi terus dikutip mentah-mentah oleh

KBBI. Paragraf di atas perlu segera kita susulkan dengan dua catatan berikut ini. Pertama, “palang (pada) jalan” bukanlah definisi yang tepat untuk “pintu kereta”. Akses di banyak perumahan juga tidak sedikit yang diberi palang, bahkan sampai jalan-jalan lebih kecil di dalam kompleks. Palang itu biasanya berupa sebatang besi—lazim disebut portal—dan di sisi seberangnya tidak selalu ada rel kereta api yang membentang arah sejajar palang. Dalam definisi *KUBI* ada unsur tambahan penting: “yg melintasi jalan kereta api”. Rumusan ini jelas lebih tegas dan lebih akurat daripada rumusan *KBBI*.

Kedua, menyangkut struktur kalimat contoh. Tercekat sebentar saya membaca kalimat contoh seperti begitu dalam *KBBI*—sebuah buku rujukan primer bahasa Indonesia. Bukan saja ia tidak punya predikat, tetapi juga subyeknya tidak bertakrif, alias tak tentu. Itu rumah apa, atau rumah siapa? Kita lihat subyek pada kalimat contoh *KUBI* lebih spesifik, bukan hanya “rumah”, melainkan “rumahnya”.

Catatan di atas implisit mengatakan, satu orang Poerwadarminta lebih cakap dan cermat daripada satu tim besar yang mengeroyok penyusunan tiap edisi *KBBI*. Lihatlah, perumusan sublema “pintu kereta” yang sedikit berbeda itu memberi kesan kuat semata didorong hasrat menghindar dari anggapan sekadar menyalin tanpa pikir panjang, tanpa sikap kritis. Boleh jadi juga tidak disadari bahwa perbuatan sengaja mengubah itu malah membawa implikasi menyeleweng dari segi tata bahasa.

Mulai *KBBI* edisi IV, penyajian kata majemuk ini mengalami pengubahan (bukan penyempurnaan) yang boleh dibilang unik. Baik dalam edisi IV maupun V bentuk “pintu kereta” masih tercatat dengan cara serupa. Namun, pada saat yang sama, dua edisi terkemudian itu menambahkan bentuk “pintu pelintasan kereta api” di bawah lema “pintu”. Gabungan kata ini dirumuskan dengan lebih baik: pintu yang terdapat di persilangan antara jalan raya dan rel kereta api dengan atau tanpa penutup.

Sebutan “pintu kereta” yang seolah-olah dikoreksi menjadi “pintu pelintasan kereta api” tidak membatalkan bentuk yang pertama. Tidak membatalkan, sebab ia tetap tercatat dalam *KBBI* dan hidup di

tengah penutur (dalam bentuk elipsis). Jadi, kita mendapati sekaligus dua bentuk “pintu kereta” atau pun “pintu pelintasan kereta api”, dan keduanya merujuk pada referen yang sama belaka.

Kemenduaan seperti itu seolah-olah melanggengkan sembari mengeraskan sebuah ambisi tampil “asal lebih tambun” dari edisi terdahulu. Saya teringat—ini sekadar sekelumit contoh—beberapa pasang varian bentuk (“cape-capai”, “prei-perai”, “reak-riak”, serta “konde-kundai”) yang dengan serakah masih diborong masuk ke dalam baik edisi IV maupun V tanpa rujuk silang (Endarmoko, 2018).

Kemenduaan dalam *KBBI* perlu dan bisa segera disudahi. Dalam hal “pintu kereta”, misalnya, dapat dengan menyisihkan arti keempat “pintu”. Ini mengingat, tadi sudah saya singgung, rumusannya lebih cocok untuk lema “portal”. Sublema “pintu kereta api” dapat ditambahkan, tetapi kemudian dirujuk ke “pintu pelintasan kereta api”.

Ikhtiar sederhana begitu barangkali lebih patut ditimbang daripada melanggengkan ambisi tampil lebih tambun.

13. Lisan

Pada 1980-an, kita dapat menjumpai pemandangan begini: barisan orang yang menunggu giliran di depan gardu telepon umum memanjang di trotoar sebuah jalan. Berkali-kali orang di barisan terdepan mengetuk pintu kaca, mengingatkan, tetapi pengguna di dalam gardu sama sekali tidak mengindahkan. Padahal, entah sudah berapa keping koin tiap sebentar ia masukkan ke boks telepon.

Di saat begitu, kita seperti diingatkan lagi bahwa di situ telepon milik publik telah digunakan secara salah. Seharusnya yang dibicarakan lewat telepon, apalagi telepon milik umum, adalah hal-hal pokok dan penting saja. Disampaikan pendek-pendek, cepat, tetapi tetap jelas. Dan, bicara langsung ke inti, tak perlu berbasa-basi. Begitulah kira-kira pikiran si penunggu yang masygul.

Namun, yang kita lihat tak lama berselang, ketika si orang jengkel ini mendapatkan gilirannya, ia mengulangi persis kelakuan orang sebelum dia. Sebagian dari kita barangkali akan berkata, telepon, salah satu benda yang lahir pada fajar zaman baru menjelang abad ke-20, telah dimanfaatkan oleh penduduk negara berkembang untuk melanggengkan kebiasaan lama mereka turun-temurun. Perangkat modern itu malah mereka pakai mengobrol *ngalor-ngidul*, bergunjing, bukannya demi efisiensi, yaitu memendekkan jarak dan waktu.

Di saat seperti itu pula kita seperti disadarkan betapa bahasa lisan sebenarnya cukup mengusik perhatian, antara lain karena ragam ini menunjukkan semacam kontradiksi di dalam dirinya. Maka, fenomena itu patut kita periksa dan catat, sekalipun hanya sekilas dan ala kadarnya, di sini.

Bahasa lisan, seperti dalam percakapan lewat telepon tadi, punya kecenderungan berpanjang-panjang. Namun, segera juga kita dapati, “panjang” itu tidak serta-merta berhubungan langsung dengan bahasa. Malah kita menjumpai banyak bentuk kata, terutama verba, yang ringkas, lebih pendek dari ragam tulis. Dapat kita menduga, bentuk verba seperti itu adalah pengaruh dialek Melayu-Betawi.

Umumnya verba menjadi sedikit lebih pendek dari ragam bahasa Indonesia formal dalam bentuk tulis, karena awalan menghilangkan sementara bentuk nasal tetap menempel di awal kata dasar. Misalnya “menyikat”, “menyenggol”, “menyusul” memendek jadi “nyikat”, “nyenggol”, “nyusul”. Boleh kita tambahkan (perhatikan beberapa pasang bentuk berikut): “mencomot-nyomot”, “menciprat-nyiprat”, “mengomel-ngomel”, “mengopi-ngopi”, “menguping-nguping”, atau “menghadang-ngadang”. Ada juga transformasi yang bercabang dua. Misalnya “menggarong” menjadi “ngegarong” atau “nggarong”. Contoh lain, “menggali” dapat menjadi “ngegali” atau cukup “nggali”.

Penyebab bahasa lisan cenderung berpanjang-panjang bukanlah terutama faktor bentuk bahasa, melainkan bentuk pertuturan. Di dalam suatu tindak tutur (*speech act*), sering pengujar mengulang—biasanya disusul dengan parafrasa atau uraian sedikit lebih panjang-lebar—demi memperjelas sesuatu yang baru saja ia ujkarkan. Itu adalah respons atas pertanyaan lawan bicaranya nun di seberang sana. Yang sebenarnya memerlukan durasi lebih lama adalah pengulangan pesan, termasuk ujaran yang bertele-tele alias melantur.

Ada pandangan bahwa ragam lisan, sebagai medium komunikasi, punya lebih banyak kelemahan dibandingkan dengan bahasa tulis. Lihat, misalnya, uraian A. Teeuw (1984, hal. 26–30) tentang tujuh ciri bahasa tulis.

Teeuw menyinggung juga unsur suprasegmental dalam ragam lisan (intonasi, nada, irama) serta mimik dan gestur yang dapat lebih memuluskan penyampaian informasi dari pengujar ke pendengarnya. Saya merasa perlu memberi sedikit catatan tambahan tentang gestur dalam tindak tutur melalui telepon yang tidak kita temukan dalam bahasa tulis.

Lewat gerak-gerik si penelepon di balik kaca dinding gardu telepon umum, kita bisa menduga dengan siapa dia berbicara. Sosok lawan bicaranya mungkin sekali berderajat lebih tinggi atau ia hormati menilik sikap tubuhnya yang sangat santun. Ia tampak berkali-kali menganggukkan kepala sambil matanya melihat ke bawah. Padahal, jelas lawan bicara dia tidak sedang berada di situ. Semua perilaku

ganjilnya itu spontan belaka. Tidak ia sadari bahwa ada banyak orang di luar memperhatikannya sejak tadi. Pemandangan absurd itu tak pelak menjadi penawar rasa jengkel para penonton yang lama menunggu giliran bicara.

Dalam Islam ada ajaran “Jagalah lisanmu”. Dari arah berbeda, peradaban tua Cina konon mengenal ungkapan “Mulutmu harimaumu”. Namun, keduanya tentu saja bukan lisan biasa, sebab beroperasi di tataran lebih tinggi: budi pekerti.

Bagian IV

Bahasamu Kastamu



Buku ini tidak diperjualbelikan.

1. Kisah

Pengertian bahasa tampaknya sering disederhanakan semata sebagai perkakas bagi seseorang guna menyampaikan kabar, ide, atau kisah kepada orang lain. Pandangan instrumentalis juga memandang bahasa sebagai alat buat menyatakan perasaan. Karena sekadar alat, bahasa di situ jadi tidak lebih penting daripada apa-apa yang ia bawa. Isi, atau fungsi, lebih penting ketimbang wadah, lebih penting daripada bahasa itu sendiri. Jalan berpikir seperti ini sedikit banyak ikut menyumbang maraknya bahasa yang kacau-balau, amburadul, tidak mengindahkan kaidah kebahasaan yang berlaku. Ingat saja ungkapan yang pernah, atau malah sering, kita dengar, "Yang penting orang lain mengerti." Titik. Habis perkara. Tidak ada lagi ruang diskusi.

Namun, bukan pokok itu yang akan kita bincangkan di sini sekalipun sebenarnya ada banyak soal menarik di sana. Apalagi kita tahu bahasa tidak hanya berfaedah sebagai wahana seperti contoh tadi. Dalam karya sastra—puisi khususnya—kita mendapati watak bahasa yang berlainan sama sekali. Mungkin saja ada orang menulis puisi untuk mencurahkan perasaannya, tetapi betapapun perasaannya, laku itu tidaklah menjadikan bahasa barang remeh atau sekadar perkakas. Tidak terlalu keliru bila ada yang mengatakan bahwa di sini bahasa dipergunakan untuk kepentingan atau demi bahasa itu sendiri—bukan terutama sebagai alat, sarana, yang mengabdikan pada sesuatu yang lain. Menurut Geoffrey Leech, inilah fungsi estetis bahasa.

Selain itu, bahasa, masih menurut Leech (1981, hal. 40—42), punya fungsi fatis. Tiap kali ada kenalan menyapa, "Apa kabar?"; jawaban kita seolah-olah sudah tersedia dan baku: "Baik." Jarang orang terpikir menyelidik, apakah si penanya sungguh ingin tahu keadaan kita. Sebaliknya, sungguh "baik"-kah—entah kesehatan atau dapur—kita pada menit itu?

Leech menyebut percakapan pendek itu contoh bahasa yang tengah menjalankan fungsinya bukan terutama untuk membangun komunikasi, melainkan demi menjaga terselenggaranya silaturahmi

di antara sesama manusia. Dalam situasi kebahasaan seperti itu orang sekadar hendak memastikan bahwa hubungannya dengan orang lain yang ia kenal baik-baik saja. Tidak ada yang perlu membuat risau. Sudah lama bahasa Indonesia mengenal satu istilah yang mewakili fenomena ini: *basa-basi*. Sayangnya, kini *basa-basi* kita rasakan menimbun lebih banyak konotasi yang kurang baik. Cenderung lebih menunjukkan semacam sikap pura-pura, tidak tulus. Nasibnya kurang lebih sama dengan kata *maaf*.

Di sisi semua itu, bahasa pun bisa berfungsi meyakinkan, dan kemudian menggerakkan, orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan harapan kita. Dari sinilah kita mengenal beberapa istilah, seperti *persuasi*, *kampanye*, dan *propaganda*. Ragam bahasa persuasif ini jamak kita jumpai dalam dunia periklanan dan politik.

Tidak kurang menarik dari sejumlah fungsi bahasa di atas adalah fakta bahwa bahasa, dalam rupa kata-kata, menjadi wadah pengertian. Ia menjadi cara atau ikhtiar manusia memahami kenyataan di sekitarnya. Dan itu ditempuh antara lain dengan memberi nama atau sebutan, baik pada benda maupun konsep yang abstrak. Ungkapan *gagal paham*, misalnya, barangkali mulanya tercetus sebagai bentuk penolakan atas munculnya fenomena *jilboobs*. Mudah kita menduga bentuk ini meneladan ungkapan dari dunia kedokteran: *gagal jantung*, *gagal ginjal*. Yang ingin saya katakan, begitulah salah satu cara kata membiak, yaitu lewat analogi. Polanya kira-kira serupa *salah urat*, *salah paham*, yang pada gilirannya melahirkan *salah urus*, *salah pikir*.

Dan salah pikir pada cara memandang bahasa melulu sebagai alat belaka saya kira melupakan kodrat bahasa sebagai barang hidup. Karena hidup itulah, ia selalu sanggup menyerap apa pun yang berhubungan dengan kemanusiaan kita sebagai penuturnya.

Bahasa berharga karena ia—ini kita lihat dalam agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan—sudah mendekatkan, sembari menyingkapkan, banyak hal yang semula teramat jauh dan gelap kepada kita.

2. W.J.S. Poerwadarminta, Bapak Kamus Indonesia¹³

Wilfridus Joseph Sabarija Poerwadarminta (12 September 1904—28 November 1968) masuk angkatan orang Indonesia pertama yang memperkenalkan bahasa Indonesia di luar negeri setelah peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda. Ketika menjadi dosen Bahasa Melayu di Sekolah Bahasa Asing di Tokyo (1932—1937), dia sering mengatakan kepada orang Jepang bahwa Indonesia sudah punya bahasa nasional sendiri. Barangkali dia mengatakannya dengan begitu saja, tidak berlandas sebuah kesadaran politik. Barangkali juga kecintaannya pada bahasa Indonesialah yang mendorong dia memuliakan bahasanya itu di negeri asing. Namun, kita tahu, baru pada 1938 bahasa Indonesia boleh dipakai dalam sidang-sidang di Dewan Rakyat Hindia-Belanda, yaitu sejak Mohammad Hoesni Thamrin berpidato dengan bahasa itu di sana.

Dalam ingatan kita, Poerwadarminta adalah seorang ilmuwan, bukan politikus. Dia ilmuwan swadidik bersahaja yang berperan besar dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Minatnya pada bahasa sudah terlihat ketika dia berusia sekitar 20 tahun. Sambil mengajar di sebuah sekolah dasar di kota kelahirannya, Jogja, dia mengambil kursus pelbagai bahasa, seperti bahasa Belanda, Inggris, Prancis, Sanskerta, Jerman, Jawa Kuno, Melayu, dan Jepang, sampai dia menguasai semua bahasa itu. Tercatat dia sudah menghasilkan sedikitnya 25 buku—sebagian besar berupa kamus—lima diktat kuliah bahasa, serta sejumlah tulisan yang tersebar di beberapa media cetak.

Dia mencurahkan sebagian besar pikirannya pada perkamusan, satu bidang yang tak kalah penting dibandingkan dengan upaya orang lain, seperti Sutan Takdir Alisjahbana atau Armijn Pane, di dalam meletakkan dasar-dasar tata bahasa Indonesia. Julukan Bapak Kamus Indonesia disandangkan kepadanya bukan hanya karena karya unggulnya, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (1952) menjadi dasar pengembangan kamus bahasa Indonesia kontemporer. Dia pun menyusun beberapa kamus lain, di antaranya *Baoesastra*

13 Ditulis bersama Anton M. Moeliono.

Djawa I (bersama C.S. Hardjasoedarmo dan J.Chr. Poedjasudira, 1930), *Baoesastra Walandi-Djawi* (1936), *Baoesastra Djawa II* (1939), *Kamus Nippon-Indonesia, Indonesia-Nippon* (1942), *Indonesisch-Nederlands Woordenboek* (bersama A. Teeuw, 1950), dan *Kamus Latin-Indonesia* (bersama K. Prent dan J. Adisubrata, terbit secara anumerta pada 1969). Dia malah sedang menyusun kamus Prancis-Indonesia yang tak pernah selesai, sebab ajal telah lebih dahulu menjemputnya.

Sepulang dari Jepang pada 1937 dia bekerja di bagian penerjemahan penerbit Balai Pustaka—sebentar pada 1942 dia ditempatkan sebagai juru bahasa pada kantor Kempetai—sampai dipindahkan ke bagian perpustakaan Museum Nasional pada 1946. Setelah berkali-kali dimutasi di lingkungan Kementerian PP dan K, sementara itu dia masih terus mengajar bahasa Indonesia di beberapa sekolah dan perguruan tinggi di Jakarta, sejak Januari 1953 dia bertugas di Lembaga Bahasa dan Budaya, Fakultas Sastra dan Filsafat, Universitas Indonesia sebagai Kepala Bagian Leksikografi. Pada 1960 dia mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun, dia masih membantu Lembaga Bahasa dan Budaya cabang Jogja, sambil mewariskan ilmunya di Taman Siswa, dan menjadi dosen di beberapa universitas terkemuka Jogja dan Semarang.

Sebelum dan pada masa sekitar Poerwadarminta menyelesaikan kamusnya yang bersejarah, di tengah masyarakat sudah beredar cukup banyak kamus, baik ekabahasa maupun dwibahasa, termasuk kamus yang berukuran besar. Namun, mengapa pada masa kemudian Kamus Poerwadarminta yang dipandang sebagai tonggak dan dipergunakan sebagai rujukan dalam pengembangan kamus bahasa Indonesia?

Menilik cara kerjanya, tak pelak Poerwadarminta layak disebut sebagai peletak dasar leksikografi di Indonesia. Tiap kata, entah dari khazanah kontemporer atau lama, dia catat dalam kartu disertai keterangan mengenai sumber, batas-batas arti, serta bagaimana penggunaannya. Bersama sekian teks yang telah dia ambil kata-katanya, semua bahan tadi kemudian dia simpan baik-baik. Sebuah ketelatenan yang amat menakjubkan, dan ini baru merupakan

langkah awal dari satu pekerjaan mahapelik. Langkah berikut menghadapkan dia pada dua soal genting, yaitu merumuskan makna sesuatu kata dan menentukan pilihan di antara sekian varian bentuk kata. Dalam soal yang pertama, tanpa rasa segan dan malu-malu dia bertukar pikiran dengan orang yang dia pandang lebih ahli, seperti Poerbatjaraka, C. Hooykaas, atau A. Teeuw. Namun, ketika sampai pada keharusan menetapkan pilihan, dia tegas mengedepankan otoritasnya sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip ilmu bahasa.

Pernah dia katakan, kata-kata yang tercantum di dalam kamusnya sudah digunakan di lima tempat (Medan, Jakarta, Surabaya, Ujungpandang, dan Ambon), dalam lima buku atau majalah, oleh lima penulis yang berbeda-beda. Dari sudut ini Kamus Poerwadarmintha bersifat sinkronis, artinya ia menyajikan pemerian arti kata dalam bahasa Indonesia kontemporer. Namun, kamus itu pun berwatak diakronis, sebab mengetengahkan juga kata-kata Melayu lama dari abad ke-17—19. Jangan lupa, ia hidup pada masa ketika kosakata dari khazanah Melayu lama masih subur, sementara kosakata terutama dari Barat mulai datang membanjir. Dalam kalimat Poerwadarmintha: “Sebagai tjermin tjorak perkembangan dan pemakaian bahasa Indonesia pada dewasa ini maka kamus ini pun terpaksa masih bersipat mendua, lama dan baru.”

Di belahan dunia lain, ketika tradisi perkamusan mulai diterangi cahaya ilmu, penyusunan kamus lebih ditujukan untuk memelihara kemurnian bahasa. Lihat misalnya, kamus yang disusun oleh Bapak Kamus Inggris, Samuel Johnson, *Dictionary of the English Language* (1755), atau karya Bapak Kamus Amerika, Noah Webster, *An American Dictionary of the English Language* (1828). Poerwadarmintha bukan tidak sadar akan konsekuensi pilihannya. Dia sendiri menyatakan, kamusnya bukanlah kamus standar atau baku, melainkan kamus deskriptif yang mencatat sambil merumuskan arti dan penggunaan tiap kata sebagaimana kata itu hidup di tengah pemakainya. Menjelang Seminar Bahasa Indonesia pada 1968 dia sempat mengutarakan pikiran mengenai pentingnya kamus baku,

selain dua jenis kamus lain, yaitu kamus ilustratif dan tesaurus dalam bahasa Indonesia.

Poerwadarminta sendiri mungkin tidak tahu, setelah memasuki abad ke-20 pendekatan normatif Johnson dan Webster sudah ditinggalkan orang. *A New English Dictionary on Historical Principles* (1934) dan Webster's *Third New International Dictionary* (1961), misalnya, berbeda dari kamus Johnson dan Webster tadi, sekadar mencatat dan menafsirkan pemakaian sebuah kata atau istilah secara cermat tanpa hasrat mendiktekan mana bentuk yang betul dan mana yang salah. Jelas kamus Poerwadarminta mengikuti prinsip ini. Dia hanya berharap kamusnya “dapat memenuhi keperluan-keperluan yang praktis dalam batja-membatja segala matjam bacaan”. Sedari awal dia pun sudah membayangkan keperluan memperbaiki dan memperbaruinya setiap 10 atau 15 tahun. Baginya, kamus tak mungkin kekal.

Pilihan pendekatannya secara tak terelakkan mengakibatkan ada tuntutan penyempurnaan terus-menerus. Namun sayang, sejarah berkata lain. Sampai meninggalnya, dia tidak pernah berkesempatan melakukan penyempurnaan tersebut. Sejak pertama terbit pada 1952, baru pada 1976, di cetakan kelima, Kamus Poerwadarminta “diolah kembali” oleh Pusat Bahasa (sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa). Penyempurnaan kedua kita lihat pada cetakan ke-13, 2003. Hanya entah mengapa, sejak di tangan Pusat Bahasa, teks-teks pengantar yang ditulis Poerwadarminta tak lagi bisa kita jumpai di sana.

Tahun ini (2026) baru kita lewati 58 tahun wafatnya Bapak Kamus Indonesia itu. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* hasil jerih payahnya telah memberi sumbangan yang tak ternilai dalam pembakuan kosakata bahasa Indonesia lewat usaha keras yang cermat, sistematis, dan menuruti prinsip-prinsip leksikografi. Seperti bangsa Anglo Sakson menyebut Roget's Thesaurus atau orang Belanda menyebut kamus Van Dale, mungkin baik bila kita mengenangkan namanya dengan menyebut kamus babon yang dia susun: Kamus Poerwadarminta.

3. Bahasa Menunjukkan Bangsa

Peribahasa yang dijadikan judul tulisan di atas mengandung arti perangai dan tutur kata menunjukkan tabiat seseorang. Namun, bisa juga berarti baik buruk kelakuan menunjukkan tinggi rendah asal atau keturunan seseorang. Tidak kita dapatkan arti bahasa, dan bangsa, sebagai yang jamak kita mengerti di sana. Sebab, bukan peribahasa namanya kalau ia berterus terang.

Bangsa dalam arti pertama peribahasa itu merujuk pada akhlak, pekerti, watak. Sementara itu, dalam arti kedua tentulah menunjuk pada derajat atau martabat keluarga. Tabiat adalah sebuah nilai yang diperoleh seseorang dengan usaha, yang didapat berkat dan lewat proses belajar. Derajat keluarga—di sini boleh dibaca sebagai kehormatan atau nama baik keluarga—adalah sebuah nilai yang terberi, turun-temurun. Kedua pengertian peribahasa di atas ada dalam kamus bahasa Indonesia susunan Pusat Bahasa (sekarang Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), dengan catatan, arti yang kedua terletak di dalam tanda kurung, yang dalam kamus Poerwadarminta justru menjadi penjelasan. Poerwadarminta tidak, atau katakanlah belum, mencantumkan arti yang pertama.

Pengimbuhan makna baru pada peribahasa (yang berasal dari Poerwadarminta) tadi oleh Pusat Bahasa menyiratkan ada sesuatu yang berubah di dalam masyarakat kita. Dahulu tampaknya orang dihormati lebih karena darah dan kedudukan atau jabatan, dan penghormatan itu dijaga baik-baik antara lain lewat norma baku yang mengatur perilaku. Status sosial mendapat tempat terhormat, malah menjadi acuan dalam bertingkah laku. Seakan-akan segala yang baik dengan sendirinya menjadi milik kalangan atas, dan keburukan mestilah berasal dari orang bawah.

Ganjil, memang. Apalagi dari hari ke hari semakin kentara betapa kalangan atas justru bisa berlaku lebih culas ketimbang rakyat jelata. Sama sekali tidak ada hubungan antara ulah dan darah, antara pekerti dan pangkat. Baik busuknya pekerti ternyata bukan ditentukan oleh derajat, melainkan oleh tabiat. Atau, dalam kalimat

lain, kini orang cenderung dilihat tidak lagi dari asal-usul dan kedudukannya, tetapi dari fiilnya.

Bahasa menunjukkan bangsa. Ulah seseorang menunjukkan tabiat atau adabnya. Bahwa cara berbahasa seseorang mencerminkan secara nyaris sempurna kepribadiannya. Adab rada dekat dengan akal, dengan kemampuan mengelola nalar. Sejak tadi tak sabar saya mengutip kalimat pertama sebuah buku tentang filsafat bahasa terbitan Yogyakarta (1998) seperti ini.

Sejak tumbuh berkembangnya paham filsafat positivisme logis dari lingkungan Wina, dengan deklarasi universal tantang [sic!] ilmu pengetahuan, tidak mengherankan jikalau pengaruh sains terutama ilmu-ilmu pengetahuan alam terhadap ilmu-ilmu sosial humaniora cukup kuat, bahkan menguasainya.

Para pemerhati bahasa Indonesia tak pernah jemu menyodorkan pelbagai masalah kebahasaan seperti itu, menunjukkan letak ketidakberesannya. Namun, simaklah baik-baik, apa yang mereka angkat hampir selalu berkisar pada soal yang sama, sejak dahulu. Puluhan tahun lewat sudah, tetapi mereka masih saja “terpaksa” cerewet terhadap hal amat remeh, dari pemakaian huruf besar sampai bangun kalimat. Bisa anda bayangkan seorang penulis bermasalah dengan bangun kalimat? Itu kira-kira sama saja dengan orang yang ingin ikut bersepeda santai, tetapi tak bisa naik sepeda.

Amat tidak sepadan, sebetulnya, usaha para pemerhati bahasa Indonesia dibandingkan dengan praktik berbahasa oleh masyarakat luas. Mengingat kembali pepatah “Bahasa menunjukkan bangsa”, kini kita sangsi, dapatkah cara berbahasa orang diperbaiki selama adab yang bersangkutan tidak dibenahi?

4. Bahasa Kebangsaan

Apakah bahasa? Rumusan paling mudah: bahasa adalah perangkat komunikasi yang berfaedah guna menyampaikan warta, pikiran, atau perasaan. Namun, apakah bahasa Indonesia? Adalah Muhammad Yamin yang saya kira pertama kali menggelindingkan pemikiran tentang pentingnya bahasa kebangsaan, yaitu dalam sebuah acara memperingati lustrum pertama Jong Sumatranen Bond pada 1923.

Muhammad Yamin mengutarakan kembali gagasan itu pada Kongres Pemuda Pertama di tahun 1926 seraya menawarkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Ia berangkat dari kenyataan bahwa sudah sejak lama bahasa Melayu berlaku sebagai *lingua franca* di Nusantara, dan oleh karenanya dipandang sebagai perekat yang mampu mempertalikan suku-suku dari Sabang sampai Merauke menjadi satu bangsa. Namun, dalam Kongres Pemuda Kedua, Oktober 1928, sempat terlontar usulan supaya bukan bahasa Melayu melainkan bahasa Jawa—tentu karena jumlah penuturnya paling banyak—yang ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan.

Yang menarik, justru banyak orang Jawa peserta kongres menolak usulan itu karena watak feodalistis bahasa tersebut. Maka, atas saran Poerbatjaraka, yang menguatkan tawaran Muhammad Yamin, bahasa Melayu lantas ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan. Inilah sebuah proyek besar yang hingga hari ini belum kunjung, dan memang sulit, bisa tuntas. Cita-cita komunitas majemuk di tahun 1920-an itu—yang punya niat saling mempertalikan diri dengan satu bahasa yang sama, dan kemudian menyebut diri “bangsa Indonesia”—kini dihadapkan pada soal-soal yang semakin pelik.

Selalu masih akan ada tarik-menarik antara negara dan daerah sebagai tampak pada dua contoh menonjol, Aceh dan Papua. Setidaknya, frasa bahasa kebangsaan tampak kian ditinggalkan dalam kita berbahasa, semakin kehilangan konteks dan maknanya.

Bahasa Indonesia pastilah tidak mungkin dapat bersikap anti-asing. Terlalu banyak konsep dan istilah baru dari pelbagai bahasa asing yang tak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, juga dalam

bahasa daerah yang jumlahnya mencapai ratusan itu. Namun, itu bukan berarti lantas kata-kata asing dapat kita pakai tanpa batas, seperti bahasa Inggris pada beberapa mata acara sebuah stasiun televisi swasta yang digunakan begitu saja, tanpa rasa gamang.

Saya kira bukan perkembangan bahasa Indonesia seperti itu yang dimaksud oleh Muhammad Yamin dan Poerbatjaraka. Mereka mengajukan bahasa Melayu Riau sebagai bahasa kebangsaan karena melihat potensinya yang masih dapat dikembangkan, sedangkan yang kita lihat sekarang adalah kesemrawutan belaka, baik pada laras bahasa tulis maupun lisan.

Saya tidak tahu apakah Pusat Bahasa¹⁴ memikirkan juga masalah kebahasaan yang lebih mendasar, masalah yang lebih berpaut dengan kebijakan kebahasaan nasional, dengan getol dan bersungguh-sungguh. Dan walaupun benar begitu, sampai seberapa jauh tanggapan dari pemerintah. Yang saya tahu, lembaga itu masih harus lebih banyak mengurusি pernaks-berniks yang tak pernah ada habisnya seputar bangun bahasa Indonesia baku. Banyak kerja penting lain yang boleh dikata tak tertangani, antara lain karena tidak banyak tenaga mumpuni yang bekerja di sana sesuai dengan bidang dan minat mereka.

Saya juga tidak tahu, apakah pergeseran cara memandang masalah kebahasaan dari zaman Sumpah Pemuda ke zaman kita sekarang ini dapat kita lihat mencerminkan perubahan semangat zaman serta perhatian dan isi kepala para pemimpin bangsa.

Yang saya tahu, pemerintah tidak berhasil meyakinkan bahwa ia punya kemauan politik dalam soal bahasa kebangsaan kita.

14 Penyebutan Pusat Bahasa (juga untuk seterusnya) yang dimaksud adalah lembaga yang sudah berganti nama menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

5. Membakar Buku, Merayakan Kemerdekaan

... Dort, wo man Bücher Verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.

Heinrich Heine (1797—1856)

Bahasa tidak hanya menyangkut ejaan dan tata kalimat. Selain rambu-rambu kebahasaan, pengguna bahasa juga dituntut peduli pada logika. Pernah dalam sebuah majalah saya menemukan kalimat: “..., ujar Thierry Powis saat melenggang bersama kapalnya (kapal pesiar—EE) ...” Rupanya si Powis ini mirip Nabi Isa yang, berkat mukjizat, dapat berjalan di atas air memarani perahu murid-murid-Nya yang dipermainkan angin sakal. Belum habis heran saya, di halaman lain mata saya menumbuk kalimat: “Dengan cuek dia terus bicara dengan telepon selulernya.” Sedang terganggukah ingatannya?

Tidak ada gramatika yang melenceng pada kedua kalimat di atas. Namun, kalimat yang gramatikanya benar tidak otomatis berarti sesuai dengan kenyataan sebab “benar” dan “faktual” adalah dua hal yang berbeda. Orang—tak peduli apa agama, pandangan politik, jenis kelamin, atau asal kebangsaannya—akan mengatakan bahwa kalimat-kalimat contoh di atas tidak masuk akal. Powis melenggang bukan *bersama*, melainkan *di atas* kapalnya. Dia bicara bukan *dengan*, melainkan *melalui* telepon selulernya.

“Benar” itu sendiri bukan tidak menyimpan persoalan. Berbeda dari “logis” yang bebas nilai dan berwajah tunggal, “benar” bersifat subyektif dan berwajah ganda, berimpitan dengan pandangan dunia sesiapa yang mengutarakannya. Satu kenyataan yang sama, di mata orang atau kaum berbeda, bisa diartikan secara berbeda pula, dan masing-masing akan menyatakan diri benar.

Pemerintah Belanda menyebut *aksi polisionil* untuk operasi militer dulu pada 1947 dan 1948 di tanah jajahannya, Hindia-Belanda, sedangkan bangsa Indonesia lebih suka memakai istilah *agresi militer*. Pelajaran sejarah dunia di sekolah dasar kita masih

menyebutkan bahwa si petualang Italia Christopher Columbus *menemukan* Benua Amerika pada akhir abad ke-15, padahal suku-suku Indian sudah hidup di benua itu lama sebelum Columbus menjejakkan kakinya di sana. Penyebutan atau pemaknaan yang berlainan bisa terjadi karena perbedaan sudut pandang. Namun, ilmu bahasa berhenti pada momen tatkala salah satu atau kedua belah pihak bersikukuh pada pandangan sendiri, enggan menelisik dan menerima pandangan lain.

Hitler, pada awal 1933, menistakan semua karya seni modern yang tidak sejalan dengan pandangan rezim sosialisme-nasional—dia sendiri pada awal 1920-an selalu ditolak masuk akademi seni sebagai pelukis. Selang bertahun kemudian, Mei 1933, dia membakari buku-buku yang berseberangan dengan pandangan rezimnya di kota-kota besar Jerman. Aparat negara Republik Indonesia, Juli lalu di Depok, secara demonstratif juga membakar entah berapa ribu buku pelajaran Sejarah untuk sekolah menengah karena dipandang salah tidak mencantumkan akronim PKI pada G-30-S.

Lihatlah, pembakaran buku oleh aparat negara sebulan sebelum perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu menyertakan klaim keras bahwa hanya pendapat mereka yang benar. Dan, menebas pendapat lain. Dan, kita ingat ucapan penyair Jerman Heinrich Heine yang kerap dikutip bahwa manakala sudah membakar buku, akhirnya orang akan membakar manusia.

Seperti dalam peristiwa pada era fasis Jerman, di balik ritual bakar buku pelajaran di Depok tampak bagaimana kuasa politik merasuki bahasa dalam bentuk istilah-istilah sarat makna, malah cenderung berupa stigmatisasi: PKI, ketertiban umum, kurikulum eksperimen. Sarat makna, artinya istilah-istilah yang bertebaran di sana mestinya multitafsir dan terbuka bagi siapa saja. Bagi saya, bahasa selalu menarik justru karena segi pragmatismenya itu.

Tahulah kita, di tangan pemakainya bahasa dapat digunakan untuk banyak keperluan. Mewartakan, menghibur, membujuk dan memengaruhi, mengelola lalu menyimpan dan mewariskan pengetahuan, bahkan dipakai juga ia untuk memerikan, meluruskan, dan mempermainkan kenyataan.

6. Cemar

Pernah sekali waktu akal sehat anda terusik oleh klausa “mencemarkan nama baik”?

Saya pernah, apalagi dalam beberapa tahun belakangan. Omong-omong soal cemar, akan sampailah kita nanti pada satu titik saat kita agak gelagapan, tidak tahu lagi apa ini soal logika-dan-tata bahasa atau perkara tata susila, moralitas. Saya mulai saja dari aspek sintaksis dan semantik, mengingat ruang ini adalah kolom bahasa, bukan forum tempat membicarakan budi pekerti apalagi agama.

Cemar, bahasa, moralitas. Tiap kata punya kodrat sendiri dan punya makna unik. Seperti sidik jari manusia yang tidak memiliki kembar sempurna, tak ada dua kata atau lebih yang punya arti persis sama. Kodrat kata *cemar* adalah menjadi wadah tempat menampung segala hal yang berkenaan dengan najis, kurang-lebih setara dengan kotor, mesum. Dan sifat-sifat itu dalam cemar tidak hanya bertaut dengan barang, benda-benda (dekil, kotor, kumuh, mesum, atau butek, keruh), tetapi bisa juga menunjuk ke lisan, perkataan (cabul, carut), juga perbuatan (dursila, jangak) atau malah ke akhlak: bejat, tunamoral. Raden Anudiningrat mengusir anak perempuannya yang bunting sebelum nikah karena ia anggap telah mencemarkan nama baik darah biru wangjanya.

Turunan dari kata itu, *mencemarkan*, berarti menjadikan cemar (segala apa yang sebelumnya tidak atau belum tercemar). Penutur bahasa Indonesia tidak memerlukan nalar yang canggih demi memahami pernyataan selugas itu. Tidak bisa, atau paling tidak janggal, apabila mencemarkan dikenakan pada sesuatu yang sudah kotor. Itu boleh kita sebut menentang kodrat, menghina akal sehat, pamer kedunguan. Mencemarkan sesuatu yang sudah kotor tak bisa lain berarti membuat sesuatu jadi *lebih* kotor.

Orang, atau bisa juga lembaga, lancung yang gerah dan tak terima dituding-tuding, sebut saja P (penjahat), lalu berbalik menuntut penuding, kita namai dia M (yang mencemarkan), dengan dalih pencemaran nama baik, kadang bagi saya menggelikan (dalam

arti baik lucu maupun bikin jijik). Ia, yang suka membawa-bawa penasihat hukum, berkelit sembari sembunyi di balik asas praduga tak bersalah, sebuah prinsip yang menurut Profesor J.E. Sahetapy hanya berlaku di dalam ruang pengadilan (lihat <http://www.kompasiana.com/dadyandela/presumption-of-innocence>). Perilaku itu mirip tindakan penyair atau penulis kacangan yang menyuruk-nyuruk di balik *licentia poetica*. Setelah menumbuk-numbuk kaidah bahasa yang ia buta terhadapnya, lantang berkata: itulah kebebasan penulis!

Kasus seperti pemakaian kata *cemar* tidak sendirian dalam praktik kita berbahasa. Contoh lain yang paling dekat adalah *membersihkan sampah*. Seperti mencemarkan nama baik, tak ada salah pada bangun *membersihkan sampah* secara gramatika. Namun, tata makna adalah soal yang sama sekali berbeda. Di tataran maknalah kita dapat saksikan orang bodoh tengah membersihkan sampah, sementara orang yang tidak bodoh membersihkan jalanan (atau sungai, atau ruangan) dari sampah.

Izinkan sekarang saya mengajak anda melihat sedikit lebih jauh dimensi lain makna, yang keluar dari artefak bahasa, katakanlah semacam metabahasa. Baju, tembok, burung emprit, benda-benda bukan manusia tak bakal bereaksi manakala dicemarkan—sekalipun sampai berulang kali. Namun, tidak P. Ia jadi berang, sebab menurut dia M telah mencemarkan nama baiknya, sedangkan M tidak merasa begitu karena sejauh yang ia tahu, kiprah P tidak membuktikan kehadiran sebuah nama baik. Sekian informasi tentang P yang M serap (baca, dengar, lihat) cukup menjadi alasan M menilai P tidak punya nama baik. P dan M bersimpang paham di klausa *mencemarkan nama baik*. Di mata M, mencemarkan nama baik P tidak lain dari *contradictio in terminis*. Bagaimana bisa mencemarkan nama yang sudah cemar?

Pengertian *nama baik* sudah ditangkap berbeda oleh kedua pihak yang bertikai itu. Pada M kita melihat bahwa pengertian, definisi, makna (*cemar* dan *nama baik*) meloncat keluar dari rumusan kamus, mencelat dari teks. Ia menggelandang ke konteks, ke alam dunia

nyata, demi mengumpulkan sejumlah fragmen buat menegaskan dirinya. Dari sudut M, perbuatan P menilap uang negara, menjegal lawan politik secara kasar, menjiplak karya orang lain—itulah cemar, bukan nama baik. Pada saat yang sama, P dapat meremukkan pengertian yang sudah terbangun tadi begitu bisa ia buktikan bahwa fragmen-fragmen tadi tidak benar, tidak faktual. Perbantahan soal di luar teks seperti itu sering kita lihat berlangsung amat liat dan keras. Dan di ujungnya menggantung pertanyaan: Di mana batas makna?

Di situ linguistik struktural jelas lumpuh, tak kuasa lagi memberi penjelasan yang memadai mengenai pokok soal. Mengingat bahasa adalah perkara konvensi dan hukum di dalamnya lebih dekat ke kode etik, saya kira batas tersebut terletak pada asas kepatutan. Akan tetapi, P rupanya siap dengan gugatan baru. Apakah patut itu? Patut menurut siapa? Siapa bisa bersaksi? Di sini sudah masuklah kita ke ranah linguistik pragmatik—sebuah subdisiplin ilmu bahasa yang barangkali dapat kita harapkan menjelaskan bopeng bahasa kebangsaan kita.

7. Ingin Kebelet

Perempuan periang kawan lama saya itu pada satu hari yang rada heboh tampil di layar televisi. Sayang, saya tidak melihat langsung, tetapi hanya menonton rekamannya lewat internet. Namun, di mata saya di menit itu ia masih saja menawan. *Ingin saya cium lagi dahi atau ubun-ubunnya, tapi tidak boleh*, dalam hati saya bergumam.

Pesona dia sudah membutakan saya. Itu kentara sekali, bagi saya, pada bangun kalimat di dalam hati saya tadi. Inilah kasus kebahasaan yang sanggup membuat saya alpa, meski cuma barang sebentar, pada si perempuan periang. Tata kalimat ini lebih mengundang saya memandangnya lebih dekat lagi. Apa istimewa kalimat yang sedikit menggelora itu?

Pertama-tama, rasa saya perlulah kita periksa kata kuncinya. *Ingin* mewakili dorongan yang bergolak dalam hati atau pikiran akan terwujudnya suatu perbuatan atau keadaan yang potensial, masih berdiam dalam benak subyek. Artinya, perbuatan atau keadaan itu belum mengejawantah, belum terlaksana di dalam kenyataan. Spektrum makna kata yang antara lain punya kesamaan arti dengan *hendak* dan *akan* ini merentang dari *angan* dan *cita-cita* di awang-awang sampai *kebelet* di depan pintu luar kamar kecil. *Hendak* atau *berangan-angan* menjadi lembu hanya ada dalam imajinasi. Dan *kebelet* kencing tentulah sangat kuat dorongan itu sekalipun belum sampai mencurah keluar seluruh air seni seseorang. *Bakal* berbuah, *ingin* minum bandrek, *hendak* tamasya, *mau* muntah, *berharap* anda dapat hadir, *akan* membangun pabrik sabun, *mencita-citakan* kedamaian di tanah Nusantara—semua pernyataan ini menggambarkan hal-hal yang belum ada, belum terjadi.

Demi menegaskan premis yang cukup sering saya utarakan bahwa tak ada dua kata atau lebih yang punya arti persis sama, kita tengoklah sebentar arti kata *akan* di medan makna *ingin*. Kata ini, dalam lingkungan senarai sinonimnya (*ingin*, *hendak*, *mau*), beririsan makna di satu ruang yang sama-sama berisi pengertian "dorongan yang bergolak dalam hati atau pikiran akan terwujudnya suatu perbuatan atau keadaan yang sebenarnya potensial". Artinya,

ia berada dalam kesadaran dan dapat dikendalikan oleh subyek. Namun, *akan* di satu titik menyempal dari ruang makna bersama itu, yakni dalam hal ia membawa serta unsur ketidaksadaran dan tak terkendalikan (oleh subyek). *Rumah ini akan dijual* tentu saja *menyiratkan* rumah tersebut tidak punya kesadaran, tidak punya keinginan. Atau ini: *Tampaknya akan hujan badai*. Di dalam pengertian begitu, *akan* kita lihat lebih dekat ke *bakal* daripada ke *ingin*. Tidak lazim mengatakan: *Tampaknya ingin hujan badai*. Menjadi semakin teranglah bahwa *ingin* sepenuhnya berada dalam kesadaran, dan di bawah kendali, sang subyek.

Subyeklah yang punya kuasa atas kata putus apakah *ingin* itu dilaksanakan atau tidak. Sebentar kita kembali ke perempuan periang di atas. Bila tiga kata terakhir *tapi tidak boleh* saya tanggalkan, apakah keinginan saya menjadi pupus, batal? Tidak, sudah pasti tidak. Hanya, *ingin* itu tetap tinggal menjadi keinginan belaka—*selama apa yang saya inginkan tidak saya kerjakan*. Tiga kata yang menegaskan, yang membawa larangan bagi pernyataan sebelumnya, di situ tak punya makna praktis, tidak punya fungsi apa-apa alias mubazir. Namun, bila saya mewujudkan *ingin* itu (berbarengan dengan kehadiran tiga patah kata terakhir), yang kita dapati kemudian adalah sebuah paradoks. Sadar tidak boleh, namun dikerjakan juga.

Dalam bentuk tindak ujaran, misalnya, *Ingin saya katakan orang itu anjing, tapi tidak boleh*, tiga kata terakhir justru membawa tanda tanya sangat besar, sebab apa yang tidak boleh itu betapapun sudah diujarkan, tidak membatalkan kehadiran ujaran *saya mengatakan (katakan) orang itu anjing* dalam kenyataan. Maka, kata *ingin* di awal kalimat itu sama sekali tak membawa peran atau pesan apa-apa. Dibuang ke tempat sampah pun tak mengapa.

8. (Bukan) Sesat Bahasa

Di dalam orang membicarakan sesat bahasa, salah satu pokok yang sering berulang adalah soal yang ”sederhana”. Antara lain, awalan dan kata depan yang bertukar-tukar tempat (*di jual, dimana, di kontrakkan, diantara*), pemakaian kata yang tidak pada tempatnya (*mengharu biru, emosi*), atau tata cara penulisan kata (*sembilanbelas, tujuhribu, bergeming, mengritik, merubah*). Padahal, teks-teks panduan berbahasa, juga kamus atau pedoman ejaan, kini sudah makin mudah diperoleh, edisi cetakan maupun edisi dalam jaringan. Jangan pula lupa, para pemerhati bahasa Indonesia sudah sejak lama menyiarkan pikiran mereka lewat berbagai media yang punya ruang untuk topik kebahasaan, insidental atau sebagai rubrik tetap, baik media cetak, seperti *Intisari, Kompas, Optimis, Pikiran Rakyat, Riau Pos, Suara Karya, Tempo* maupun stasiun televisi (kita ingat Amin Singgih, Anton Moedardo Moeliono, Jusuf Sjarif Badudu) dan radio.

Dan tidak hanya itu. Ivan Lanin pernah secara berkala mengunggah tulisan kebahasaan di berbagai media cetak ke situs buaatannya. Lalu juga, seperti ingin merengkuh pembaca yang lebih luas, tulisan-tulisan tadi pun diterbitkan kembali dalam bentuk buku. Kumpulan artikel ini ada yang terbit atas nama seorang penulis, tetapi ada juga yang berupa himpunan oleh sekaligus beberapa penulis.

Kenyataan tersebut setidaknya menjelaskan betapa banyak, dan sering, informasi tentang pelbagai masalah kebahasaan disajikan kepada khalayak, para pengguna bahasa Indonesia. Namun, mengapa penggunaan bahasa—terutama dalam ragam tulis—tak kunjung mencerminkan pemahaman yang memadai mengenai kaidah bahasa Indonesia, bahkan kaidah yang paling sederhana sekalipun?

Tidak bisa kita buru-buru menyimpulkan bahwa sekian banyak informasi kebahasaan tadi tidak disimak oleh banyak penutur bahasa Indonesia termasuk, atau terutama, oleh mereka yang bergelut dalam dunia tulis-menulis. Kecuali kita berasumsi mereka malas membaca, jangan lagi melakukan riset atau bertukar pikiran dengan orang lain.

Mari kita bayangkan, dalam siklus waktu tertentu, setelah satu lapisan khalayak cukup memahami kaidah berkat persentuhan yang cukup lama dan intens dengan bahasa (Indonesia), hadir menyusul satu lapisan baru yang belum mengerti banyak. Seperti sekelompok editor senior (kata lain dari sepuh, tua) dalam sebuah penerbitan besar memasuki masa pensiun, dan kemudian digantikan oleh sejumlah editor junior (bau kencur). Permutasi periodik itu berlangsung kurang lebih secara tetap. Kecakapan berbahasa selalunya berkembang sedikit demi sedikit seiring dengan makin seringnya mereka bergulat dengan teks, dengan bahasa. Siklus ini membantu menjelaskan mengapa para polisi bahasa ceriwis mengenai topik itu-itu saja: yaitu soal yang "sederhana" seperti disinggung di awal. Sekaligus ia menunjukkan kepada kita, pengetahuan (dasar) sebagian penutur bahasa Indonesia tentang bahasa sendiri tampaknya tak pernah cukup. Ini terutama kita lihat dalam ragam tulis.

Ironis. Mereka yang lebih sering berurusan dengan bahasa malah cenderung tidak menguasai kaidah bahasa, baik dalam tataran tata kalimat maupun tata makna.

Dari sinilah kita dapat mengatakan, bila demikian maka persoalan terletak bukan dalam bahasa, tetapi dalam diri si penutur. Itulah mengapa kita perlu sedikit berhati-hati terhadap ungkapan "soal bahasa". Jika ada orang menulis *merubah* padahal yang ia maksud adalah *mengubah*, di mana letak soal bahasanya? Sudah terang-benderang bahwa *mengubah* 'membuat jadi berubah' berasal dari kata dasar *ubah* yang memperoleh awalan *me-*. Tidak ada awalan *mer-* dalam bahasa Indonesia. Karena itu, *merubah* tidak bisa lain berarti 'menjadi rubah', bukan 'membuat jadi berubah'.

Kita menyebut soal bahasa manakala soalnya menyangkut bahasa. Ini contoh serampangan: Bentuk *terang-benderang* itu perlu menggunakan tanda hubung atau tidak? Mengapa kata *anda* harus ditulis dengan huruf awal kapital, sedangkan *engkau*, *kamu*, *sampayan* tidak? Soal-soal yang tidak bisa lagi dikatakan sederhana saya kira.

9. Sengkarut UU Bahasa

Bahasa Indonesia sedang sakit parah. Ia kian tidak dimengerti dengan baik, dan kian dijauhi oleh sebagian besar penuturnya, termasuk kaum terpelajar, kalangan pendidik, insan pers, bahkan para petinggi negara. Penyebabnya jelas, namun menjadi tampak agak ruwet dalam bulan-bulan terakhir ketika Rancangan Undang-Undang Bahasa sedang dimatangkan oleh Pusat Bahasa.

Apakah demi penyembuhannya kita memerlukan sebuah undang-undang? Tidakkah soalnya terletak pada bahasa dan bagaimana cara kita memandangnya, bukan pada perilaku orang berbahasa? Bukankah menggagas, merancang, serta berupaya meyakinkan khalayak adalah laku politik yang tidak menempatkan bahasa sebagai pokok soal?

Para penggagas Undang-Undang Bahasa mestinya maklum bahwa sakit bahasa Indonesia erat bertalian dengan memudarnya secara perlahan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Ini berlangsung kurang lebih berbarengan dengan semakin mendalamnya pergaulan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain, juga antara satu suku dan suku lain, yang banyak dimudahkan oleh teknologi komunikasi.

Kaidah bahasa Indonesia tentu akan terus memudar selama kebijakan kebahasaan keluaran Pusat Bahasa lebih banyak menimbulkan kebingungan. Harimurti Kridalaksana (2007) menulis, “telah terjadi kegoncangan dalam tata nilai para penutur, yakni penutur telah kehilangan kemampuan menentukan mana yang betul mana yang salah dalam berbahasa”. Namun, kita tidak bisa tergesa-gesa menyalahkan penutur. Sebab, masih menurut Harimurti, beberapa kali Pusat Bahasa membuktikan dirinya “menjadi sumber ketidakstabilan bahasa, dalam arti penutur akan terus-menerus ragu-ragu dan bertanya-tanya mana yang betul dan mana yang salah”. Maka, yang kita lihat di sana, tata kaidah bahasa Indonesialah, bukan tata nilai pengguna, yang kini sedang guncang.

Mari kita bayangkan apa yang terjadi bila undang-undang kebahasaan diberlakukan. Pertama-tama, ia bisa jadi akan membidik

pengguna bahasa Indonesia, siapa pun orang atau lembaganya, yang tidak sedang menyeleweng, melainkan tengah dibuat bingung justru oleh badan yang berperan besar melahirkannya. Dan “kesalahan” itu, karena yang dilanggar adalah peraturan setingkat undang-undang, mestilah dibawa ke meja hijau—satu proses yang sulit kita bayangkan.

Juga pelik adalah soal pemberlakuannya kelak mengingat sebagai karya hukum undang-undang ini niscaya tidak mengenal perkecualian dan mensyaratkan adanya sanksi hukum. Sekadar catatan, pencantuman pasal mengenai tata perizinan membuat undang-undang ini mudah beralih rupa menjadi alat bagi penguasa, selain rawan dari segala bentuk kesalahan prosedur, yaitu sebuah kosakata baru dengan makna lebih lembut untuk penyelewengan. Semua ini tentu membawa iklim tak sehat yang tidak, atau kurang, menyisakan ruang bagi publik untuk melakukan tawar-menawar atau bereksperimen dan bermain-main dengan bahasa.

Undang-undang itu sangat tidak masuk akal, tidak lain karena mengandung cacat bawaan berupa pengingkaran terhadap hakikat bahasa yang terus berubah dan berwatak manasuka. Ia mudah menjelma tempat bersembunyi ancaman berupa pemaksaan negara terhadap individu atau sebuah komunitas yang dapat berakibat sekaligus membekukan bahasa dan menepikan keragaman berbahasa. Tengoklah, masih bersandar pada Politik Bahasa Indonesia tahun 1975 dan tahun 2000, undang-undang ini menyodorkan tiga wadah untuk bahasa Indonesia, bahasa daerah (tidakkah sebaiknya, sebagaimana diusulkan Ajip Rosidi, kita gunakan istilah *bahasa ibu?*), dan bahasa asing. Mengejutkan adalah penggunaan kata *intervensi* di sana untuk mengingatkan kita betapa berbahaya percampuran di antara ketiga ragam bahasa itu. Cara pandang demikian mengundang tanda tanya, di mana batas-batasnya? Haruskah intervensi dicegah?

Itulah salah satu bentuk nyata pengingkaran terhadap hakikat bahasa yang sedikit banyak terpengaruh oleh paham nasionalisme sempit. Lagi pula, gampang saja para perancang undang-undang itu menyatakan bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi di tingkat nasional sambil pada saat yang sama *mewajibkan pemerintah*

memelihara bahasa ibu demi pelestariannya “sebagai kekayaan budaya nasional dan sumber pengembangan bahasa Indonesia” (cetak miring dari saya).

Dilupakan di situ, berbeda dari alam Sumpah Pemuda—yang jelas masih menjadi model di dalam penyusunan Undang-Undang Bahasa—kini soalnya bukan lagi mengatasi kecemasan akan datangnya penjajah, atau bangsa akan terbelah-belah, dengan mengidamkan sebuah bahasa persatuan. Bukankah kini, 35 tahun setelah ejaan baru diperkenalkan, istilah “baku” sudah merebakkan aroma tak sedap, mendekat pada sifat seragam, tertutup, jumud, konservatif?

Juga tampaknya dilupakan, berdampingan dengan semakin banyak orang yang kini lebih terbiasa berpikir dalam bahasa asing, ada jutaan rakyat Indonesia di pelosok-pelosok yang masih buta bahasa Indonesia. Dan bagi kedua golongan pengguna ini, bahasa Indonesia sama asingnya dengan bahasa asing dan bahasa ibu di mata para penggagas Undang-Undang Bahasa.

Apakah Undang-Undang Bahasa di tengah sengkarut bahasa Indonesia seperti itu? Sulit menepis pendapat bahwa biang penyakit yang kini diidap bahasa Indonesia terletak pada, atau bersumber dari, para penentu kebijakan kebahasaan yang seolah sudah kehilangan pedoman dan, berbarengan dengan itu, juga pamor atau wibawa. Lalu sekarang, bukannya memeriksa dan menyembuhkan sakit bahasa Indonesia, diam-diam mereka malah memperlihatkan hasrat berkuasa atas nama hukum lewat Undang-Undang Bahasa. Inilah yang kita lihat kemudian: bergerak persis di tengah tegangan yang niscaya antara bahasa dan politik, jawatan pemerintah yang biasa bertugas mencatat dan meneliti bahasa dan sastra nasional ini, gagal merumuskan inti persoalan.

Yang sudah dapat kita bayangkan sedari sekarang, segala jerih payah merumuskan aturan hukum di bidang kebahasaan sampai entah jadinya nanti—dengan anggaran yang sungguh tidak sedikit—akan menjadi kerja dan berkas percuma. Saya teringat pada Sutan Takdir Alisjahbana yang pernah mendesak agar jawatan itu dibubarkan saja. Sutan Takdir barangkali berlebihan, sebab

betapapun bahasa dan sastra se-Nusantara perlu diurus oleh sebuah kantor. Akan tetapi, memberi kewenangan hukum pada instansi itu, atau badan lain, mengenai soal kebahasaan saya kira sama berlebihan. Sebab, alangkah musykil menangani sengkabut bahasa dengan sebuah undang-undang, dengan kekuasaan.

Bagi saya, jauh lebih penting adalah mereka-reka kembali rupa bahasa Indonesia–mungkin saja perlu semacam operasi plastik di sana-sini terhadap sekian aspek dalam bahasa Indonesia–setelah sekian lama berbenturan, yang kadang sangat keras, dengan bahasa asing dan dengan bahasa ibu.

Seperti sudah cukup jelas kita lihat, yang kini sedang guncang bukan hanya tata kaidahnya melainkan juga batas-batas pengertian kita mengenai bahasa Indonesia. Hari ini tantangan bagi para empu bahasa Indonesia–ke mana mereka di tengah perbalahan mengenai Undang-Undang Bahasa?–termasuk yang bekerja di jawatan bahasa, adalah keberanian mempertimbangkan kembali asumsi-asumsi yang mungkin sudah lapuk.

Undang-Undang Bahasa, singkat kata, hanya menunjukkan betapa jawatan bahasa ingin menyelesaikan sangat banyak pekerjaan rumah dengan cara mudah.

Sayangnya harus kita katakan, bukan undang-undang kebahasaan yang kita perlukan, melainkan cara dan adab yang lebih elok di dalam memelihara dan menyuburkan baik bahasa Indonesia maupun bahasa ibu.

10. Genit

Memilih kata di dalam berbahasa pada praktiknya sering tidak mudah. Akan selalu merasakan sebuah kata kurang persis mewakili sesuatu maksud. Namun juga, akan selalu ada godaan bergenit-genit, memamerkan berbagai model gaya. Ini paling gampang kita lihat di dalam penggunaan kata. Ada penulis yang gampang tergoda lebih mengutamakan efek—entah kemerduan bunyi, entah kesan intelektual, atau entah cuma ingin beda sendiri—daripada keperluan menyampaikan pengertian yang terang. Ini biasanya diusahakan antara lain lewat pemakaian kata-kata yang pelik—mungkin bentuk arkais, mungkin dicomot dari bahasa asing, atau mungkin pula yang terkesan dibuat-buat, seperti: "dicermatmaknai", "berjumpa-kenal".

Mementingkan efek ketimbang keperluan menyampaikan pengertian yang terang itu dilakukan mungkin demi memikat pembaca, satu hal yang, jika dikerjakan tidak dengan hati-hati, dapat mengakibatkan pesan menjadi kabur. Sebaliknya, apabila seorang penulis mampu menggarap dengan tepat dan tekun terus-menerus, ini boleh jadi justru dapat melahirkan idiosinkrasi, gaya dia seorang. Namun, bayangkan ada seorang penyair yang berkilah bahwa ia, secara sadar dan sengaja, sedang bereksperimen mendobrak kaidah tata bahasa dalam puisi-puisinya. Padahal, bisa kita temukan ada bagian yang memperlihatkan bahwa ia tidak memahami benar perbedaan cara menuliskan "keluar" dan "ke luar".

Entah apa gerakan yang mendorong penulis bergenit-genit, tetapi tidak ia mengerti kaidah bahasa yang mendasar seperti itu, atau sekurang-kurangnya menampakkan sikap abai.

Itukah yang disebut *licentia poetica*? Boleh jadi soal ini tidak asing lagi, atau jangan-jangan malah sudah cukup sering "mengganggu", dalam dunia tulis-menulis. Konsep penting demi kreativitas dalam dunia tulis-menulis yang diperkenalkan filsuf Romawi kelahiran Kordoba, Lucius Annaeus Seneca ini di negeri kita beberapa waktu belakangan tampaknya malah menjadi tempat banyak penulis bersembunyi dan mencari suka. Mungkin inilah salah satu pokok soal yang paling membuat pening kalangan penyunting. Konsep

tersebut seolah telah menjelma hukum yang tampaknya cenderung lebih memihak dan memanjakan penulis.

Licentia poetica adalah semacam lisensi, izin, tak tertulis yang dikantongi penyair untuk menyimpangi kaidah bahasa demi mencapai efek tertentu yang dia inginkan. Kemudian, entah bagaimana keleluasaan ini seolah-olah dianggap menjadi milik sastrawan pada umumnya, bukan hanya yang menulis puisi. Inilah kuasa sastrawan menabrak rambu-rambu bahasa demi pengungkapan nilai-nilai artistik yang, dengan demikian, dipandang lebih penting dari aturan bahasa.

Apakah "efek" atau "nilai-nilai artistik" ini kalau bukan sebuah kualitas atau sifat, sebetuk kesan, yang dirasakan oleh pembaca? Maka, yang jadi soal sebenarnya bukan bagaimana "membuat", tetapi bagaimana "menyampaikan" efek, nilai artistik, atau kesan itu kepada pembaca. Perbuatan melanggar bukanlah sebuah tujuan, melainkan sarana belaka. Jalan berpikir ini mengantarkan kepada kita kesimpulan bahwa kebebasan dalam *licentia poetica* bukan terutama dimaksudkan untuk membuat (baca: mencari-cari) efek alias bergenit-genit, melainkan lebih menyerupai alat bantu bagi penulis guna menerabas kebuntuan—dalam keadaan darurat.

Lisensi ini sebetulnya bekerja dengan sejumlah asumsi. Pertama, mereka yang melaksanakannya sungguh-sungguh terdorong oleh keperluan menyatakan satu hal, tetapi ia merasa terhambat oleh daya ungkap bahasa. Ini mengisyaratkan bahwa penyimpangan kebahasaan olehnya tadi adalah, katakanlah, suatu tindakan darurat, setelah ia habis-habisan menjelajahi pelbagai kemungkinan yang tersedia dalam bahasa. Dan ini mengantarkan asumsi kedua, bahwa mereka yang mempraktikkannya tahu, sadar akan apa yang ia langgar. Artinya, si pelanggar sungguh mafhum akan hukum atau kaidah bahasa yang berlaku.

Pertanyaannya kemudian, bisakah seseorang melanggar aturan bahasa, demi *licentia poetica*, padahal, seperti tadi sudah disinggung, ia tidak tahu persis perbedaan cara menulis "ke luar" dan "keluar" dalam kalimat? Tidak tahu perbedaan kata depan dan awalan? Tidak

tahu kaidah bahasa Indonesia yang sangat mendasar, elementer, dan mungkin sekali itu sebabnya ia bersembunyi di sana, di balik "mantra" *licentia poetica*?

Melanggar aturan bahasa demi *licentia poetica* adalah satu hal, sedangkan buta kaidah bahasa Indonesia adalah hal lain. Dua soal itu saya kira tidak dapat diperbaurkan. Bagi saya, kepatuhan pada kaidah dalam berbahasa menunjukkan bukan sebuah sikap taat, tunduk, melainkan wujud sebetuk rasa hormat kepada, dan rasa bangga terhadap, norma, yaitu norma-norma bahasa Indonesia, yang memang sudah sepatutnya kita junjung bersama.

11. Bahasamu Kastamu

Tidak ada yang istimewa benar pada bahasa Indonesia kita dibandingkan dengan bahasa umumnya di mana-mana pun. Bahasa Indonesia adalah cara orang Indonesia terhubung satu sama lain. Antara mereka yang bersekolah tinggi dan yang buta huruf, antara si kaya dan si papa, antara lelaki dan perempuan, antara kaum muslim dan mereka yang punya agama berbeda, antara pejabat dan rakyat, antara orang Lamongan dari tanah Jawa dan Patipi dari bumi Papua, antara penegak hukum dan para durjana. Bahasa Indonesia dipakai bukan hanya oleh mereka yang berasal dari golongan, kelamin, derajat, agama, atau ras yang sama. Dan *Indonesia* dalam frasa "bahasa Indonesia" jelas menjadi pewatas kita sebagai (sesama) bangsa Indonesia yang bertutur dalam bahasa Indonesia, entah sebagai bahasa ibu atau bahasa kedua.

Bahasa Indonesia yang kita pakai itulah alasan pertama masing-masing dari kita bisa menyebut diri sebagai orang Indonesia. Namun, tidak bisa dengan gampang kita mengatakan bahwa bahasa gado-gado dalam pertuturan dengan bahasa Indonesia yang bercampur dengan sejumlah kata dari bahasa asing dan daerah tidak dapat disebut sebagai bahasa Indonesia (yang baik dan benar). Definisi "bahasa Indonesia" saya rasa bukan pertama-tama berangkat dari kemestian bahwa ia dibangun dari kata asli Indonesia. Tidak saja karena batasan "asli" itu goyah, tetapi juga karena bahasa punya fungsi melampaui sekadar perkakas atau cara kita berkomunikasi.

Celakanya, tuntutan berbahasa yang baik dan benar tidak jarang melupakan sifat kaidah di dalamnya. Lupa bahwa kaidah, tentu saja termasuk kaidah di dalam bahasa, tidak lain dari norma atau etiket yang disusun berdasarkan kesepakatan orang-orang pemangku norma itu.

Norma bukanlah hukum positif buatan penguasa yang punya kekuatan memaksa. Tidak pernah kita jumpai ahli bahasa memukuli (atau petugas hukum memenjarakan) mereka yang berbahasa serabutan alias *ngawur*—sekalipun kita sudah punya undang-undang kebahasaan yang sudah disahkan pada 2009 silam. Ini kira-kira sama

mustahil atau absurdnya dengan seorang tuan rumah melaporkan tamu dia kepada polisi, sebab si tamu hanya mengenakan kaos singlet dan bersandal jepit.

Etiket tak punya urusan dengan perkara benar atau salah. Di mana salah orang yang makan tidak di meja makan dan tidak dengan perkakas, seperti sendok, garpu, atau pisau, tetapi di lantai dan dengan tangan telanjang? Yang kita jumpai dalam norma atau etiket adalah soal kepantasan, kepatutan yang terbentuk dari kebiasaan segolongan orang.

Berpegang pada ungkapan "Bahasamu kastamu", sederhana saja sebenarnya yang ingin saya katakan. Orang puritan di dalam berbahasa gampang menerbitkan sebal.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Epilog: Bahasa Menunjukkan Bangsa



Peribahasa kita dari masa lalu yang dijadikan judul di atas menyiratkan arti, (1) budi bahasa (perangai dan tutur kata) menunjukkan tabiat seseorang. Bisa juga berarti, (2) baik buruk perilaku menunjukkan tinggi rendahnya derajat asal atau keturunan seseorang. Tidak kita temukan arti *bahasa*, dan *bangsa*, seperti yang jamak kita mengerti dalam rumusan di sana. Sebab, bukan peribahasa namanya kalau ia berterus terang.

Bahasa di situ dibatasi pengertiannya sebagai budi bahasa, bukan perangkat komunikasi, baik lisan maupun tertulis. *Bangsa* dalam arti pertama peribahasa itu merujuk pada akhlak, pekerti, watak. Sementara itu, arti kedua menunjuk pada derajat atau martabat keluarga. Tabiat itu tak lain dari sebuah nilai yang didapat berkat dan lewat proses belajar. Derajat keluarga—di sini boleh dibaca sebagai kehormatan atau nama baik keluarga—adalah sebuah nilai yang terberi, turun-temurun. Pengertian ungkapan di atas bisa kita baca dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) susunan Pusat Bahasa (1988, hal. 66).

Arti kedua yang terletak di dalam tanda kurung langsung setelah definisi, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) Poerwadarminta (1966a, hal. 76) menjadi satu-satunya rumusan arti. Poerwadarminta tidak, atau belum, mencantumkan arti yang pertama. Kita catat perbedaan agak mencolok definisi peribahasa tadi oleh KUBI (1966) dan KBBI (1988). Pengimbuhan makna baru pada KBBI yang belum direkam oleh KUBI sebenarnya telah mencatatkan sebuah perubahan penting di dalam poses perkembangan kebudayaan kita.

Dahulu tampaknya orang dihormati terutama karena darah dan kedudukan. Status sosial yang tinggi, terutama dari aspek golongan darah (darah biru, bangsawan) mendapat tempat terhormat, seakan-akan segala yang baik otomatis adalah milik lapisan atas, dan keburukan mesti lekat pada kalangan bawah. Namun, kini semakin kentara betapa kalangan atas justru bisa bertingkah laku lebih culas daripada rakyat jelata. Baik busuknya pekerti bukan lagi sepenuhnya ditentukan oleh derajat, melainkan oleh tabiat. Atau, dalam kalimat berbeda, kini orang cenderung dilihat bukan lagi dari asal-usul, kedudukan, tetapi dari perilaku dan filnya.

Bahasa menunjukkan bangsa. Ulah atau perilaku seseorang menunjukkan tabiat atau adabnya. Di sini kita menemukan tawaran bahwa *bahasa* dalam “Bahasa Menunjukkan Bangsa” bisa searti dengan “tutur kata”. Maka, KBBI kiranya patut mempertimbangkan perumusan ulang makna peribahasa itu dengan menyertakan atau mengembalikan arti semula *bahasa* sebagai perangkat komunikasi berupa sistem lambang bunyi. Persoalan ini perlu dimajukan, sebab di tengah perbantahan mengenai siapa atau apa biang keladi kesemrawutan penggunaan bahasa Indonesia beberapa waktu belakangan, hampir selalu yang dituding sebagai kambing hitam adalah kalangan penutur. Padahal, tidak bisa disimpulkan begitu sekalipun tampak semakin membengkak jumlah penutur bahasa Indonesia yang kehilangan gairah memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penyimpulan tersebut bukan saja tergesa-gesa, melainkan juga agak meleset.

Penyimpangan terhadap aturan bahasa bisa terjadi bukan saja karena penutur tidak atau belum memahami kaidah yang berlaku. Dalam kebanyakan kasus, pelanggaran disebabkan oleh sifat sembrono, masa bodoh, atau tidak peduli. Artinya, penyimpangan itu dilakukan dengan sadar. Sekalipun demikian, sulit diterima akal sehat bila demi mengatasi soal kebahasaan seperti ini, pemerintah, c.q. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sampai merasa perlu mempergunakan perangkat hukum setingkat undang-undang. Dari pusaran sengkabut itulah buku ini mengajukan pemikiran “bukan undang-undang kebahasaan yang kita perlukan, melainkan

cara dan adab yang lebih elok di dalam memelihara dan menyuburkan baik bahasa Indonesia maupun bahasa ibu”.

Kita lihatlah sebentar, ajakan kepada publik supaya berbahasa dengan baik dan benar memendam sedikitnya dua persoalan. *Pertama*, salah satu pegangan pemakai bahasa Indonesia adalah KBBI. Akan tetapi, kamus bahasa Indonesia itu memperlihatkan tidak sedikit masalah yang cukup mendasar, yaitu di dalam ikhtiar membakukan kata. Ia seperti tidak punya pedoman atau kriteria yang jelas dan tegas mengenai aturan-aturan kebahasaan—soal pengejaan kata atau kaidah peluluhan pada kata berimbuhan, misalnya. Tidakkah berlebihan mendesak penutur agar berbahasa dengan baik dan benar, sedangkan kamus resmi sebagai pedoman berbahasa yang tertib dan majelis malah lebih sering membuat mereka bingung daripada memberi tuntunan?

Kedua, tidak jarang desakan kepada khalayak agar berbahasa dengan tertib melupakan sifat kaidah di dalamnya. Lupa bahwa kaidah, termasuk kaidah bahasa, tidak lain dari norma atau etiket yang tersusun berdasarkan kesepakatan para pemangku norma yang bersangkutan. Norma bukan hukum positif buatan penguasa yang punya kekuatan memaksa. Tidak pernah kita jumpai ahli bahasa menghukum cambuk (atau aparat hukum menyeret ke penjara) mereka yang berbahasa serabutan alias *ngawur*—sekalipun kita punya undang-undang kebahasaan yang sudah disahkan pada 2009 silam. Etiket tidak berurusan dengan perkara benar atau salah. Yang kita jumpai dalam norma atau etiket adalah soal kepantasan, kepatutan, yang terbentuk dari kebiasaan segolongan orang.

Pendirian-pendirian di atas perlu dikaji lebih jauh demi membenahi banyak persoalan di seputar ikhtiar membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Tadi dikatakan, “bukan undang-undang kebahasaan yang kita perlukan, melainkan cara dan adab yang lebih elok di dalam memelihara dan menyuburkan baik bahasa Indonesia maupun bahasa ibu”. Penggunaan perangkat hukum untuk menangani soal kebahasaan tentu saja berlebihan. Absurd, bukan

saja karena aksi represif sungguh tidak pada tempatnya di sini, tetapi juga karena aturan di dalam berbahasa bukanlah perkara yuridis, melainkan lebih dekat ke persoalan etiket, tata krama.

Sebagai penutup, bolehlah kita ringkaskan, “Bahasa Menunjukkan Bangsa” menyatakan kepada kita bahwa cara berbahasa seseorang mencerminkan secara nyaris sempurna kepribadian dia.

Daftar Rujukan



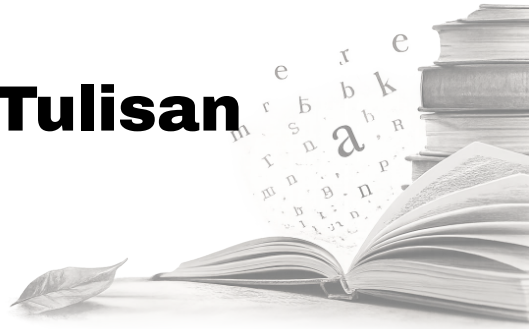
- Adlawi, S. (2013, 26 Agustus-1 September). Kata yang Berkembang Biak. *Tempo*.
- Bachri, S. C. (2001). *Hujan Menulis Ayam*. Indonesiatara.
- Berlian, S. (2014, 27 September). Kata Asing. *Kompas*.
- Candi Kethek di Gunung Lawu Mulai Digali. (2005, 11 September). *Tempo Interaktif*.
- Chaer, A. (2009). *Kamus Dialek Jakarta*, edisi revisi. Masup.
- Chudori, L. S. (2010). *9 dari Nadira*, cetakan II. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Dam, N. van. (2009, 30 Maret). Kamus Besar yang Agak Terlalu Sempurna. *Tempo*.
- Endarmoko, E. (2006). *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Endarmoko, E. (2006, 15 Oktober). Bahasa Kebangsaan. *Tempo*.
- Endarmoko, E. (2007, 26 Maret) Sengkarut Undang-Undang Bahasa. *Tempo*.
- Endarmoko, E. (2014, 23 Juni). Kaidah yang Goyah. *Tempo*.
- Endarmoko, E. (2015, 10 Januari). Pesona Bicara Canggih. *Kompas*.
- Endarmoko, E. (2016). *Tesamoko, Tesaurus Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Gramedia Pustaka Utama.
- Endarmoko, E. (2018, 25 Februari). Jumlah Dahulu, Mutu Nanti Dulu. *Tempo*.
- Endarmoko, E. (2019). *Polisi Bahasa, Tentang Peran Penutur yang Absen*. Penerbit Buku Kompas.
- Gerung, R. (2014, 29 September). Politik dan Akronim. *Tempo*.

- Hamsun, K. (2013). *Lapar*, cet. Kedua. (Marianne Katoppo, Pen.). Yayasan Obor. (Karya asli diterbitkan 1980).
<http://www.kompasiana.com/dadyandela/presumption-of-innocence>
https://corpora.uni-leipzig.de/en?corpusId=ind_mixed_2013
- Isnaeni, H. F. (2010, 21 Desember). Dari SBY Sampai SDSB. *Historia*.
- Kridalaksana, H. (2007, 4 Februari). Tata Nilai Bahasa Penutur Sedang Goncang?. *Tempo*.
- _____. (2009). *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*, cetakan V. Gramedia Pustaka Utama.
- Lasminah, P. (1981). W.J.S. Purwadarminta, *Hasil Karya dan Pengabdian*. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Leech, G. (1981). *Semantics, The Study of Meaning*, second edition—revised and updated. Pelican Books.
- Makins, M. (editor pelaksana). (1993). *Collins English Thesaurus in A-Z Form*. HarperCollins.
- Malay Corcodance Project, Diakses dari laman <http://mcp.anu.edu.au>
- Martinet, J. (2010). *Semiologi, Kajian Teori Tanda Saussurian, Antara Semiologi Komunikasi dan Semiologi Signifikasi*. (Stephanus Aswar Herwinanto, Penerj.). Jalasutra.
- Merriam-Webster's Collegiate Thesaurus*. (1993). Merriam-Webster
- Moeliono, A. M. (2009, 30 Desember). Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia. *Kompas*.
- Parsidi, A. (1994). *Aids, Kamus Akronim, Inisialisme, dan Singkatan*, edisi kedua dengan suplemen. Pustaka Utama Grafiti.
- Perda Pendistribusian Elpiji 3 Kg Segera Berlaku. (2015, 21 April). *Waspada*.
- Perlu Ada UMK Berdasarkan Jenis Skala Usaha. (2012, 22 November). *Pikiran Rakyat*.
- Polisi Jaga Ketat Pendistribusian Soal. (2015, 3 Mei). *Pikiran Rakyat*.
- Porwadarminta, W.J.S. (1966a). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bagian Pertama*, cetakan keempat. Balai Pustaka.
- Porwadarminta, W.J.S. (1966b). *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bagian Kedua*, cetakan keempat. Balai Pustaka.

- Sani, A. (1972). *Dari Suatu Masa dari Suatu Tempat*. Pustaka Jaya.
- Subsidi BBM akan Dibatasi. (2010, 13 Maret). *Kompas*.
- Teeuw, A. (1984). *Sastra dan Ilmu Sastra, Pengantar Teori Sastra*. Dunia Pustaka Jaya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, cet. 3. Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2. Balai Pustaka.
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat. Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Redaksi Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (2009). *Tesaurus Alfabetis Bahasa Indonesia*. Mizan.
- Toer, P. A. (1981). *Bumi Manusia*, cetakan V, dengan perbaikan teknis dan redaksional, Februari. Hasta Mitra.
- Utami, Ayu. (2012). *Cerita Cinta Enrico*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Winchester, Simon. Maret 2007. *The Professor and the Madman, Sebuah dongeng tentang pembunuhan, kegilaan, dan pembuatan* Oxford English Dictionary, cet. kedua (Bern Hidayat, Penerj.). Serambi Ilmu Semesta.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Sumber Tulisan



I. Aturan Asyik

1. “Xenofobia”
Tempo, 14 Januari 2007
2. “Aturan Asyik”
Kompas, 3 Oktober 2015
3. “Kata (Kem)Ayu”
Tempo, 29 Desember 2014
4. “Dikontrakkan atau Di kontrakkan”
Kompas, 19 Agustus 2017
5. “Mengendali”
Kompas, 7 Oktober 2017
6. “Menyinyalir”
Kompas, 14 Juni 2014
7. “Proses”
Kompas, 4 Juli 2015
8. “Sundal Bolong”
Tempo, 13 Januari 2014
9. “Tapi Sebagai Awal”
Tempo, 17 Februari 2008
10. “Paradoks”
Tempo, 24 Agustus 2009
11. “Polisi Kitab”
Kompas, 11 November 2017
12. “Kaidah yang Goyah”
Tempo, 23 Juni 2014

II. Tata Kata

1. “Yang Datang dan Pergi”
Kompas, 14 Oktober 2017
2. “Rudin”
Tempo, 23 April 2006
3. “Bulur”
Tempo, 1 September 2014
4. “Gerbong”
Tempo, 24 September 2017
5. “Tata Kata”
Tempo, 31 Mei 2010
6. “Memakai Tesamoko”
Kompas, 7 Mei 2016
7. “Pesona Bicara Canggih”
Kompas, 10 Januari 2015
8. “Merdeka”
Tempo, 13 Agustus 2023
9. “Dua Tentang”
Kompas, 1 Agustus 2015
10. “Heran”
Kompas, 6 Juni 2015
11. “Dari VOC ke Bahenol”
Kompas, 1 November 2014
12. “Singkat Kata”
Kompas, 4 Oktober 2014
13. “Bahasa Baku: Catatan ala Kadarnya”
Tempo, 4 April 2015

III. Makna yang Merewang

1. “Bentuk Bersaing”
Tempo, 13 November 2017
2. “Makna yang Merewang”
Kompas, 5 September 2015

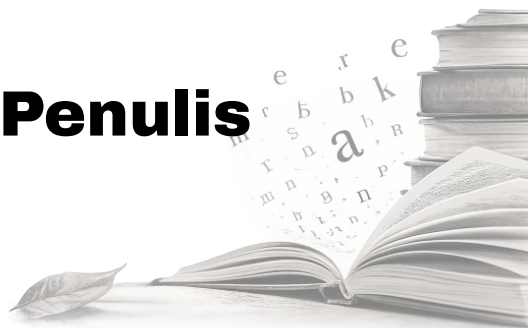
3. “Merah Putih”
Kompas, 4 April 2015
4. “Mengomunikasikan atau Menyampaikan”
Kompas, 6 Desember 2014
5. “Tikus yang Tak Mati-Mati”
Kompas, 2 Mei 2015
6. “Kampung Halaman”
Kompas, 7 Maret 2015
7. “Gado-Gado”
Tempo, 15 Oktober 2023
8. “E”
Kompas, 14 Mei 2024
9. “Saling”
Kompas, 20 Februari 2024
10. “Asli”
Tempo, 23 Oktober 2023
11. “Pengalaman”
Kompas, 18 Juli 2023
12. “Tambun”
Tempo, 21 Mei 2023
13. “Lisan”
Tempo, 25 Desember 2022

IV. Bahasamu Kastamu

1. “Kisah”
Kompas, 6 September 2014
2. “W.J.S. Poerwadarminta, Bapak Kamus Indonesia”
Tempo, 19 Mei 2008
3. “Bahasa Menunjukkan Bangsa”
Tempo, 16 Juli 2006
4. “Bahasa Kebangsaan”
Tempo, 9 Oktober 2004
5. “Membakar Buku, Merayakan Kemerdekaan”
Tempo, 26 Agustus 2007

6. “Cemar”
Tempo, 28 November 2016
7. “Ingin Kebelet”
Kompas, 10 Desember 2016
8. “(Bukan) Sesat Bahasa”
Kompas, 7 Februari 2015
9. “Sengkarut Undang-Undang Bahasa”
Tempo, 26 Maret 2007
10. “Genit”
Tempo, 4 Mei 2009
11. “Bahasamu Kastamu”
Kompas, 7 November 2015

Tentang Penulis



Eko Endarmoko, kelahiran Tarempa, Kepulauan Riau, 6 Oktober 1959. Ia pernah belajar Bahasa dan Sastra di Jurusan Sastra Indonesia FSUI (sekarang FIB UI, 1980—1986), bekerja sebagai wartawan di majalah perbukuan *Optimis* (1984—1985) sebelum ikut membidani dan kemudian menjabat Redaktur Pelaksana *Berita Buku* terbitan Ikapi Pusat (1987—1989). Pernah pula



ia bekerja sebagai penyunting—yang masih dilakoninya sampai sekarang—di Penerbit Pustaka Utama Grafiti (1989—1997). Sejak pertengahan 1997 ia bergabung dengan Komunitas Utan Kayu, yang kemudian menjelma Komunitas Salihara pada 2008, hingga nonaktif terhitung sejak 2013. Menulis esai dan kritik kebahasaan dan sastra di pelbagai media cetak, seperti *Basis*, *Horison*, *Kalam*, *Kompas*, *Tempo*, *Berita Nasional*, *Suara Karya*. Belakangan perhatiannya lebih fokus pada bahasa Indonesia dan menuangkan pemikirannya mengenai soal itu ke dalam sejumlah tulisan untuk, antara lain, majalah *Tempo*, harian *Kompas* dan di portal Beritagar.

Sejak Oktober 2017 ia mengasuh rubrik “Tabik” di <https://Beritagar.id//>.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Indeks



- Agresi militer 112
Aksi polisionil 112
Alfabet 82, 83, 84
Alisjahbana, Sutan Takdir 85, 104, 123
Alusi 78
Anomali 26, 27, 30, 31, 32
Anwar, Chairil 93
Armstrong, Neil 78
- Bachri, Sutardji Calzoum 51, 137
Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa xii, 3, 107, 108, 111, 134
Badudu, Jusuf Sjarif 46, 58, 119
Bang Ali 80
Bentuk baku 21, 22, 28, 64, 68, 69, 88
Bentuk bersaing 21, 68, 69
Berlin 54
Bung Karno 53
- Chaniago, Nur Arifin 46
Collins English Thesaurus in A-Z
Form 45, 138
Columbus, Christopher 113
- Dam , Nikolaos van 65, 137
Denotatif 75, 81
Diakronis 106
- Ejaan ix, x, xv, 2, 3, 24, 64, 73, 82, 84, 86, 112, 119, 121, 123
Ejaan yang Disempurnakan 82
- Fangohoy, Eko Y.A. 19
- Hamlet 75
Hardjasoedarmo, C.S 105
Heidegger 38
Heine , Heinrich 112, 113
Hitler, Adolf 113
Hooykaas, C 106
Hukum DM 85
- Instrumentalis 102
- Johnson, Samuel 63, 106, 107
- Kaidah k-p-s-t 17, 18
Kamus Sinonim Antonim Bahasa Indonesia 46
Kamus Sinonim Bahasa Indonesia 46
Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu dan Zain) 58
Kanda University of International Studies 82
Kata bersayap 75, 78, 79
Kata bersinonim 52, 55, 92
Kemenduaan 28, 97

- Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi 53
- Kluster (gugus konsonan) 17
- Konotatif 75, 81
- Konvensi 62, 84, 93, 116
- Kridalaksana 46, 59, 60, 121, 138
- Kusumawijaya, Marco 80
- Kyoko, Funada 82, 85
- Lanin, Ivan 8, 119
- Leech, Geoffrey 102, 138
- Leksikografi 44, 47, 105, 107
- Leksikologi 48
- Licentia poetica xii, 115, 125, 126,
127
- Lingua franca 110
- Linguistik ix
- Linguistik statistik 78
- Makna xi, xii, 2, 12, 13, 19, 20, 23,
25, 34, 35, 36, 38, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56,
57, 58, 68, 71, 72, 73, 74, 75,
77, 79, 81, 93, 94, 95, 106, 108,
113, 114, 115, 116, 117, 118,
120, 122, 133, 134
- Mangiang, Masmimar 55
- Marley, Bob 52
- Martinet, Jeanne 93, 138
- Matra 58
- Melayu-Betawi 98
- Merriam-Webster's Collegiate
Thesaurus 45, 138
- Metafor 42, 78, 79
- Moeliono, Anton M. 72, 76, 104,
119, 138
- Mohamad, Goenawan 93
- Morfologi 20, 48
- Naik Delman 15
- Natadipura, Yanwardi 20, 58
- Ophuijsen, van (ejaan) 82
- Oxford American Dictionaries 76
- Oxford English Dictionary 63, 139
- Pak Kasur 15, 16
- Pane, Armijn 104
- Parera, Jos Daniel 32
- Paris, Hotman 85
- Parsidi, Agata 61
- Pembentukan Kata dalam Bahasa
Indonesia 59, 138
- Peribahasa 108, 133
- Poedjasudira, J.Chr 105
- Poerbatjaraka 106, 110, 111
- Polisemi 50, 56, 72
- Polisi bahasa xii, 10, 11, 28, 29, 120
- Prent, K 105
- Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa 139
- Rosidi, Ajip 122
- Sahetapy, J. E 115
- Semantik 13, 20, 44, 48, 60, 93, 114
- Seneca 125
- Singgih, Amin 119
- Sinkronis 106
- Sinonim 45, 46, 47, 52, 71, 72
- Soeharto (presiden) 42, 60, 91
- Soerjono 15
- Spektrum makna 77
- Steven & Coconuttrees 52, 53
- Suhardi, Uu 58
- Sukarno 54, 60
- Sumpah Pemuda 8, 9, 74, 104, 111,
123

- Suprasegmental (unsur) 82, 83, 99
 Suryomentaram, Ki Ageng 38
 Suwandi (ejaan) 82
- Tempo xi, xii, xv, xvi, 20, 31, 32,
 57, 58, 82, 119, 137, 138, 141,
 142, 143, 144, 145
- Tesamoko: Tesaurus Bahasa
 Indonesia Edisi Kedua 45
- Tesaurus Alfabetis Bahasa
 Indonesia 45, 139
- Tesaurus Bahasa Indonesia 44, 47,
 56, 71, 137
- Thamrin, Mohammad Hoesni iv,
 104
- The Professor and the Madman 63,
 139
- Tindak tutur 99
- Tjokroaminoto, H.O.S 82
- Trench, Richard Chenevix 63
- U-Mag 58
- Undang-Undang Kebahasaan xii,
 3, 9, 121, 124, 128, 134, 135
- VOC vi, 59, 142
- Webster, Noah 106
- Winchester, Simon 63, 139
- Xenofobia v, 6, 141
- Yamin, Muhammad 110, 111

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Bunga rampai ini berisi 49 tulisan tentang masalah kebahasaan yang pernah dimuat dalam majalah *Tempo* dan harian *Kompas*. Secara umum, buku ini menyajikan panorama soal-soal kebahasaan yang “remeh”, mulai dari lingkup bunyi dan ejaan, aspek-aspek makna dan konteks, hingga ihwal kebijakan pemerintah dalam soal bahasa kebangsaan kita. Tidak sedikit tulisan dengan perspektif yang barangkali belum banyak ditilik orang dengan bersungguh-sungguh. Itulah perspektif yang hendak mengajak para pemerhati bahasa agar tidak tergesa-gesa menyalahkan penutur di tengah perbantahan mengenai siapa atau apa biang keladi kesemrawutan bahasa kita. Sudut pandang ini mencoba memeriksa mengapa banyak penutur agak enggan mengindahkan aturan bahasa Indonesia.

Buku *Remah-Remah Bahasa: Perbincangan dari Luar Pagar* hadir untuk menggugah kesadaran akan segi-segi bahasa yang kurang atau belum banyak diketahui penutur bahasa Indonesia dan membangun kesadaran akan perlunya tertib berbahasa. Buku ini terbagi tematis atas empat bagian, yaitu pengejawantahan aturan bahasa Indonesia di dalam praktik berbahasa; aspek-aspek kata, seperti posisi dan perilakunya, baik dalam hal bentuk maupun arti; kata dari aspek maknanya; serta penajaman dan pendalaman dari topik-topik sebelumnya. Buku ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber referensi bagi peneliti atau akademisi bidang kebahasaan, para pemerhati bahasa, dan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia pada umumnya.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BRIN Publishing
The Legacy of Knowledge

Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Gedung B.J. Habibie Lt. 8,
Jln. M.H. Thamrin No. 8,
Kota Jakarta Pusat 10340
Email: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.1747



ISBN 978-634-7933-01-0



9 786347 933010